



**DINAS KESEHATAN
KABUPATEN KLATEN**

RENCANA STRATEGIS

DINAS KESEHATAN KABUPATEN KLATEN

TAHUN 2021 - 2026

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT, atas karunia dan rahmat-Nya, penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kesehatan Kabupaten Klaten Tahun 2021-2026 dapat diselesaikan. Rencana Strategis ini digunakan sebagai pedoman pelaksanaan program dan kegiatan selama 5 (lima) tahun yaitu tahun 2021-2026 dan sebagai tolok ukur dalam melakukan penilaian kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Klaten.

Rencana Strategis ini disusun dalam rangka mengakomodir kondisi dan tantangan kedepan yang dihadapi Dinas Kesehatan Kabupaten Klaten.

Sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan, program dan kegiatan dalam Renstra diharapkan dapat dilaksanakan secara berkesinambungan tiap tahun anggaran, sehingga dapat dilihat hasil kegiatannya dalam mencapai Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran yang sudah ditetapkan Dinas Kesehatan Kabupaten Klaten.

Klaten, September 2021



Kepala Dinas Kesehatan
Kabupaten Klaten

dr. CAHYONO WIDODO, M.Kes

Pembina Tk. I

NIP. 19670210 199603 1 006

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GRAFIK	vi
BAB I PENDAHULUAN	1-1
1.1 Latar Belakang.....	1-1
1.2 Landasan Hukum.....	1-4
1.3 Maksud dan Tujuan	1-11
1.4 Sistematika Penulisan	1-11
BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH.....	2-1
2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah	2-1
2.2 Sumber Daya Organisasi Perangkat Daerah.....	2-16
2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	2-24
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Kesehatan dan RSUD Bagas Waras Kabupaten Klaten	2-55
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS.....	3-1
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah.....	3-1
3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Bupati dan Wakil Bupati Terpilih	3-4
3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi	3-6
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.....	3-13
3.5 Penentuan Isu-isu Strategis.....	3-23
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN	4-1
4.1 Tujuan Jangka Menengah Perangkat Daerah	4-1
4.2 Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah	4-1
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	5-1
5.1 Strategi.....	5-1
5.2 Arah Kebijakan.....	5-1
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN.....	6-1

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN.....	7-1
7.1 Indikator Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah .	7-1
7.2 Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah	7-3
BAB VIII PENUTUP	8-1
8.1 Pedoman Transisi	8-1
8.2 Kaidah Pelaksanaan.....	8-1

LAMPIRAN

Tabel 6.1	Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Dinas Kesehatan Kabupaten Klaten Tahun 2021-2026
-----------	--

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan di Dinas Kesehatan Kabupaten Klaten Tahun 2021	2-17
Tabel 2.2	Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan Dinas Kesehatan Kabupaten Klaten Tahun 2021	2-18
Tabel 2.3	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan di RSUD Bagas Waras Kabupaten Klaten Tahun 2021	2-19
Tabel 2.4	Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan di RSUD Bagas Waras Kabupaten Klaten Tahun 2021	2-20
Tabel 2.5	Jumlah Sarana dan Prasarana Berdasarkan Kondisi di Dinas Kesehatan Kabupaten Klaten Tahun 2021	2-21
Tabel 2.6	Jumlah Sarana dan Prasarana Berdasarkan Kondisi di RSUD Bagas Waras Kabupaten Klaten Tahun 2021	2-22
Tabel 2.7	Cakupan Desa Siaga Aktif Kabupaten Klaten Tahun 2016 – 2020.....	2-30
Tabel 2.8	Perkembangan Cakupan Kebidanan Kabupaten Klaten Tahun 2016 - 2020	2-32
Tabel 2.9	Perkembangan Cakupan Penanganan Gizi Kabupaten Klaten Tahun 2016 - 2020	2-33
Tabel 2.10	Perkembangan Cakupan Penanganan Penyakit yang Diderita Penduduk Kabupaten Klaten Tahun 2016 - 2020	2-33
Tabel 2.11	Perkembangan Cakupan Pelayanan Kesehatan Kabupaten Klaten Tahun 2016 - 2020	2-35
Tabel 2.12	Capaian Standar Pelayanan Minimal Kesehatan Kabupaten Klaten Tahun 2016 - 2020	2-36
Tabel 2.13	Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Kesehatan Kabupaten Klaten Tahun 2016 - 2021	2-39
Tabel 2.14	Pencapaian Kinerja Pelayanan RSUD Bagas Waras Kabupaten Klaten Tahun 2016 - 2021	2-48
Tabel 2.15	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Kesehatan Kabupaten Klaten Tahun 2016-2021	2-52

Tabel 2.16	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan RSUD Bagas Waras Kabupaten Klaten Tahun 2016-2021	2-54
Tabel 3.1	Identifikasi Permasalahan yang Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Kesehatan Kabupaten Klaten.....	3-1
Tabel 3.2	Faktor Penghambat dan Faktor Pendorong Pelayanan Dinas Kesehatan Kabupaten Klaten Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	3-5
Tabel 3.3	Permasalahan Pelayanan Dinas Kesehatan Kabupaten Klaten Berdasarkan Sasaran Renstra K/L beserta Faktor Penghambat dan Faktor Pendorong Keberhasilan Penanganannya	3-7
Tabel 3.4	Permasalahan Pelayanan Dinas Kesehatan Kabupaten Klaten Berdasarkan Sasaran Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah beserta Faktor Penghambat dan Faktor Pendorong Keberhasilan Penanganannya	3-11
Tabel 3.5	Isu Pembangunan Berkelanjutan dan Rekomendasi KLHS terkait Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	3-14
Tabel 3.6	Permasalahan Pelayanan Dinas Kesehatan Berdasarkan KLHS RPJMD Kabupaten Klaten Beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan	3-18
Tabel 4.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Kesehatan Kabupaten Klaten Tahun 2021-2026	4-2
Tabel 5.1	Strategi dan Arah Kebijakan Jangka Menengah Pelayanan Dinas Kesehatan Kabupaten Klaten	5-3
Tabel 7.1	Indikator Kinerja Penyelenggaraan Urusan Tahun 2021-2026	7-2
Tabel 7.2	Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah	7-4

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Keterkaitan Antar Dokumen Perencanaan	1-3
Gambar 2.1	Struktur Organisasi Dinas Kesehatan Kabupaten Klaten	2-3

DAFTAR GRAFIK

Grafik 2.1	Grafik Usia Harapan Hidup Kabupaten Klaten Tahun 2016-2020	2-24
Grafik 2.2	Perkembangan Angka Kematian Bayi Kabupaten Klaten Tahun 2016-2020	2-26
Grafik 2.3	Perkembangan Angka Kematian Balita Kabupaten Klaten Tahun 2016-2020	2-27
Grafik 2.4	Perkembangan Kasus Kematian Ibu Kabupaten Klaten Tahun 2016-2020	2-28
Grafik 2.5	Perkembangan Persentase Gizi Buruk dan Prevalensi Gizi Kurang Kabupaten Klaten Tahun 2016-2020	2-29
Grafik 2.6	Perkembangan Angka Kelangsungan Hidup Bayi Kabupaten Klaten Tahun 2016-2020	2-30
Grafik 2.7	Perkembangan Kematian Kematian Neonatal Kabupaten Klaten Tahun 2016-2020	2-31

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pembangunan kesehatan merupakan bagian integral dari pembangunan nasional yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Keberhasilan pembangunan kesehatan sangat ditentukan oleh kesinambungan antar upaya program dan sektor, serta kesinambungan dengan upaya-upaya yang telah dilaksanakan pada periode sebelumnya.

Kesehatan merupakan hak asasi manusia sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 perubahan kedua dalam Pasal 28H dan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Dalam Pasal 28H UUD Tahun 1945 dinyatakan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Dalam Amendemen UUD 1945 perubahan ketiga Pasal 34 ayat (3) juga menyatakan bahwa negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas umum yang layak. Berdasarkan amanat undang-undang tersebut, Pemerintah Daerah harus meningkatkan peran serta dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan yang merupakan urusan wajib guna mempercepat tercapainya tujuan pembangunan di Indonesia.

Renstra PD atau Rencana Strategis Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Renstra memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif.

Penyusunan Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Klaten sebagai upaya dalam melaksanakan pokok-pokok pikiran visi Bupati Klaten yaitu “Terwujudnya Kabupaten Klaten Yang Maju Mandiri dan Sejahtera” dan misi ke-5 yaitu mewujudkan kualitas sumber daya manusia yang cerdas, sehat, berbudaya, dan responsif gender.

Penyusunan renstra mengacu pada peraturan terkait perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah antara lain Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah; dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang dimutakhirkan melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Renstra disusun dengan tahapan-tahapan berikut :

- a. Persiapan penyusunan
- b. Penyusunan rancangan awal
- c. Penyusunan rancangan
- d. Pelaksanaan forum perangkat daerah/lintas perangkat daerah
- e. Perumusan rancangan akhir
- f. Penetapan

Sejalan dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, maka penyusunan Renstra OPD perlu memenuhi prinsip-prinsip sebagai berikut :

1. Teknokratis (Strategis)
2. Demokratis dan Partisipatif
3. Politis
4. Perencanaan *bottom-up*
5. Perencanaan *top-down*.

Renstra sebagai suatu dokumen rencana yang penting sudah sepatutnya mendapat perhatian dari Pemerintah Daerah, DPRD dan masyarakat terutama pada kualitas proses penyusunan dokumen Renstra OPD dan diikuti dengan pemantauan, evaluasi, dan review berkala atas implementasinya. Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Klaten Tahun 2021-2026 yang merupakan impelentasi

pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (RPJMD) Kabupaten Klaten Tahun 2021-2026 juga memperhatikan Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah dan Renstra Kementerian Kesehatan RI.

Renstra OPD Dinas Kesehatan Kabupaten Klaten ini disusun setelah RPJMD Kabupaten Klaten ditetapkan ataupun sebaliknya dapat digunakan sebagai bahan penyusunan RPJMD dan selanjutnya akan digunakan sebagai acuan atau pedoman untuk menyusun Rencana Kerja-OPD. Rencana Kerja-OPD merupakan dokumen perencanaan tahunan setiap unit kerja daerah sebagai turunan dari Renstra-OPD dan memuat rencana kegiatan pembangunan tahun berikutnya. Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Klaten memiliki keterkaitan dengan Renstra Kementerian Kesehatan dan Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah. Keterkaitan tersebut menggambarkan hubungan yang selaras antara Renstra Kementerian Kesehatan, Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah, dan Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Klaten. Renstra tersebut memiliki periode perencanaan yang berbeda. Keterkaitan dokumen Renstra dapat dijelaskan dengan diagram berikut :

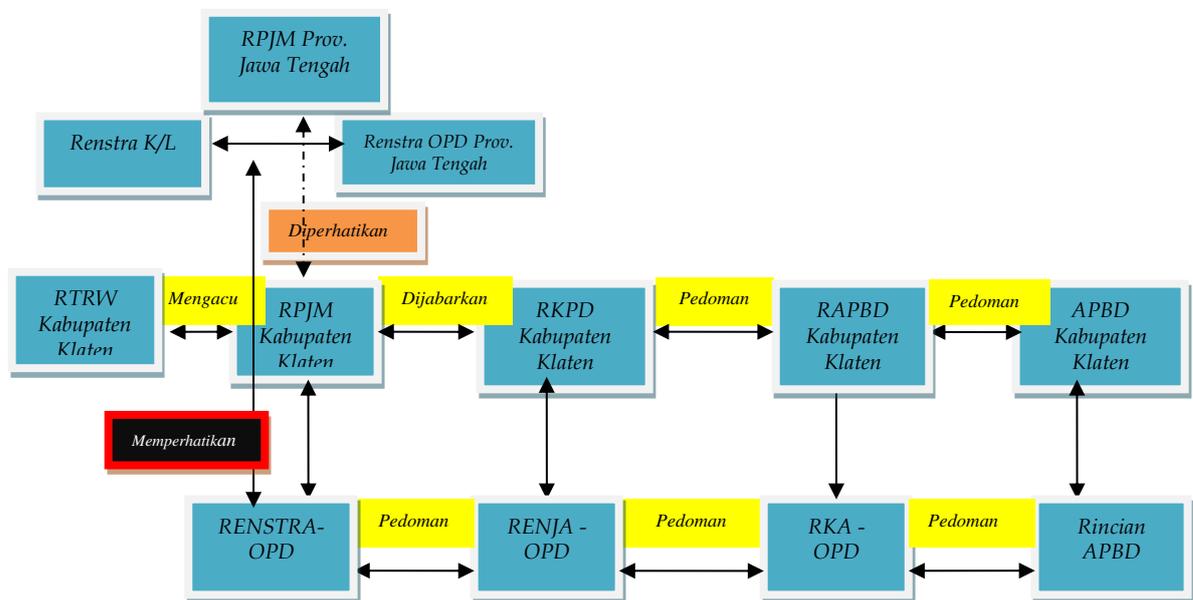


Diagram I.1 Hubungan Antar Dokumen

Pembangunan kesehatan di Kabupaten Klaten Tahun 2021–2026 memerlukan peran aktif dari masyarakat yang tercermin dari strategi dan sasaran

utama dalam Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Klaten. Program-program kesehatan yang menitikberatkan pada Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat (UKBM) diharapkan mampu menanggulangi faktor risiko masalah-masalah kesehatan yang terjadi di masyarakat, sehingga diharapkan seluruh jajaran kesehatan saling bahu membahu dalam menyelenggarakan pembangunan kesehatan guna mewujudkan Visi Dinas Kesehatan Kabupaten Klaten “Mewujudkan Klaten Sehat dan Sejahtera”.

1.2. Landasan Hukum

Penyusunan Renstra OPD perlu mengembangkan hubungan (*link*) di antara peraturan dan perundangan tersebut sehingga Renstra OPD sebagai dokumen rencana jangka menengah mudah diterjemahkan ke dalam rencana tahunan RKP, KUA APBD, Renja OPD, RKA-OPD, dan APBD. Landasan hukum utama yang mengatur sistem, mekanisme, proses dan prosedur tentang Renstra OPD khususnya dan perencanaan dan penganggaran daerah yaitu :

- 1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 18;
- 2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
- 3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- 5) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 6) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 7) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
- 8) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 - 9) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 69);
 - 10) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
 - 11) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 - 12) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang -Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 - 13) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

- 14) Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
- 15) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
- 16) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4697);
- 17) Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
- 18) Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
- 19) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
- 20) Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan KLHS (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
- 21) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan Dan Penganggaran Pembangunan Nasional

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
- 22) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 - 23) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 - 24) Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
 - 25) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan serta Penyelamatan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Tahun 2020 Nomor 131);
 - 26) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6633);
 - 27) Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 36);
 - 28) Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
 - 29) Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 Tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional;
 - 30) Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 6 tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Data Gender dan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 254);

- 31) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
- 32) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 48 Tahun 2017 tentang Pedoman Perencanaan dan Penganggaran Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1612);
- 33) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
- 34) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
- 35) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
- 36) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 68);
- 37) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 Tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1335);
- 38) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
- 39) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Keuangan Daerah

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447) sebagaimana dimutakhirkan melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi Dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;

- 40) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
- 41) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan 2020 – 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 914);
- 42) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3 Seri E Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);
- 43) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Provinsi Jawa Tengah Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 121);
- 44) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2017 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Terpadu (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 91);
- 45) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 110);

- 46) Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 7 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2009 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 46);
- 47) Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Klaten Tahun 2011–2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2011 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 66);
- 48) Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Klaten (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 138);
- 49) Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Stunting;
- 50) Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2021 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 219);
- 51) Peraturan Bupati Klaten Nomor 12 Tahun 2017 tentang Standar Pelayanan Minimal Sarana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat Pemerintah Kabupaten Klaten;
- 52) Peraturan Bupati Klaten Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pembentukan Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Laboratorium Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Klaten;
- 53) Peraturan Bupati Klaten Nomor 35 Tahun 2017 tentang Pembentukan Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Instalasi Farmasi Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Klaten;
- 54) Peraturan Bupati Klaten Nomor 32 Tahun 2018 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Klaten;
- 55) Peraturan Bupati Klaten No 8 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah di Kabupaten Klaten;

- 56) Peraturan Bupati Klaten Nomor 51 Tahun 2020 tentang Pembentukan Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Bagas Waras Kabupaten Klaten;

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Klaten Tahun 2021-2026 adalah untuk memberikan arah, pedoman dan penjelasan program makro pembangunan kesehatan di Kabupaten Klaten dalam rangka pencapaian visi dan misi kepala daerah terpilih tahun 2021–2026.

Tujuan penyusunan Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Klaten Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut :

1. Menggambarkan kondisi kesehatan di Kabupaten Klaten saat ini, permasalahan dan isu strategis, tujuan dan sasaran, strategi dan arah kebijakan serta program pembangunan di bidang kesehatan untuk mencapai visi dan melaksanakan misi kepala daerah
2. Sebagai dokumen perencanaan Dinas Kesehatan Kabupaten Klaten untuk periode 5 tahun yaitu tahun 2021-2026.
3. Memberikan arah kebijakan dan prioritas pembangunan tahunan di bidang kesehatan dan sebagai acuan resmi dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas Kesehatan yang merupakan dokumen perencanaan tahunan Dinas Kesehatan.
4. Memberikan tolok ukur dan instrumen bagi Dinas Kesehatan dan masyarakat dalam melakukan evaluasi kinerja Dinas Kesehatan dalam penyelenggaraan pembangunan di bidang kesehatan.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rencana Strategis Dinas Kesehatan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 adalah sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II. GAMBARAN PELAYANAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

- 2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Perangkat Daerah
- 2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah
- 2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

- 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah
- 3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
- 3.3. Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi
- 3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
- 3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis

BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN

- 4.1. Tujuan Jangka Menengah Perangkat Daerah
- 4.2. Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

- 5.1. Strategi
- 5.2. Arah Kebijakan

BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

BAB VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

- 7.1 Indikator Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
- 7.2 Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah

BAB VIII. PENUTUP

- 8.1 Pedoman Transisi
- 8.2 Kaidah Pelaksanaan

LAMPIRAN

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Dinas Kesehatan berkedudukan sebagai unsur pelaksana otonomi daerah di bidang kesehatan. Dinas Kesehatan dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Dinas Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang kesehatan.

Dalam melaksanakan tugas-tugas pembangunan yang diembannya, Dinas Kesehatan Kabupaten Klaten berdasar pada Peraturan Bupati Klaten Nomor 32 Tahun 2018 Tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Klaten, Peraturan Bupati Klaten Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pembentukan Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Laboratorium Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Klaten, Peraturan Bupati Klaten Nomor 35 Tahun 2017 tentang Pembentukan Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Instalasi Farmasi Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Klaten dan Peraturan Bupati Klaten Nomor 51 Tahun 2020 tentang Pembentukan Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Bagas Waras Kabupaten Klaten.

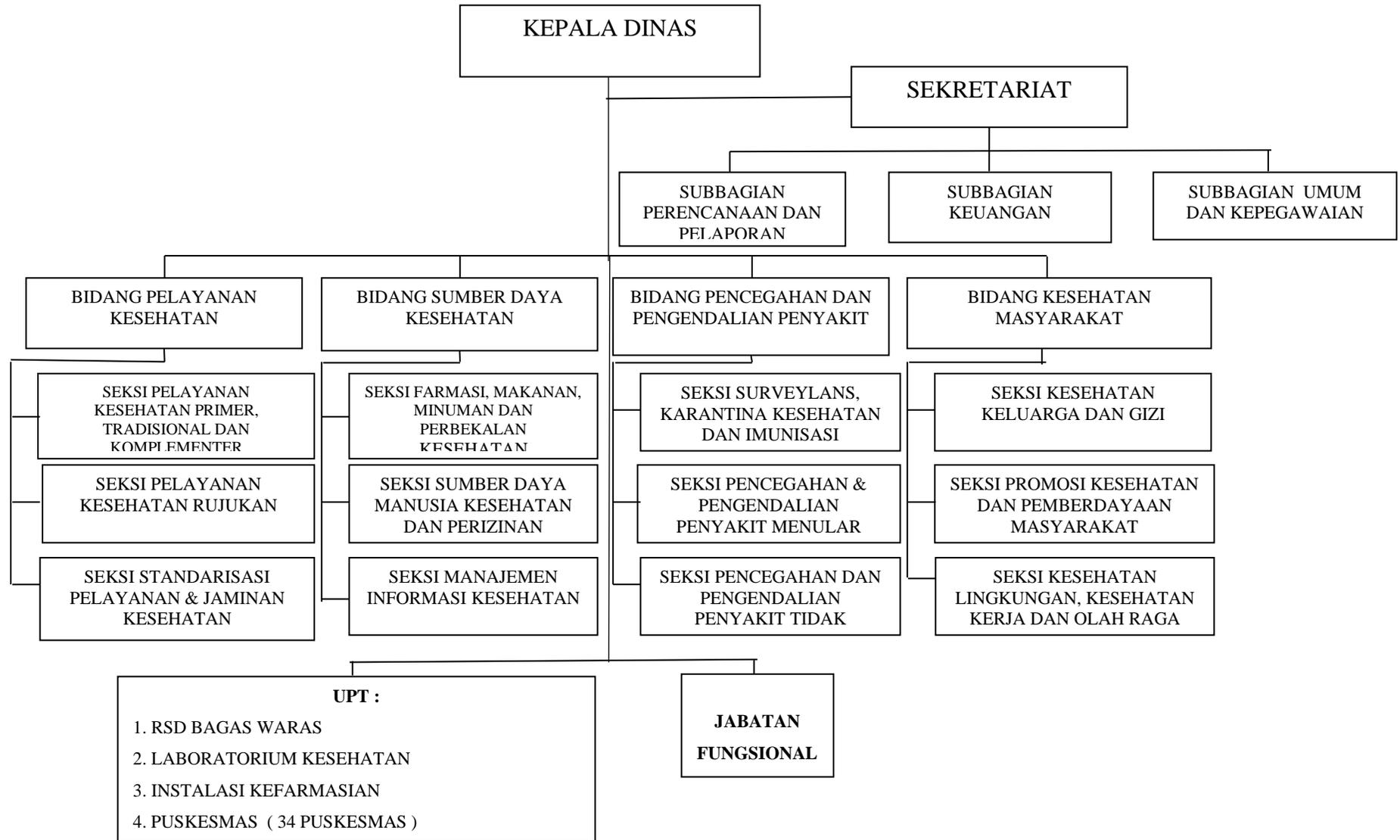
2.1.1 Struktur Organisasi

Dinas Kesehatan Kabupaten Klaten dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Klaten Nomor 32 Tahun 2018 Tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Klaten. Susunan Organisasi Dinas Kesehatan adalah sebagai berikut :

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretariat :
 1. Subbagian Perencanaan dan Pelaporan
 2. Subbagian Keuangan
 3. Subbagian Umum dan Kepegawaian

- c. Bidang Pelayanan Kesehatan
 - 1. Seksi Pelayanan Kesehatan Primer, Tradisional dan Komplementer
 - 2. Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan
 - 3. Seksi Standarisasi Pelayanan dan Jaminan Kesehatan
- d. Bidang Sumber Daya Kesehatan
 - 1. Seksi Farmasi, Makanan, Minuman dan Perbekalan Kesehatan
 - 2. Seksi Sumber Daya Manusia Kesehatan dan Perizinan
 - 3. Seksi Manajemen Informasi Kesehatan
- e. Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
 - 1. Seksi Surveilans, Karantina Kesehatan dan Imunisasi
 - 2. Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular
 - 3. Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa
- f. Bidang Kesehatan Masyarakat
 - 1. Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi
 - 2. Seksi Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
 - 3. Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olah Raga
- g. UPT
 - 1. RSUD Bagas Waras
 - 2. Laboratorium Kesehatan
 - 3. Instalasi Kefarmasian
 - 4. Puskesmas (34 Puskesmas)
- h. Jabatan Fungsional

**BAGAN ORGANISASI
DINAS KESEHATAN KABUPATEN KLATEN
PERATURAN BUPATI KLATEN NOMOR 32 TAHUN 2018**



2.1.2 Uraian Tugas

Berdasarkan Peraturan Bupati Klaten Nomor 32 Tahun 2018 Tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Klaten, Dinas Kesehatan Kabupaten Klaten mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan. Dalam melaksanakan tugasnya, Dinas Kesehatan menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan bidang kesehatan;
- b. pelaksanaan kebijakan bidang kesehatan;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang kesehatan;
- d. pelaksanaan administrasi Dinas;
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya

Uraian tugas dan fungsi masing-masing jabatan sesuai Peraturan Bupati Klaten Nomor 32 Tahun 2018 Tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Klaten sebagai berikut :

1. Kepala Dinas

Kepala Dinas Kesehatan mempunyai tugas memimpin penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang kesehatan, meliputi perumusan kebijakan teknis perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian bidang kesehatan, pemberian bimbingan dan pembinaan pegawai serta pengawasan pelaksanaan kegiatan UPT. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut di atas, Kepala Dinas menyelenggarakan fungsi :

- a. mengoordinasikan penyusunan program Dinas dengan memberikan arahan kepada Sekretaris dan Kepala Bidang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Indikator Kinerja Utama, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Rencana Strategis Kabupaten, kebijakan Bupati dan kondisi obyektif sesuai ketentuan yang berlaku;

- b. mengoordinasikan penyusunan kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis dibidang kesehatan;
- c. mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan pelayanan di bidang kesehatan;
- d. mengoordinasikan pekerjaan yang sifatnya segera atas gangguan dan atau bencana;
- e. mengoordinasikan penyusunan laporan kinerja Dinas;
- f. memberikan saran dan masukan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah di bidang kesehatan;
- g. memberikan rekomendasi dan izin di bidang kesehatan;
- h. memberikan persetujuan atau dispensasi di bidang kesehatan;
- i. melaksanakan advokasi hukum di bidang kesehatan;
- j. mengupayakan peningkatan peran serta dan partisipasi masyarakat di bidang kesehatan;
- k. mengoordinasikan tugas kepada bawahan sesuai bidangnya berdasarkan ketentuan yang berlaku;
- l. mengusulkan, menunjuk, dan melaksanakan pembinaan pejabat pengelolaan keuangan;
- m. membina pelaksanaan pengelolaan keuangan BLUD di bidang kesehatan;
- n. menetapkan pejabat pengelola kegiatan;
- o. membina bawahan dalam pencapaian program dinas dengan memberi petunjuk pemecahan masalah agar bawahan mampu melaksanakan tugas jabatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- p. mengevaluasi dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan pada tahun yang sudah dan sedang berjalan berdasarkan rencana dan realisasi sebagai bahan dalam penyusunan sasaran tahun berikutnya;
- q. menilai pencapaian sasaran kinerja pegawai yang menjadi bawahannya dengan jalan memantau dan mengevaluasi sasaran kinerja pegawai;
- r. melaksanakan koordinasi dengan perangkat daerah dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;

- s. melaksanakan kerjasama dengan pihak lain dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;
- t. menginventarisasi permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan bidang kesehatan;
- u. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya;
- v. melaporkan hasil pertanggungjawaban pelaksanaan tugas/kegiatan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

2. Sekretariat

Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas dalam merumuskan kebijakan, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan kegiatan perencanaan, monitoring, evaluasi, pelaporan, keuangan, umum dan kepegawaian. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut di atas, sekretariat menyelenggarakan fungsi :

- a. menghimpun, mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis perencanaan, monitoring, evaluasi, pelaporan, keuangan, umum dan kepegawaian;
- b. mendistribusikan tugas perencanaan, monitoring, evaluasi, pelaporan, keuangan, umum dan kepegawaian;
- c. mengoordinasikan penyusunan rencana program kegiatan sekretariat berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- d. mengoordinasikan, menyiapkan rumusan kebijakan strategis program dan kegiatan dalam rangka penyusunan anggaran pendapatan dan belanja Dinas;
- e. mengoordinasikan bahan penyusunan evaluasi dan pelaporan program Dinas;
- f. mengoordinasikan penyusunan laporan kinerja Dinas;
- g. mengoordinasikan bahan rancangan peraturan perundang-undangan dan advokasi hukum di bidang kesehatan;

- h. mengoordinasikan pemberian rekomendasi dan izin dibidang kesehatan;
- i. mengoordinasikan pemberian persetujuan atau dispensasi dibidang kesehatan;
- j. mengoordinasikan pengelolaan keuangan BLUD di bidang kesehatan;
- k. mengoordinasikan pengelolaan retribusi daerah di bidang kesehatan;
- l. mengoordinasikan usulan, penunjukan, pejabat pengelolaan keuangan dinas;
- m. mengoordinasikan penetapan pejabat pengelola kegiatan;
- n. mengoordinasikan penyampaian informasi, publikasi dan hubungan masyarakat serta layanan pengaduan masyarakat;
- o. mengoordinasikan penyusunan mekanisme sistem prosedur kerja Dinas;
- p. memberikan usul dan saran kepada atasan sesuai bidang tugasnya;
- q. memberikan bimbingan dan petunjuk agar pelaksanaan tugas dapat berjalan dengan lancar;
- r. menilai pencapaian sasaran kinerja pegawai bawahannya;
- s. mengevaluasi dan menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas serta mencari alternatif pemecahan masalah;
- t. melaksanakan koordinasi dan kerjasama sesuai bidang tugasnya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;
- u. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya;
- v. melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.

3. Bidang Pelayanan Kesehatan

Bidang Pelayanan Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas di bidang pelayanan kesehatan meliputi pelayanan kesehatan primer, tradisional dan komplementer, pelayanan kesehatan

rujukan, standarisasi pelayanan dan jaminan kesehatan. Dalam melaksanakan tugasnya, Bidang Pelayanan Kesehatan menyelenggarakan fungsi :

- a. menghimpun, mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis bidang pelayanan kesehatan;
- b. mengoordinasikan bahan penyusunan kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis bidang pelayanan kesehatan;
- c. mendistribusikan tugas di Bidang Pelayanan Kesehatan;
- d. mengoordinasikan penyusunan rencana program Bidang Pelayanan Kesehatan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- e. mengoordinasikan, menyiapkan rumusan kebijakan strategis program dalam rangka penyusunan anggaran pendapatan dan belanja Bidang Pelayanan Kesehatan;
- f. menyelenggarakan administrasi dan ketatausahaan Bidang Pelayanan Kesehatan;
- g. mengoordinasikan penyusunan mekanisme sistem prosedur kerja sesuai bidang tugasnya;
- h. mengoordinasikan program PSC 119 di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) milik pemerintah maupun swasta;
- i. mengoordinasikan pelaksanaan program peningkatan pelayanan kesehatan primer, tradisional dan komplementer, pelayanan kesehatan rujukan, standarisasi pelayanan dan jaminan kesehatan;
- j. melaksanakan koordinasi jejaring lintas program dan lintas sektoral terkait pelayanan kesehatan primer, pelayanan kesehatan rujukan, standarisasi pelayanan dan jaminan kesehatan;
- k. memberikan usul dan saran kepada atasan sesuai bidang tugasnya;
- l. melaksanakan pembinaan, bimbingan, pengawasan dan pengendalian agar pelaksanaan tugas dapat berjalan dengan lancar;
- m. menilai pencapaian sasaran kinerja pegawai bawahan;

- n. mengevaluasi dan menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas serta mencari alternatif pemecahan masalah;
- o. melaksanakan koordinasi dan kerjasama sesuai bidang tugasnya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;
- p. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya;
- q. melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.

4. Bidang Sumber Daya Kesehatan

Bidang Sumber Daya Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas di bidang sumber daya kesehatan meliputi farmasi, makanan, minuman dan perbekalan kesehatan, sumber daya manusia kesehatan dan perizinan dan manajemen informasi kesehatan. Dalam melaksanakan tugasnya, Bidang Sumber Daya Kesehatan menyelenggarakan fungsi :

- a. menghimpun, mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis di Bidang Sumber Daya Kesehatan;
- b. mengoordinasikan bahan penyusunan kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis bidang Sumber Daya Kesehatan;
- c. mengoordinasikan tugas di Bidang Sumber Daya Kesehatan;
- d. mengoordinasikan penyusunan rencana program di Bidang Sumber Daya Kesehatan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- e. mengoordinasikan rumusan kebijakan strategis program dalam rangka penyusunan anggaran di Bidang Sumber Daya Kesehatan;
- f. menyelenggarakan penatausahaan Bidang Sumber Daya Kesehatan;
- g. mengoordinasikan penyusunan mekanisme sistem prosedur kerja sesuai bidang tugasnya;
- h. mengoordinasikan perumusan kebijakan di bidang sumber daya kesehatan;

- i. memberikan usul dan saran kepada atasan sesuai bidang tugasnya;
- j. melaksanakan pembinaan, bimbingan, pengawasan dan pengendalian agar pelaksanaan tugas dapat berjalan dengan lancar;
- k. menilai pencapaian sasaran kinerja pegawai bawahannya;
- l. mengevaluasi dan menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas serta mencari alternatif pemecahan masalah;
- m. melaksanakan koordinasi dan kerjasama sesuai bidang tugasnya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;
- n. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya;
- o. melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.

5. Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit

Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas di bidang pencegahan dan pengendalian penyakit meliputi surveilans, karantina kesehatan dan imunisasi, pencegahan dan pengendalian penyakit menular, serta pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa. Dalam melaksanakan tugasnya, Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit menyelenggarakan fungsi :

- a. menghimpun, mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis di Bidang Pencegahan Dan Pengendalian Penyakit;
- b. mengoordinasikan bahan penyusunan kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis bidang pencegahan dan pengendalian penyakit;
- c. mendistribusikan tugas dibidang pencegahan dan pengendalian penyakit;
- d. mengoordinasikan penyusunan rencana program bidang pencegahan dan pengendalian penyakit berdasarkan peraturan perundang-undangan;

- e. mengoordinasikan, menyiapkan rumusan kebijakan strategis program dalam rangka penyusunan anggaran bidang pencegahan dan pengendalian penyakit;
- f. menyelenggarakan administrasi dan ketatausahaan Bidang Pencegahan Dan Pengendalian Penyakit;
- g. mengoordinasikan penyusunan mekanisme sistem prosedur kerja sesuai bidang tugasnya;
- h. mengoordinasikan penyiapan bahan perumusan kebijakan operasional di bidang surveilans, karantina kesehatan dan imunisasi, pencegahan dan pengendalian penyakit menular, pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa;
- i. memberi petunjuk norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang surveilans, karantina kesehatan dan imunisasi, pencegahan dan pengendalian penyakit menular, pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa;
- j. menyelia teknis dan supervisi di bidang surveilans, karantina kesehatan dan imunisasi, pencegahan dan pengendalian penyakit menular, pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa;
- k. memberikan usul dan saran kepada atasan sesuai bidang tugasnya;
- l. melaksanakan pembinaan, bimbingan, pengawasan dan pengendalian agar pelaksanaan tugas dapat berjalan dengan lancar;
- m. menilai pencapaian sasaran kinerja pegawai bawahannya;
- n. mengevaluasi dan menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas serta mencari alternatif pemecahan masalah;
- o. melaksanakan koordinasi dan kerjasama sesuai bidang tugasnya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;
- p. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya;
- q. melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.

5. Bidang Kesehatan Masyarakat

Bidang Kesehatan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas di bidang kesehatan masyarakat meliputi kesehatan keluarga dan gizi, promosi kesehatan, pemberdayaan masyarakat, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olahraga. Dalam melaksanakan tugasnya, Bidang Kesehatan Masyarakat menyelenggarakan fungsi :

- a. menghimpun, mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis di bidang Kesehatan Masyarakat;
- b. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis bidang Kesehatan Masyarakat;
- c. mengoordinasikan tugas di bidang Kesehatan Masyarakat;
- d. mengoordinasikan penyusunan rencana program bidang kesehatan masyarakat berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- e. mengoordinasikan, menyiapkan rumusan kebijakan strategis program dalam rangka penyusunan anggaran bidang kesehatan masyarakat;
- f. menyelenggarakan administrasi dan ketatausahaan Bidang Kesehatan Masyarakat;
- g. mengoordinasikan penyusunan mekanisme sistem prosedur kerja sesuai bidang tugasnya;
- h. mengoordinasikan penyiapan bahan perumusan kebijakan operasional di bidang kesehatan masyarakat;
- i. memberi petunjuk norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang kesehatan masyarakat;
- j. menyelia teknis dan supervisi di bidang kesehatan masyarakat;
- k. memberikan usul dan saran kepada atasan sesuai bidang tugasnya;
- l. melaksanakan pembinaan, bimbingan, pengawasan dan pengendalian agar pelaksanaan tugas dapat berjalan dengan lancar;
- m. menilai pencapaian sasaran kinerja pegawai bawahannya;

- n. mengevaluasi dan menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas serta mencari alternatif pemecahan masalah;
- o. melaksanakan koordinasi dan kerjasama sesuai bidang tugasnya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;
- p. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya;
- q. melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.

6. Rumah Sakit Umum Daerah Bagas Waras

Berdasarkan Peraturan Bupati Klaten 51 Tahun 2020 tentang Pembentukan Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Rumah sakit Umum Daerah Bagas Waras Kabupaten Klaten, RSUD Bagas Waras Kabupaten Klaten mempunyai tugas memberikan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna.

Dalam melaksanakan tugasnya, RSUD Bagas Waras Kabupaten Klaten menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyelenggaraan pelayanan pengobatan dan pemulihan kesehatan sesuai dengan standar pelayanan rumah sakit;
- b. Pemeliharaan dan peningkatan kesehatan perorangan melalui pelayanan kesehatan yang paripurna tingkat kedua sesuai kebutuhan medis;
- c. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia dalam rangka peningkatan kemampuan dalam pemberian pelayanan kesehatan;
- d. Penyelenggaraan penelitian dan pengembangan serta penapisan teknologi bidang kesehatan dalam rangka peningkatan pelayanan kesehatan dengan memperhatikan etika ilmu pengetahuan bidang kesehatan;
- e. Pengelolaan keuangan, barang milik daerah dan kepegawaian;
- f. Pengelolaan urusan hukum, hubungan masyarakat, organisasi dan tatalaksana.

Uraian tugas dan fungsi masing-masing jabatan sesuai Peraturan Bupati Klaten Nomor 51 Tahun 2020 tentang Pembentukan Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Bagas Waras Kabupaten Klaten sebagai berikut :

a. Direktur RSUD Bagas Waras

Direktur RSUD Bagas Waras mempunyai tugas memimpin penyelenggaraan rumah sakit. Dalam melaksanakan tugasnya, direktur mempunyai fungsi :

1. Pengoordinasian pelaksanaan tugas dan fungsi unsur organisasi.
2. Penetapan kebijakan penyelenggaraan RSUD Bagas Waras sesuai dengan kewenangannya.
3. Penyelenggaraan tugas dan fungsi RSUD Bagas Waras.
4. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi.
5. Pelaksanaan evaluasi, pencatatan dan pelaporan.
6. Pelaksanaan fungsi lain yang berkaitan dengan tugasnya.

b. Bagian Tata Usaha.

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengoordinasikan, mengendalikan pembinaan dan mengevaluasi kegiatan administrasi umum kepegawaian, keuangan, perencanaan dan pelaporan. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut di atas, Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi :

1. Pengoordinasian penyusunan kegiatan perencanaan, ketatausahaan, kepegawaian, kerumahtanggaan dan keuangan.
2. Pengoordinasian kegiatan perencanaan, ketatausahaan, kepegawaian, kerumahtanggaan dan keuangan.
3. Pengoordinasian perencanaan, ketatausahaan, pengadaan barang/jasa untuk keperluan RSUD Bagas
4. Pengoordinasian pelaporan dan evaluasi kegiatan perencanaan, ketatausahaan, kepegawaian, kerumahtanggaan dan keuangan.

5. Pelaksanaan fungsi lain yang berkaitan dengan tugasnya.

c. Bidang Pelayanan Medik dan Keperawatan.

Bidang Pelayanan Medik dan Keperawatan mempunyai tugas melaksanakan pelayanan medik dan keperawatan. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut di atas, Bidang Pelayanan Medik dan Keperawatan menyelenggarakan fungsi :

1. Penyusunan rencana pemberian pelayanan medik dan keperawatan.
2. Koordinasi dan pelaksanaan pelayanan medik dan keperawatan.
3. Pelaksanaan kendali mutu, kendali biaya, dan keselamatan pasien di bidang pelayanan medik dan keperawatan.
4. Pemantauan dan evaluasi pelayanan medik dan keperawatan.
5. Pelaksanaan fungsi lain yang berkaitan dengan tugasnya.

d. Bidang Penunjang Medik dan Non Medik

Bidang Penunjang Medik dan Non Medik mempunyai tugas melaksanakan pelayanan penunjang medik dan non medik. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut di atas, Bidang Penunjang Medik dan Non Medik menyelenggarakan fungsi :

1. Penyusunan rencana pemberian pelayanan penunjang medik dan non medik.
2. Koordinasi dan pelaksanaan pelayanan penunjang medik dan non medik.
3. Pelaksanaan kendali mutu, kendali biaya, dan keselamatan pasien di bidang pelayanan penunjang medik dan non medik.
4. Pengelolaan rekam medis.
5. Pemantauan dan evaluasi pelayanan penunjang medik dan non medik.
6. Pelaksanaan fungsi lain yang berkaitan dengan tugasnya.

- e. Bidang Pengembangan dan Penelitian, Hukum dan Kehumasan Bidang Pengembangan dan Penelitian, Hukum dan Kehumasan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, monitoring dan evaluasi pelaksanaan program pengembangan, penelitian, hukum, kehumasan, mutu dan pengelolaan layanan aduan. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut di atas, Bidang Pengembangan dan Penelitian, Hukum dan Kehumasan menyelenggarakan fungsi :
1. Pengoordinasian penyusunan rencana kegiatan bidang pengembangan, penelitian, hukum, kehumasan, mutu dan pengelolaan layanan aduan.
 2. Pengoordinasian kegiatan bidang pengembangan, penelitian, hukum, kehumasan, mutu dan pengelolaan layanan aduan.
 3. Pengoordinasian pelaporan dan evaluasi kegiatan bidang pengembangan, penelitian, hukum, kehumasan, mutu dan pengelolaan layanan aduan.
 5. Penyelenggaraan penelitian dan pengembangan.
 6. Pelaksanaan fungsi lain yang berkaitan dengan tugasnya.

2.2 Sumber Daya Organisasi Perangkat Daerah

Sumber daya yang dimiliki oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Klaten terdiri dari Sumber Daya Manusia (SDM) yang berperan dalam mendukung pelaksanaan program dan kegiatan dalam mencapai tujuan pembangunan kesehatan dan sumber daya lainnya berupa sarana dan prasarana sebagai penunjang operasional kegiatan.

2.2.1. Sumber Daya Manusia (Pegawai) Dinas Kesehatan Kabupaten Klaten

Sumber Daya Manusia (SDM) yang dimiliki oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Klaten dan 34 Puskesmas se-Kabupaten Klaten berdasarkan tingkat pendidikan adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1
Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan
di Dinas Kesehatan Kabupaten Klaten Tahun 2021

No	Tingkat Pendidikan	PNS		Non PNS		Jumlah
		L	P	L	P	
1	SD	0	0	3	0	3
2	SMP Sederajat	11	3	15	2	31
3	SMA Sederajat	41	55	85	22	203
4	Diploma I	5	9	-	1	15
5	Diploma III	66	429	2	12	509
6	Diploma IV	7	46	-	1	54
7	S1	47	197	10	10	264
8	S2	10	13	-	-	23
9	S3	0	1	-	-	1
Jumlah		187	753	115	48	1103

Sumber : Kasubbag Umum dan Kepegawaian Dinas Kesehatan, 2021

Dalam Tabel 2.1 di atas dapat dilihat bahwa PNS yang ada di Dinas Kesehatan Kabupaten Klaten dan 34 puskesmas di Kabupaten Klaten Tahun 2021 berjumlah 940 yang terdiri dari 187 orang berjenis kelamin laki-laki dan 753 orang berjenis kelamin perempuan. Sedangkan non PNS berjumlah 163 orang terdiri dari 115 orang berjenis kelamin laki-laki dan berjenis kelamin perempuan sebanyak 48 orang.

Berdasarkan tabel di atas juga dapat digambarkan bahwa di Dinas Kesehatan Kabupaten Klaten dan 34 Puskesmas se-Kabupaten Klaten untuk tingkat pendidikan dengan status kepegawaian PNS yang paling banyak yaitu D3 sebanyak 66 orang berjenis kelamin laki-laki dan 429 berjenis kelamin perempuan. Sedangkan tenaga non PNS yang paling banyak mendominasi adalah yang tingkat pendidikannya SMA atau sederajat sebanyak 85 orang laki-laki dan 22 orang perempuan.

PNS Dinas Kesehatan Kabupaten Klaten tidak ada lagi yang berpendidikan SD dan Non PNS Dinas Kesehatan Kabupaten Klaten dan puskesmas se Kabupaten Klaten tidak ada yang berpendidikan S2 dan S3.

Dari tabel dan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pegawai Dinas Kesehatan dan Puskesmas se Kabupaten sudah cukup banyak tetapi jumlah dan distribusi penempatan pegawai masih harus ditingkatkan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat.

Sumber Daya Manusia (SDM) yang dimiliki oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Klaten dan 34 Puskesmas se-Kabupaten Klaten berdasarkan golongan adalah sebagai berikut :

Tabel 2.2
Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan
di Dinas Kesehatan Kabupaten Klaten Tahun 2021

No	Golongan	L	P	Jumlah
1	Golongan II	66	187	253
2	Golongan III	104	525	629
3	Golongan IV	17	41	58
Jumlah		187	753	940

Sumber : Kasubbag Umum dan Kepegawaian Dinas Kesehatan, 2021

Berdasarkan tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa pegawai Dinas Kesehatan Kabupaten Klaten dan Puskesmas se Kabupaten Klaten yang paling banyak adalah golongan III sejumlah 104 pegawai laki-laki dan 525 pegawai perempuan.

RSUD Bagas Waras sebagai UPTD Dinas Kesehatan juga memiliki Sumber Daya Manusia (SDM) yang diharapkan bisa meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Pengelompokan SDM RSUD Bagas Waras Kabupaten Klaten berdasarkan kualifikasi pendidikan adalah sebagai berikut :

Tabel 2.3
Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan RSUD Bagas Waras
Kabupaten Klaten Tahun 2021

NO	TINGKAT PENDIDIKAN	PNS		CPNS		NON PNS		PARUH WAKTU		JUMLAH
		L	P	L	P	L	P	L	P	
1	SMP SEDERAJAT	-	-	-	-	3	-	-	-	3
2	SMA SEDERAJAT	4	2	-	-	42	28	-	-	76
3	D3	12	21	8	38	35	149	-	-	263
4	D4	-	6	-	2	-	1	-	-	9
5	S1	13	12	-	10	15	28	2	-	80
6	S2	11	10	5	1	4	3	-	1	35
7	S3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
JUMLAH		40	51	13	51	99	209	2	1	466

Sumber : Kasubbag Umum dan Kepegawaian RSUD Bagas Waras, 2021

Dalam tabel 2.3 dapat dinyatakan bahwa PNS yang ada di RSUD Bagas Waras Kabupaten Klaten Tahun 2021 berjumlah 91 yang terdiri dari 40 orang berjenis kelamin laki-laki dan 51 orang berjenis kelamin perempuan. Di tahun 2021 RSUD mendapat tambahan CPNS sebanyak 64 orang dengan rincian 13 orang berjenis kelamin laki-laki dan berjenis perempuan sebanyak 51 orang.

Jumlah Non PNS adalah 308 orang terdiri dari 99 orang berjenis kelamin laki-laki dan berjenis kelamin perempuan sebanyak 209 orang. Di RSUD Bagas Waras Kabupaten Klaten juga terdapat pegawai paruh waktu sejumlah 3 orang terdiri dari 2 orang laki-laki dan 1 orang perempuan.

Berdasarkan tabel di atas juga dapat digambarkan bahwa di RSUD Bagas Waras Kabupaten Klaten untuk tingkat pendidikan dengan status kepegawaian PNS yang paling banyak yaitu D3 sebanyak 21 orang berjenis kelamin perempuan. Sedangkan dalam status kepegawaian CPNS, tingkat pendidikan yang paling banyak adalah D3 dengan jumlah 38 orang perempuan. Tenaga Non PNS yang paling banyak mendominasi tingkat pendidikannya adalah D3 sebanyak 149 orang perempuan.

Selain itu dapat juga dinyatakan dominasi kedua yang paling banyak pendidikannya adalah S1 dengan rincian yaitu PNS berjenis kelamin laki-laki sebanyak 13 orang dan 12 orang berjenis kelamin perempuan, CPNS sebanyak 10 orang berjenis kelamin perempuan, non PNS sebanyak 15 orang berpendidikan S1 berjenis kelamin laki-laki dan 28 orang perempuan serta paruh waktu sebanyak 2 orang laki-laki.

Sedangkan dominasi ketiga jumlah pendidikan yang banyak adalah SMA sederajat dengan rincian yaitu PNS sebanyak 4 orang berjenis kelamin laki-laki dan 2 orang berjenis perempuan dan Non PNS sebanyak 42 orang laki-laki dan 28 orang berjenis kelamin perempuan.

Dominasi pendidikan keempat yaitu S2 dengan rincian PNS sebanyak 11 orang berjenis kelamin laki-laki dan 10 orang berjenis perempuan, CPNS 5 orang berjenis kelamin laki-laki dan 1 orang berjenis perempuan, Non PNS sebanyak 4 orang laki-laki dan 3 orang perempuan dan paruh waktu 1 orang perempuan. Untuk pendidikan lainnya yaitu D4 berjumlah 6 orang jenis kelamin perempuan untuk PNS, CPNS berjumlah 2 orang berjenis kelamin perempuan dan Non PNS berjumlah 1 berjenis laki-laki. Sedangkan SMP berjumlah 3 orang berjenis kelamin laki-laki.

Jadi dapat disimpulkan bahwa tenaga dengan pendidikan D3 mendominasi di lingkungan RSUD Bagas Waras sejumlah 263 orang dengan pegawai berjenis kelamin perempuan sebanyak 208 orang dari total pegawai berpendidikan D3 yang ada di RSUD Bagas Waras Kabupaten Klaten. Sumber Daya Manusia (SDM) yang dimiliki RSUD Bagas Waras Kabupaten Klaten berdasarkan golongan adalah sebagai berikut :

Tabel 2.4
Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan
Di RSUD Bagas Waras Kabupaten Klaten Tahun 2021

No	Golongan	L	P	Jumlah
1	Golongan II	8	40	48
2	Golongan III	37	54	91
3	Golongan IV	7	9	16
Jumlah		52	103	155

Sumber : Kasubbag Umum dan Kepegawaian RSUD Bagas Waras, 2021

Dari Tabel 2.4 di atas dapat disimpulkan bahwa PNS berdasarkan golongan di RSUD Bagas Waras Kabupaten Klaten Tahun 2021 didominasi golongan III dengan jumlah 91 orang terdiri dari 54 orang berjenis kelamin perempuan dan laki-laki berjumlah 37 orang.

2.2.2 Sarana dan Prasarana (Asset) Dinas Kesehatan Kabupaten Klaten

Dinas Kesehatan Kabupaten Klaten dan RSUD Bagas Waras Kabupaten Klaten dilengkapi dengan berbagai fasilitas berupa tanah, gedung, serta berbagai peralatan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan pelayanan di bidang kesehatan dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 2.5
Jumlah Sarana dan Prasarana Berdasarkan Kondisi
di Dinas Kesehatan Kabupaten Klaten

No	Jenis Sarana dan Prasarana	Satuan	Kondisi		Jumlah
			Baik	Rusak	
1	Gedung Kantor Dinas	Unit	2		2
2	Gedung Puskesmas	Unit	34		34
3	Gedung Labkesda	Unit	1		1
4	Gedung Instalasi Farmasi	Unit	1		1
5	Mobil Ambulance Matur Dokter	Unit	27		27
6	Mobil Ambulance APV	Unit	4		4
7	Mobil Ambulance Suzuki/carry	Unit	1		1
8	Mobil Dinas Suzuki/Ertiga	Unit	1		1
9	Mobil Dinas Toyota/Avanza	Unit	2		2
10	Mobil Jenazah	Unit	1	2	3
11	Mobil PCR	Unit	1		1
12	Mobil Suzuki APV	Unit	1		1
13	Mobil Suzuki Carry	Unit	1		1
14	Mobil Promosi Kesehatan	Unit	1		1
15	Laptop	Unit	31	3	34
16	Komputer	Unit	31	12	43
17	Printer	Unit	24	12	36
18	Proyektor	Unit	9	5	14
19	Kendaraan Bermotor Roda Dua	Unit	21		21
20	Kendaraan Bermotor Roda Tiga	Unit	5		5

No	Jenis Sarana dan Prasarana	Satuan	Kondisi		Jumlah
			Baik	Rusak	
21	Mesin Finger Print	Unit	5		5
22	Video Conference Cam Set	Paket	1		1
23	Genset	Unit	1		1
24	Aset Lainnya	Tercatat dalam Kartu Inventaris Barang			

Sumber : Kasubbag Umum dan Kepegawaian Dinas Kesehatan, 2021

TABEL 2.6
Jumlah Sarana Dan Prasarana Berdasarkan Kondisi
Di RSUD Bagas Waras Kabupaten Klaten Tahun 2021

No	Jenis Sarana dan Prasarana	Satuan	Kondisi		Jumlah
			Baik	Rusak	
1	Tanah	m ²	61.508	-	61.508
2	Peralatan dan Mesin				
	Alat-alat besar	Unit	2	-	2
	Alat-alat Angkutan	Unit	69	6	63
	Alat-alat bengkel dan alat ukur	Unit	13	4	9
	Alat-alat pertanian/peternakan	Unit	2	-	2
	Alat-alat kantor dan rumah tangga	Unit	2.133	43	2.090
	Alat-alat studio dan komunikasi	Unit	26	-	26
	Alat-alat kedokteran	Unit	1.749	67	1.682
	Alat-alat laboratorium	Unit	96	-	96
	Alat-alat keamanan	unit	35	-	35
3	Gedung dan Bangunan				
	Bangunan gedung kantor lain-lain		1	-	1
	Bangunan gedung tempat ibadah permanen		2	-	2
	Bangunan kandang hewan/ternak permanen		1	-	1
	Bangunan kesehatan lain-lain		1	-	1
	Bagunan Rumah Sakit Umum		3	-	3
	Bangunan tempat kerja lain-lain		5	-	5
	Gedung garasi/pool permanen		2	-	2

No	Jenis Sarana dan Prasarana	Satuan	Kondisi		Jumlah
			Baik	Rusak	
	Gedung pertokoan/koperasi pasar permanen		1	-	1
	Gedung Pos Jaga Permanen		1	-	1
	Konstruksi Pagar		1	-	1
	Pintu Pagar		3	-	3
	Timbal		1	-	1
4	Jalan, jaringan dan irigasi				
	Sumur Artesis		1	-	1
	Bangunan Menara/Bak penampung/Reservok Air Umum		1	-	1
	Bangunan Pembuangan air kotor lain-lain		1	-	1
	Jalan Lingkungan/Halaman		2	-	2
	Instalasi Penangkal Petir manual		1	-	1
	Bangunan kamar mandi		1	-	1
5	Aset tetap lainnya (Buku)		100	-	100
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan		1	-	1

Sumber : Kasubbag Umum dan Kepegawaian RSUD Bagas Waras, 2021

Tabel 2.5 dan Tabel 2.6 di atas dapat menjadi gambaran kondisi sarana dan prasarana Dinas Kesehatan Kabupaten Klaten dan RSUD Bagas Waras Kabupaten Klaten. Di dalam Tabel 2.5 disebutkan bahwa sarana dan prasarana utama di Dinas Kesehatan berupa gedung kantor Dinas Kesehatan, gedung Laboratorium Kesehatan, gedung Instalasi Farmasi Kabupaten, 34 gedung Puskesmas, kendaraan bermotor roda dua, roda tiga, maupun roda empat serta sarana prasarana lain yang sangat diperlukan untuk pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan di bidang kesehatan dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

Di dalam Tabel 2.6 digambarkan bahwa RSUD Bagas Waras Kabupaten Klaten berdiri di atas tanah seluas 61.508 m² dengan dibantu alat-alat kantor dan rumah tangga sejumlah 2.090 unit dari 2.133 unit yang ada dan alat-alat kedokteran dalam kondisi baik 1.682 unit dari 1.749 unit. Selain itu dinyatakan bahwa prosentase alat-alat kantor dan rumah tangga

dalam kondisi baik 97,98 % dengan kerusakan 2,02 % dan prosentase alat-alat kedokteran dalam kondisi baik 96,17 % dengan kerusakan 3,83 %.

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

1) Kinerja Dinas Kesehatan Berdasar Target Indikator Renstra 2016-2021

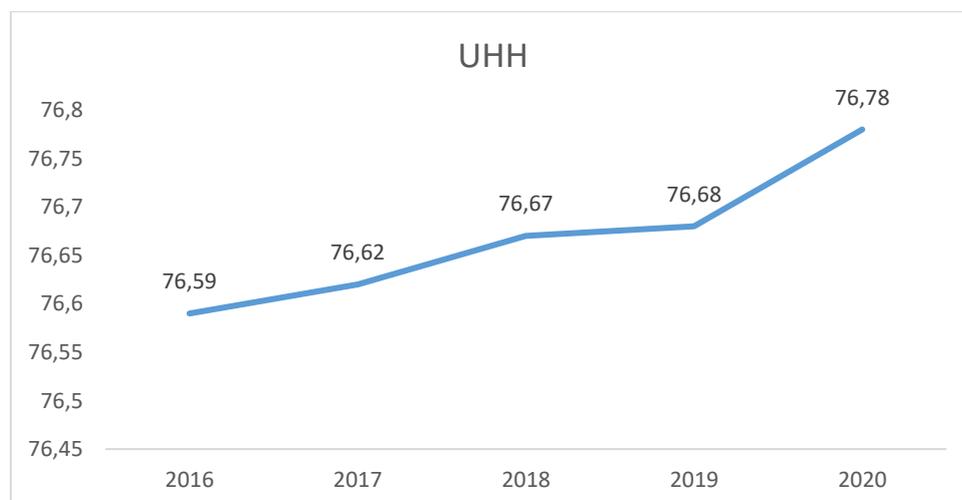
Kinerja Dinas Kesehatan dapat dilihat melalui capaian beberapa indikator yang sudah ditetapkan di Renstra Dinas Kesehatan periode sebelumnya. Capaian kinerja terkait urusan kesehatan yang perlu mendapat perhatian untuk ditindaklanjuti dalam rencana program dan kegiatan adalah sebagai berikut :

a. Usia Harapan Hidup (UHH)

Indikator Usia Harapan Hidup merupakan indikator yang mewakili dimensi umur panjang dan hidup sehat dalam penghitungan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Usia Harapan Hidup merupakan indikator yang mencerminkan derajat kesehatan masyarakat pada suatu wilayah, baik dari sarana prasarana, akses, maupun kualitas kesehatan. Secara tidak langsung, peningkatan Usia Harapan Hidup menunjukkan derajat kesehatan masyarakat semakin baik dalam semua aspek kesehatan. UHH Kabupaten Klaten dari tahun 2016 hingga tahun 2020 terus mengalami perkembangan, yaitu 76,59 tahun pada tahun 2016 menjadi 76,78 tahun pada tahun 2020. Perkembangan UHH di Kabupaten Klaten Tahun 2016-2020 disajikan pada grafik berikut :

Grafik 2.1

Usia Harapan Hidup Kabupaten Klaten Tahun 2016-2020



Sumber : BPS Kabupaten Klaten, 2021

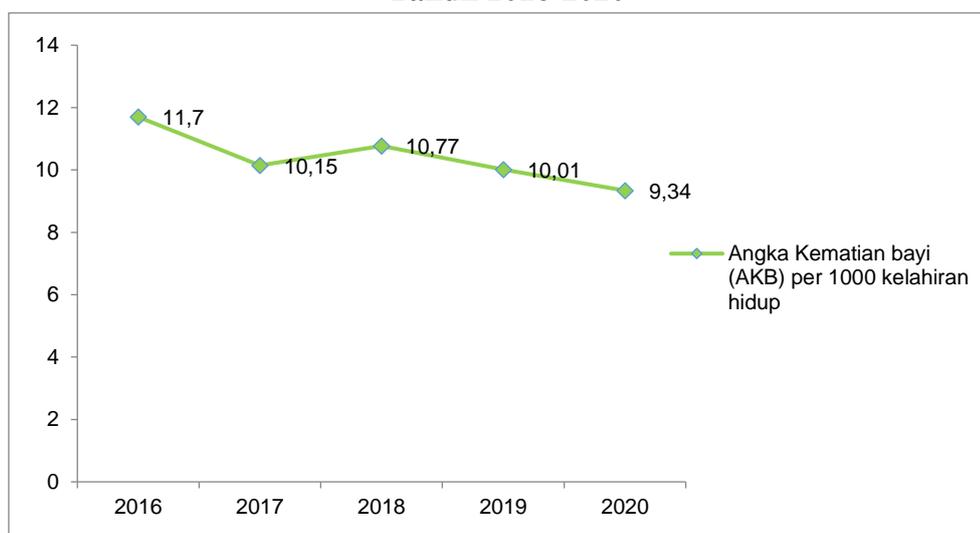
b. Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup

Angka Kematian Bayi (*Infant Mortality Rate*) adalah banyaknya bayi yang meninggal sebelum mencapai usia 1 tahun yang dinyatakan dalam 1.000 kelahiran hidup dalam tahun yang sama. AKB merupakan salah satu indikator penting dalam menentukan derajat kesehatan masyarakat dan untuk mengetahui kualitas pelayanan kesehatan. Hal tersebut dikarenakan usia bayi merupakan kondisi yang rentan baik terhadap kesakitan maupun kematian.

Angka kematian bayi menggambarkan tingkat permasalahan kesehatan masyarakat yang berkaitan dengan faktor penyebab kematian bayi, tingkat pelayanan antenatal, status gizi ibu hamil, tingkat keberhasilan program KIA dan KB serta kondisi lingkungan sosial ekonomi.

Perkembangan Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 kelahiran hidup di Kabupaten Klaten Tahun 2016-2020 mengalami fluktuasi, yaitu 11,7 per 1.000 KH pada tahun 2016 menjadi 9,34 per 1.000 KH pada tahun 2020. Kondisi AKB per 1.000 kelahiran hidup di Kabupaten Klaten apabila dibandingkan dengan target nasional, telah melampaui target yang ditentukan yaitu 23 per 1.000 KH. Meskipun demikian, angka ini masih tergolong cukup tinggi. Upaya penurunan AKB dimasa pandemi COVID-19 terus dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Klaten dengan cara mengoptimalkan bidan desa untuk tetap melakukan kunjungan neonatus (bayi), menerapkan perilaku hidup sehat, imunisasi untuk upaya pencegahan, pengentasan kemiskinan, dan akses layanan kesehatan dasar yang mudah dan murah. Penyebab terbesar kematian bayi baru lahir adalah asfiksia, prematur dan sepsis. Perkembangan Angka Kematian Bayi di kabupaten klaten dapat dilihat pada gambar dibawah ini :

Grafik 2.2
Perkembangan Angka Kematian Bayi Kabupaten Klaten
Tahun 2016-2020



Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Klaten, 2021

c. Angka Kematian Balita dan Anak Balita per 1000 kelahiran hidup

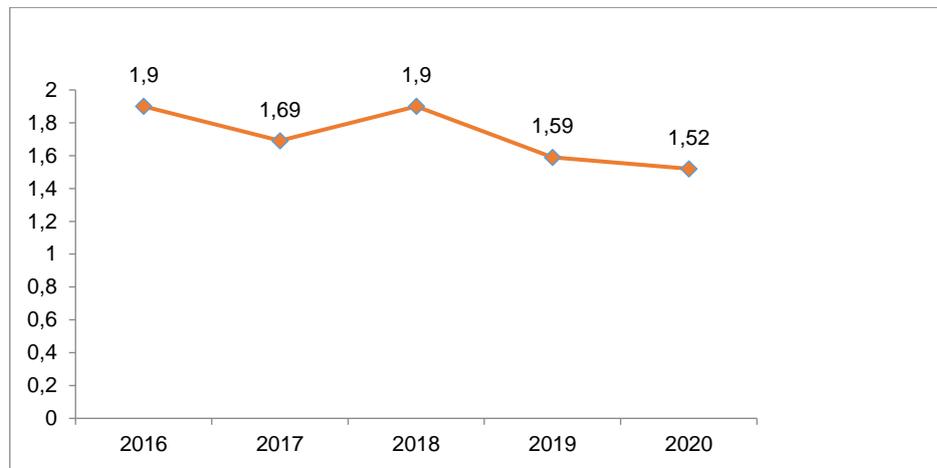
Angka Kematian Anak Balita adalah jumlah kematian anak usia 12–59 bulan yang dinyatakan per 1.000 Kelahiran Hidup. Sedangkan Angka Kematian Balita adalah jumlah anak berumur < 5 Tahun (0–59 bulan) yang dinyatakan per 1.000 Kelahiran hidup. Angka ini merepresentasikan resiko terjadinya kematian pada fase antara kelahiran hingga sebelum anak berusia 5 tahun. Angka Kematian Anak Balita Kabupaten Klaten mengalami penurunan cukup signifikan dari 1,90 per 1.000 KH di tahun 2016 menjadi 1,52 per 1.000 KH di tahun 2020. Di masa pandemi, pemantauan pertumbuhan dan perkembangan balita masih berjalan walaupun tidak optimal. Kematian balita tetap terjadi akibat adanya penyakit penyerta seperti kelainan jantung, dll. Berbagai upaya sudah dilakukan untuk penurunan Angka Kematian Anak Balita tahun 2020 yaitu :

- a. memperbaiki perilaku hidup bersih dan sehat di lingkungan keluarga dan masyarakat
- b. peningkatan akses pelayanan kesehatan bagi balita
- c. memperkuat mutu manajemen terpadu penyakit bayi dan balita
- d. memperbaiki kesehatan lingkungan termasuk air bersih dan sanitasi.

- e. pengendalian penyakit menular
- f. pemenuhan gizi yang cukup
- g. adanya dukungan dari berbagai sektor dalam mendukung upaya pencapaian derajat kesehatan balita.

Perkembangan Angka Kematian Anak Balita di Kabupaten Klaten Tahun 2016-2020 dapat dilihat pada gambar dibawah ini :

Grafik 2.3
Perkembangan Angka Kematian Balita Kabupaten Klaten
Tahun 2016-2020



Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Klaten, 2021

d. Kasus Kematian Ibu

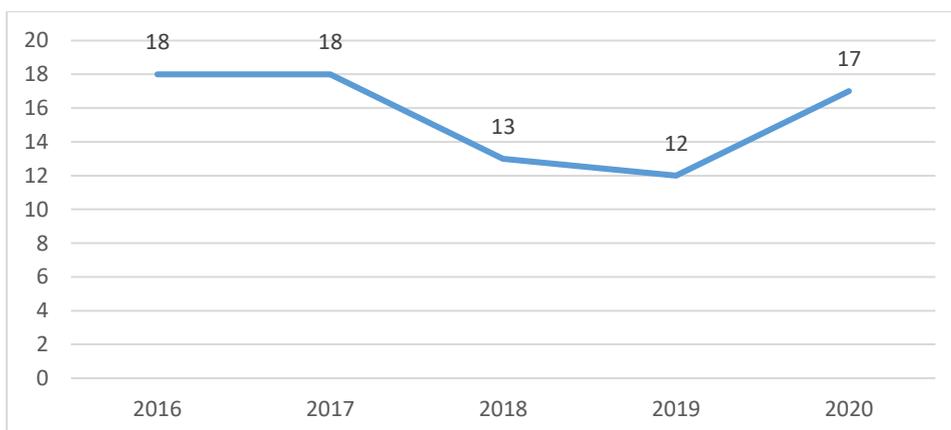
Kematian Ibu adalah banyaknya wanita yang meninggal dari suatu penyebab kematian terkait dengan gangguan kehamilan atau penanganannya (tidak termasuk kecelakaan atau kasus insidental) selama kehamilan, melahirkan, dan masa nifas (42 hari setelah melahirkan) tanpa memperhitungkan lama kehamilan. Di Kabupaten Klaten, indikator kematian ibu yang lebih tepat digunakan adalah jumlah dan belum menggunakan angka, serta tidak menggunakan denominatir 100.000 kelahiran hidup. Hal ini dikarenakan jumlah kelahiran hidup di Kabupaten Klaten belum mencapai 100.000 kelahiran.

Kasus Kematian Ibu menggambarkan permasalahan status ibu hamil, ibu melahirkan dan ibu nifas. Kasus kematian ibu di Kabupaten Klaten Tahun 2016-2020 semakin menurun kasusnya, namun pada tahun 2020 ini meningkat

kembali dengan adanya 17 kasus. Menurunnya kasus di tahun 2016-2019 tersebut tak lepas dari upaya pemerintah Kabupaten Klaten dengan melakukan langkah-langkah seperti melengkapi sarana dan prasarana yang ada di fasilitas kesehatan dasar dan rujukan, meningkatkan pemahaman masyarakat tentang kehamilan, memberikan jaminan kesehatan khusus untuk ibu hamil. Meningkatnya kasus kematian ibu di tahun 2020 akibat pandemik COVID-19 yang menyebabkan beberapa ibu hamil yang akan menjalani persalinan takut ke fasilitas pelayanan kesehatan, sudah adanya faktor resiko sebelum hamil di masa pandemi dan mempunyai komorbid (penyakit penyerta) dan kurang optimalnya pemeriksaan kehamilan terpadu (ANC Terpadu) yang hanya lewat telepon dan tidak seperti jika bisa memeriksa langsung ke fasilitas pelayanan kesehatan. Berikut perkembangan kasus Kematian Ibu per 100.000 kelahiran hidup di Kabupaten Klaten Tahun 2016-2020.

Grafik 2.4

Kasus Kematian Ibu di Kabupaten Klaten Tahun 2016-2020

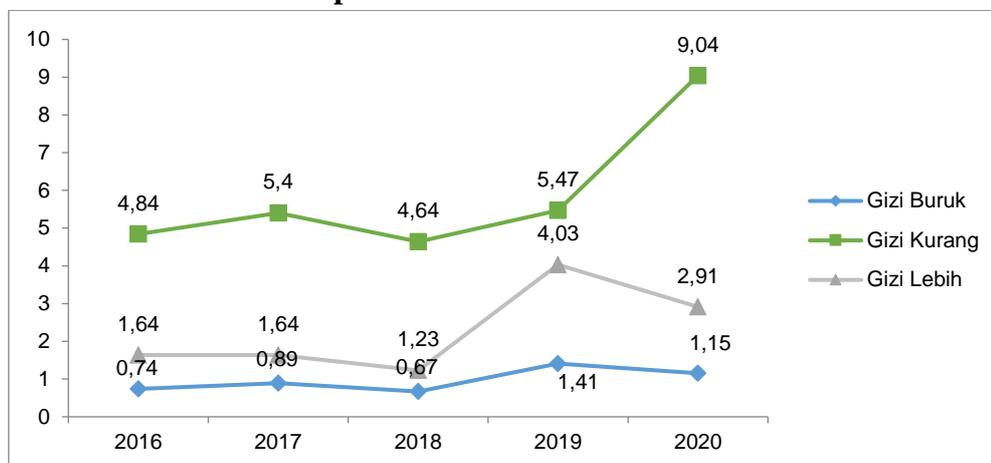


Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Klaten, 2021

e. Persentase Balita Gizi Buruk dan Prevalensi Balita Gizi Kurang

Penyebab balita mengalami gizi buruk dikarenakan beberapa hal seperti asupan makan yang kurang, pola jajanan makanan yang tidak memenuhi zat gizi, pola asuh orang tua yang tidak telaten memenuhi kebutuhan zat gizi anak asuhannya. Kasus *underweight* (gizi buruk dan gizi kurang) dengan indikator berat badan menurut umur di Kabupaten Klaten selama Tahun 2016-2020 dari hasil pengukuran serentak dapat disajikan pada gambar berikut :

Grafik 2.5
Perkembangan Persentase Gizi Buruk dan Prevalensi Gizi Kurang
Kabupaten Klaten Tahun 2016-2020



Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Klaten, 2021

Berdasarkan grafik di atas dapat dilihat bahwa perkembangan jumlah balita gizi buruk selama tahun 2016-2020 mengalami fluktuasi naik turun. Beberapa wilayah yang perlu mendapat perhatian terkait kasus gizi buruk murni tanpa penyakit penyerta diantaranya Kecamatan Delanggu, Jogonalan, Trucuk, Wonosari, Kalikotes, Prambanan, Jatinom, Gantiwarno, dan Cawas. Kasus gizi kurang meningkat di tahun 2020 sebagai dampak pandemi, banyak balita yang tidak dipantau pertumbuhannya karena ada pembatasan social sehingga posyandu tidak beroperasi serta orang tua yang berkurang pendapatannya akibat pandemi juga berdampak pada berkurangnya akses untuk mendapatkan makanan yang bergizi.

f. Cakupan Desa Siaga Aktif

Cakupan desa siaga aktif di Kabupaten Klaten tahun 2016-2020 sudah 100%. Hal ini menunjukkan bahwa pelayanan kesehatan kepada pelayanan dasar kepada masyarakat sudah lebih baik. Data cakupan desa siaga aktif bisa dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.7

Cakupan Desa Siaga Aktif Kabupaten Klaten Tahun 2016-2020

Tahun	Jumlah Desa/Kelurahan	Jumlah Desa Siaga Aktif	Cakupan
2016	401	401	100 %
2017	401	401	100 %
2018	401	401	100 %
2019	401	401	100 %
2020	401	401	100 %

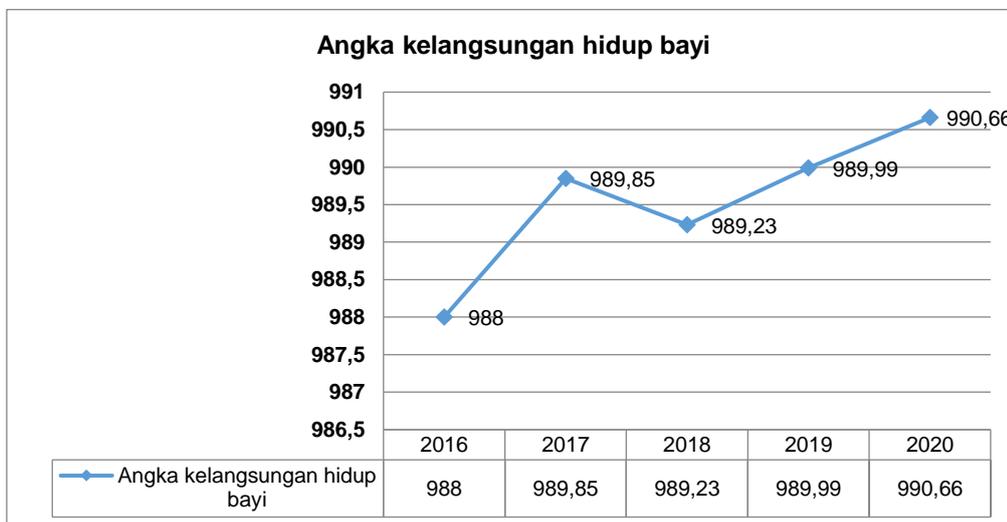
Sumber: Dinas Kesehatan Kab. Klaten, 2021

g. Angka Kelangsungan Hidup Bayi

Angka Kelangsungan Hidup Bayi (AKHB) adalah tingkat kemungkinan (probabilitas) bayi hidup sampai dengan usia 1 tahun. Berikut perkembangan Angka Kelangsungan Hidup Bayi di Kabupaten Klaten Tahun 2016-2020 :

Grafik 2.6

Perkembangan Angka Kelangsungan Hidup Bayi Kabupaten Klaten Tahun 2016-2020



Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Klaten, 2021

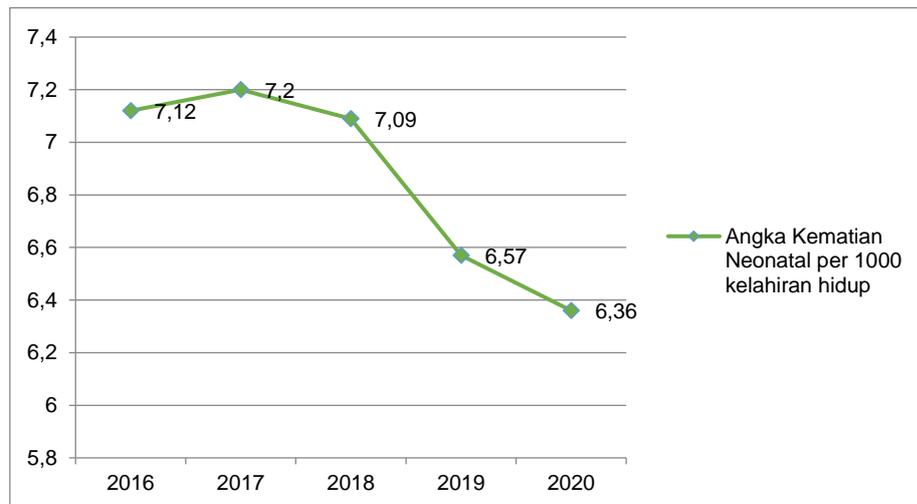
Berdasarkan data tersebut di atas, Angka Kelangsungan Hidup Bayi Kabupaten Klaten Tahun 2016-2020 semakin meningkat kecuali di Tahun 2018. Angka Kelangsungan Hidup Bayi pada Tahun 2020 meningkat dari

Tahun 2019 disebabkan karena menurunnya angka kematian bayi. Untuk mempertahankan angka tersebut atau meningkatkan angka tersebut, disarankan bagi seorang ibu untuk memeriksakan kehamilan secara rutin, mengkonsumsi gizi secara seimbang, dan bersalin ditolong oleh tenaga kesehatan dan di fasilitas pelayanan kesehatan.

h. Angka Kematian Neonatal per 1000 Kelahiran Hidup

Angka kematian neonatal adalah jumlah kematian neonatal per 1.000 kelahiran hidup. Kematian neonatal (bayi umur 0–28 hari) merupakan 2/3 dari kematian bayi. Kematian neonatal dini/perinatal (bayi umur 0–7 hari) merupakan 2/3 dari kematian neonatal. Berikut perkembangan Angka Kematian Neonatal per 1000 kelahiran hidup di Kabupaten Klaten Tahun 2016-2020 :

Grafik 2.7
Perkembangan Angka Kematian Neonatal Kabupaten Klaten
Tahun 2016-2020



Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Klaten, 2021

Berdasarkan data pada grafik tersebut di atas, Angka Kematian Neonatal per 1000 kelahiran hidup Kabupaten Klaten Tahun 2016-2020 semakin menurun kecuali di tahun 2017. Angka tersebut dapat menurun karena sudah dilakukan beberapa upaya antara lain :

- Melakukan revitalisasi Posyandu.

- Menguatkan kelembagaan Pokjanal Posyandu.
- Meningkatkan transformasi KMS ke dalam Buku KIA.
- Menguatkan kader Posyandu.
- Kunjungan Neonatus
- Pemantauan di Posyandu.

i. Cakupan Kebidanan

Perkembangan cakupan kebidanan di Kabupaten Klaten Tahun 2016-2020 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.8
Perkembangan Cakupan Kebidanan Kabupaten Klaten
Tahun 2016-2020

Indikator	Tahun					Satuan
	2016	2017	2018	2019	2020	
Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani	97,88	101,58	89,01	83,28	84,40	%
Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan	100	100	99,98	99,99	99,99	%

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Klaten, 2021

Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani di tahun 2020 meningkat dikarenakan banyaknya penemuan kasus komplikasi pada ibu hamil, sedangkan cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan di Kabupaten Klaten bersifat fluktuatif. Hal ini menunjukkan masih adanya persalinan yang belum ditolong oleh tenaga kesehatan.

j. Cakupan Penanganan Gizi

Cakupan desa/kelurahan universal child immunization dan cakupan penanganan balita gizi buruk di Kabupaten Klaten periode tahun 2016-2020

adalah 100%. Berikut perkembangan cakupan penanganan gizi di Kabupaten Klaten Tahun 2016 - 2020 :

Tabel 2.9
Perkembangan Cakupan Penanganan Gizi Kabupaten Klaten
Tahun 2016-2020

Indikator	Tahun					Satuan
	2016	2017	2018	2019	2020	
Cakupan Desa/kelurahan <i>Universal Child Immunization (UCI)</i>	100	100	100	100	100	%
Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan	100	100	100	100	100	%

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Klaten, 2021

k. Cakupan Penanganan Penyakit yang Diderita Penduduk

Berdasarkan data yang ada, semua indikator terkait cakupan penanganan penyakit yang diderita penduduk di Kabupaten Klaten semakin menurun. selengkapnya dapat dilihat pada perkembangan cakupan penanganan penyakit yang diderita penduduk di Kabupaten Klaten Tahun 2016-2020 yang terdiri dari:

Tabel 2.10
Perkembangan Cakupan Penanganan Penyakit yang Diderita
Penduduk Kabupaten Klaten Tahun 2016-2020

Indikator	Tahun					Satuan
	2016	2017	2018	2019	2020	
Persentase anak usia 1 tahun yang diimunisasi campak/MR	99,6	99,5	101,3	99,8	88,4	%
Non Polio AFP rate per 100.000 penduduk	140	160	120	320	83,33	%
Cakupan balita pneumonia yang ditangani	83,3	72,6	54,1	47,0	29,33	%
Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA	51,0	45,9	41,0	36,5	29,98	%

Indikator	Tahun					Satuan
	2016	2017	2018	2019	2020	
Tingkat prevalensi Tuberkulosis (per 100.000 penduduk)	72,3	128,4	169,6	109,7	46,04	Per 100.000 penduduk
Tingkat kematian karena Tuberkulosis (per 100.000 penduduk)	1,1	1,5	1,9	6,7	1,96	Per 100.000 penduduk
Proporsi jumlah kasus Tuberkulosis yang terdeteksi dalam program DOTS	51,0	45,9	41,0	36,5	31,44	%
Proporsi kasus Tuberkulosis yang diobati dan sembuh dalam program DOTS	74,8	66,7	72,7	74,7	71,63	%
Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD	100	100	100	100	100	%
Penderita diare yang ditangani	7,4	13,2	11,6	9,8	6	%
Angka kejadian Malaria	0,5	0,7	0,8	0,4	0,77	Per 100.000 penduduk
Prevalensi HIV/AIDS (persen) dari total populasi	0,011	0,012	0,011	0,012	0,011	%

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Klaten, 2021

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa terjadi penurunan cakupan penanganan penyakit yang diderita penduduk, dikarenakan di masa pandemi covid-19, kegiatan penanganan penyakit selain covid agak dikesampingkan. Permasalahan yang muncul dari cakupan penanganan penyakit di Kabupaten Klaten adalah perlu upaya peningkatan penanganan penyakit menular maupun tidak menular.

1. Cakupan Pelayanan Kesehatan Penduduk

Pada tahun 2020, adanya pandemic covid 19 mengakibatkan pelayanan kesehatan terganggu karena sebagian besar pelayanan dan termasuk anggaran difokuskan untuk pencegahan dan penanganan covid 19. Dari beberapa indikator yang ada pada cakupan pelayanan kesehatan penduduk di Tahun 2020 hampir semua mengalami penurunan. Sehingga untuk kedepan diperlukan peningkatan pelayanan kesehatan yang tidak hanya difokuskan untuk covid 19, tetapi juga perlu upaya peningkatan pelayanan kesehatan terutama kesehatan ibu hamil, bayi, balita dan peningkatan fasilitas kesehatan. Masyarakat juga perlu diberi edukasi tentang kesehatan masyarakat supaya dapat melakukan tindakan pencegahan dan pengobatan ke fasilitas pelayanan kesehatan.

Tabel 2.11
Perkembangan Cakupan Pelayanan Kesehatan Penduduk Kabupaten Klaten Tahun 2016-2020

Indikator	Tahun					Satuan
	2016	2017	2018	2019	2020	
Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin	9,10	8,49	9,67	11	9,09	%
Cakupan kunjungan bayi	96,04	99,67	98,36	98,07	96,89	%
Cakupan puskesmas	130	130	130	130	130	%
Cakupan pembantu puskesmas	20,9	20,9	20,9	20,9	20,9	%
Cakupan kunjungan Ibu hamil K4	92,84	92,85	92,51	93,27	93,33	%
Cakupan pelayanan nifas	96,98	97,2	97,54	97,55	96,92	%
Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani	54,92	57,05	53,47	56,03	55,63	%
Cakupan pelayanan anak balita	94	95,25	96,17	95,77	92,71	%

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Klaten, 2021

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa terjadi penurunan cakupan pelayanan kesehatan penduduk pada tahun 2020 dibandingkan dengan tahun 2019. Hal ini disebabkan dengan adanya pandemi covid 19, kunjungan pasien

ke puskesmas menurun sehingga rujukan pasien masyarakat miskin juga menurun. Cakupan kunjungan bayi juga menurun dikarenakan dampak pandemic Covid-19 menyebabkan pelayanan pertumbuhan dan perkembangan tidak optimal, ketakutan masyarakat datang ke fasyankes, tidak semua balita bisa di kunjungi bidan desa karena pandemi dan tugas bidan desa terfokus permasalahan covid-19, mengakibatkan masih adanya kematian bayi.

Cakupan kunjungan Ibu hamil K4 pada tahun 2020 mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya, hal ini dikarenakan meskipun masa pandemi Covid-19 pelayanan dan pemantauan ibu hamil tetap bisa dilakukan melalui pemeriksaan kehamilan terpadu (ANC Terpadu) lewat telepon sedangkan untuk cakupan pelayanan nifas tahun 2020 menurun dari tahun sebelumnya dikarenakan adanya kematian ibu pada masa nifas, pelayanan tidak bisa optimal karena pandemi dan beban ganda bidan desa.

Cakupan pelayanan anak balita pada grafik di atas terlihat menurun dikarenakan adanya pandemi membuat pelayanan pertumbuhan dan perkembangan tidak optimal, ketakutan masyarakat datang ke fasyankes, tidak semua balita bisa di kunjungi bidan desa karena pandemi dan tugas bidan desa terfokus permasalahan covid-19.

2) Kinerja Pelayanan Dinas Kesehatan Berdasar Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan, urusan kesehatan merupakan urusan wajib pelayanan dasar yang memiliki 12 indikator SPM yang harus dipenuhi. Berikut capaian SPM urusan kesehatan Kabupaten Klaten tahun 2016-2020.

Tabel 2.12
Capaian Standar Pelayanan Minimal Kesehatan
Kabupaten Klaten Tahun 2016-2020

No	Indikator	Sat	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Persentase Ibu Hamil yang	%	92,84	92,85	92,51	93,27	93,44

No	Indikator	Sat	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
	mendapatkan layanan kesehatan ibu hamil						
2	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	%	100	100	99,98	99,99	99,99
3	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	%	97,59	97,57	98,05	97,79	96,70
4	Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	%	94	95,25	96,17	95,77	92,71
5	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	100	100	100	100	31,13
6	Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	%	NA	32	49	89	73,26
7	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	%	67,33	85,9	80,51	91,22	73,14
8	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	60	63	68	49	32,38
9	Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan	%	30	37	51	100	90,76

No	Indikator	Sat	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
	kesehatan sesuai standar						
10	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	%	70	81	98,24	93,14	88,32
11	Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	%	NA	99,65	98,92	49,22	29,28
12	Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	%	NA	64,81	81,72	90,45	84,08

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Klaten, 2021

Kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Klaten selama kurun waktu tahun 2016-2020 disajikan dalam Tabel 2.13 dibawah ini :

Tabel 2.13 Pencapaian Kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Klaten Pelayanan Tahun 2016-2021

No	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun Ke-						Realisasi Capaian Kinerja Pada Tahun Ke-						Persentase Capaian Pada Tahun Ke- (%)						
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021*	2016	2017	2018	2019	2020	2021*	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		15	16	17	18	19		
1	Persentase pelayanan administrasi perkantoran	%	92,52	94,62	100	100	100	100	92,52	94,62	100	100	100	50	100	100	100	100	100	100	50
2	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang meningkat umur ekonomisnya	%	97,66	94,76	100	100	100	100	97,66	94,76	100	100	100	50	100	100	100	100	100	100	50
3	Persentase aparatur yang berkualitas	%	99,86	99,86	100	100	100	100	99,86	99,86	100	100	100	50	100	100	100	100	100	100	50
4	Persentase Peningkatan kualitas dokumen pelaporan	%	100	98,57	100	100	100	100	100	98,57	100	100	100	50	100	100	100	100	100	100	50
5	Cakupan pelayanan ibu hamil (K4)	%	92,84	92,85	97	98	99	100	92,84	92,85	92,51	93,27	93,44	42,33	100	100	95	95	94	42,33	
6	Cakupan pelayanan ibu nifas (KF3)	%	96,98	97,2	98	99	100	100	96,98	97,2	97,54	97,55	96,92	38,5	100	100	100	99	97	38,5	

No	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun Ke-						Realisasi Capaian Kinerja Pada Tahun Ke-						Persentase Capaian Pada Tahun Ke- (%)					
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021 *	2016	2017	2018	2019	2020	2021 *
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		15	16	17	18	19	
7	Cakupan pelayanan kesehatan bayi baru lahir (KN3)	%	97,59	97,57	98	99	100	100	97,59	97,57	98,05	97,79	96,7	43,54	100	100	100	99	97	43,54
8	Cakupan pelayanan kesehatan balita	%	94	95,25	96	97	98	99	94	95,25	96,17	95,77	92,71	45,33	100	100	100	99	95	45,79
9	Cakupan skrining kesehatan pada anak pendidikan dasar (penjaringan kesehatan)	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	0	4,16	100	100	100	100	0	4,16
10	Cakupan kunjungan bayi	%	96,04	99,67	99,2	99,4	99,6	100	96,04	99,67	98,36	98,07	96,03	45,73	100	100	99	99	96	45,73
11	Cakupan BBLR	%	5,25	5,14	5,10	5,06	5,02	5,00	5,25	5,14	5,34	5,55	5,91	6,56	100	100	95,29	90,32	82,27	86,6
12	Cakupan anemia wanita usia subur	%	-	-	35	33	30	28	-	-	24,5	-	-	-	-	-	130	-	-	-
13	Cakupan skrining kesehatan sesuai standar pada usia produktif (15-59) thn	%	20	30	50	70	90	100	20	30	49	89	72,54	37	100	100	98	127	81	37

No	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun Ke-						Realisasi Capaian Kinerja Pada Tahun Ke-						Persentase Capaian Pada Tahun Ke- (%)					
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021*	2016	2017	2018	2019	2020	2021*
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		15	16	17	18	19	
14	Cakupan skrining kesehatan sesuai standar pada lansia (>= 60 th)	%	10	30	70	90	100	100	10	85,9	80,51	91,22	73,14	42,81	100	286	115	101	73	42,81
15	Cakupan pelayanan kesehatan orang dengan TBC	%	81,88	99,65	100	100	100	100	81,88	99,65	99	95,3	47,86	3,23	100	100	99	95	48	3,23
16	Cakupan pelayanan kesehatan penderita hipertensi	%	60	70	80	90	100	100	60	63	68	49,4	26,51	21	100	90	85	55	27	21
17	Cakupan pelayanan kesehatan penderita Diabetes Mellitus	%	30	40	50	70	90	100	30	37	51	126	74,35	58	100	93	102	180	83	58
18	Cakupan pelayanan kesehatan penderita Gangguan Jiwa Berat	%	70	80	90	100	100	100	70	81	98,24	89	85,86	51,62	100%	101%	109%	89%	86%	51,62

No	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun Ke-						Realisasi Capaian Kinerja Pada Tahun Ke-						Persentase Capaian Pada Tahun Ke- (%)					
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021*	2016	2017	2018	2019	2020	2021*
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		15	16	17	18	19	
19	Cakupan pelayanan skrining kesehatan orang dengan resiko terinfeksi HIV	%	27,48	64,81	75	80	90	100	27,48	64,81	82,24	90	80,8	52,68	100	100	110	113	90	52,68
20	Non Polio AFP Rate 2/100.000 Anak Usia <15 tahun	%	100	100	100	100	100	100	100	100	120	320	83,33	-	100	100	120	320	83	-
21	Verifikasi sinyal KLB > 75 Alert	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	-	100	100	100	100	100	-
22	Discharged Campak > 2/100.000 Penduduk	%	100	100	100	100	100	100	100	100	183,3	100	133,8	1,71	100	100	183	100	134	1,71
23	Proporsi KLB PD3I ditanggulangi < 24 jam	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
24	Respon PIE (Penyakit Infeksi Emerging) < 24 jam	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

No	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun Ke-						Realisasi Capaian Kinerja Pada Tahun Ke-						Persentase Capaian Pada Tahun Ke- (%)					
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021*	2016	2017	2018	2019	2020	2021*
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		15	16	17	18	19	
25	Persentase Kabupaten yang mencapai 80% IDL pada bayi	%	100	100	90	100	100	100	100	100	100	100	100	-	100	100	111	100	100	-
26	Persentase anak usia 0 - 11 bulan yang mendapat Imunisasi Dasar Lengkap	%	98,7	95,08	92,5	93	95	95	98,7	98,5	100,5	88,27	87,4	35,6	100	104	109	95	92	37,47
27	Cakupan Bias C/DT/TD	%	98,8	98,72	98	98	98	98	98	98	98	98	99,17	-	99	99	100	100	101	-
28	Cakupan obat generik berlogo dalam persediaan obat	%	96	97	98	99	100	100	96	97	95,99	99	98	100	100	100	98	100	98	100
29	Cakupan apotik, toko obat dan tempat penjualan makanan yang dilakukan pengawasan	%	50	50	55	58	100	100	100	100	100	100	89,85	50	200	200	182	172	90	50
30	Cakupan sekolah yang dilakukan pemeriksaan jajanan anak sekolah	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	0	-	100	100	100	100	0	-

No	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun Ke-						Realisasi Capaian Kinerja Pada Tahun Ke-						Persentase Capaian Pada Tahun Ke- (%)					
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021*	2016	2017	2018	2019	2020	2021*
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		15	16	17	18	19	
31	Cakupan desa siaga aktif	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
32	Kebijakan yang dibuat	Buah	4	4	5	7	9	11	4	7	11	9	13	13	100	175	220	129	144	144
33	Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)	%	75,2	75,4	75,5	75,7	80	80,2	92,82	88,7	89,7	80	96,26	96,26	123	118	119	106	120	120
34	Persentase desa yang memanfaatkan CSR untuk kesehatan	%	6	8	14	20	24	28	2	8	61,38	19	24	24	33	100	438	95	100	85,71
35	Proporsi posyandu mandiri	%	42	44	47	49	51	53	42	44	45,99	46	57,3	57,3	100	100	98	94	112	108
36	Persentase desa didampingi SMD MMD	%	80	100	100	100	100	100	80	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
37	Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
38	Cakupan bayi yang dapat ASI eksklusif	%	81,6	72	79	80	81	82	81,6	72	75,27	82,62	85	87,37	100	100	95	103	105	103

No	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun Ke-						Realisasi Capaian Kinerja Pada Tahun Ke-						Persentase Capaian Pada Tahun Ke- (%)					
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021*	2016	2017	2018	2019	2020	2021*
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		15	16	17	18	19	
39	Cakupan balita stunting	%	27,6	27,2	27,3	27	26,8	26,6	27,6	27,2	7,1	7	24,11	12,41	100	100	26	26	90	153
40	Cakupan balita wasting	%	10,9	10,5	10,8	10,5	10,2	10	5	10,5	10,9	3,48	10,42	6,82	46	100	101	33	102	131
41	Cakupan balita underweight	%	19,1	18	18,3	18,1	18	18	19,1	18	5,3	6,4	16,6	10,72	100	100	29	35	92	140
42	Cakupan balita gizi lebih (Obes)	%	1,38	1,13	2,8	2,5	2,3	2,0	1,38	1,13	2,22	4,03	7,37		100	100	79	161	320	
43	Partisipasi Posyandu (D/S)	%	81,4	81,6	85	85	85	85	81,4	81,6	82,35	82,41	122,13	59,6	100	100	97	97	144	70,12
44	Cakupan desa open defecation free (ODF)	%	19,95	32,92	100	100	100	100	19,95	32,92	79,55	100	100	100	100	100	80	100	100	100
45	Cakupan tablet tambah darah bagi remaja	%	-	26,342	25	30	40	50	-	26,34	94,05	97,8	52,31	-	#VALUE!	100	376	326	131	-
46	Persentase pengelolaan limbah medis dan non medis	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
47	Akreditasi Puskesmas & RSUD	%	20,59	47,06	32,35	20,59	47,06	32,35	20,59	47,06	100	20,59	100	100	100	100	309	100	212	212

No	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun Ke-						Realisasi Capaian Kinerja Pada Tahun Ke-						Persentase Capaian Pada Tahun Ke- (%)					
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021*	2016	2017	2018	2019	2020	2021*
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		15	16	17	18	19	
48	Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin	%	5	5	5	5	5	5	9	9,67	10	11,49	9,09	13,4	180	193	200	230	182	268
49	Rasio Puskesmas per satuan penduduk	/30.000 penduduk	0,29	0,29	0,29	0,29	0,29	0,29	0,29	0,29	0,29	0,29	0,29	0,29	100	100	100	100	100	100
50	Rasio Pustu per satuan penduduk	/10.000 penduduk	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	100	100	100	100	100	100
51	Ratio tempat tidur Rumah Sakit per satuan penduduk	/1.000 penduduk	1,34	1,38	1,38	1,38	1,38	1,38	1,34	1,38	1,38	1,64	1,78	1,80	100	100	100	119	129	130
52	Persentase dokumen perencanaan PD disusun tepat waktu	%	-	84,86	100	100	100	100	-	100	100	100	100	100	#VALUE!	118	100	100	100	100

Keterangan: *) Data Sementara

Tabel 2.14 Pencapaian Kinerja Pelayanan RSUD Bagas Waras Tahun 2016-2021

No	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun Ke-					Realisasi Capaian Kinerja Pada Tahun Ke-					Persentase Capaian Pada Tahun Ke- (%)							
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021*	2016	2017	2018	2019	2020	2021*
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		15	16	17	18	19	
1	Persentase pelayanan administrasi perkantoran	%	84,93	76,07	100	100	100	100	84,93	76,07	82,7	72,41	99,04	50	0	0	0	0	0	0
2	Persentase sarana dan prasarana aparatur	%	91,82	94,83	100	100	100	100	91,82	94,83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Persentase peningkatan disiplin aparatur	%	86,42	0	0	0	0	0	86,42	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
4	Persentase peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	%	94,9	0	0	0	0	0	94,9	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
5	Jumlah dokumen sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	dokumen	9	3	1	1	0	0	9	3	1	1	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!

6	Cakupan obat generik berlogo dalam persediaan obat	%	0	87,5	0	0	0	0	0	87,5	0	0	0	0	#DIV/0!	0%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
7	Persentase pengelolaan limbah medis dan non medis	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100		0%	0%	0%	0%	100,00%
8	Akreditasi RSUD		0	47,06	0	0	0	0	0	47,06	0	0	0	0						#DIV/0!
9	Ratio tempat tidur Rumah Sakit per satuan penduduk	/1.000 penduduk	1,34	1,38	1,38	1,38	1,38	1,38	1,34	1,38	1,38	1,64	1,78	data ada di dinke s	0%	0%	0%	0%	0%	#VALUE!
10	Persentase Sarana dan prasarana yang terpelihara	%	100	100	0	100	100	100	100	100	100	95,38	100	97,10	0%	0%	#DIV/0!	0%	0%	97,10%
11	Persentase Pengelolaan SIMRS (Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit)	%	80	0	0	100	100	100	80	0	0	100	0	0	0%	#DIV/0!	#DIV/0!	0%	0%	0,00%

12	BOR (Bed Occupancy Ratio) Angka penggunaan tempat tidur	%	50	55%	62%	65%	70%	70%	52,55 %	42,04 %	49,1 %	69,3 %	56%	57,49 %	105%	76%	79%	107%	80%	82,13%
13	NDR (Net Death Rate) angka kematian 48 jam setelah dirawat untuk tiap-tiap 1000 penderita keluar rumah sakit	‰	25	13,74 ‰	< 25 ‰	< 25 ‰	< 25 ‰	< 25 ‰	25 ‰	13,74 ‰	11 ‰	10,7 ‰	12,5 ‰	49‰	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	4,00%
14	GDR (Gross Death Rate) angka kematian umum untuk setiap 1000 penderita keluar rumah sakit	‰	< 48	40 ‰	< 45 ‰	< 45 ‰	< 45 ‰	< 45 ‰	28 ‰	37,21 ‰	27 ‰	30,6 ‰	32,1 ‰	75‰	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	33,33%
15	Jumlah Dokumen Perencanaan yang disusun	dokumen		2	7	7	7	7	0	2	7	7	7	6	#DIV/0!	0%	0%	0%	0%	85,71%

Keterangan: *) Data Sementara

Berdasarkan tabel diatas, dapat diketahui bahwa indikator yang realisasi capaiannya masih rendah dibandingkan target yaitu Cakupan pelayanan ibu hamil (K4), Cakupan pelayanan ibu nifas (KF3), Cakupan pelayanan kesehatan bayi baru lahir (KN3), Cakupan pelayanan kesehatan balita, Cakupan skrining kesehatan pada anak pendidikan dasar (penjaringan kesehatan), Cakupan kunjungan bayi, Cakupan anemia wanita usia subur, Cakupan skrining kesehatan sesuai standar pada usia produktif (15-59) thn, Cakupan skrining kesehatan sesuai standar pada lansia (≥ 60 th), Cakupan pelayanan kesehatan orang dengan TBC, Cakupan pelayanan kesehatan penderita hipertensi, Cakupan pelayanan kesehatan penderita Diabetes Mellitus, Cakupan pelayanan kesehatan penderita Gangguan Jiwa Berat, dan Cakupan balita gizi lebih (Obes).

Faktor yang mempengaruhi belum berhasilnya capaian terhadap target Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah antara lain adanya pandemi COVID-19 pada tahun 2020, kurangnya edukasi masyarakat mengenai penting pelayanan kesehatan dalam upaya pencegahan dan penanggulangan penyakit, dan kurangnya sumber daya manusia di lapangan.

Dari beberapa faktor tersebut yang paling berpengaruh secara signifikan terjadinya pandemi COVID-19 pada tahun 2020. Contoh indikator yang terdampak COVID-19 antara lain Cakupan pelayanan kesehatan bayi baru lahir (KN3) pada tahun 2020 sebesar 96,7% mengalami penurunan dari tahun sebelumnya yaitu sebesar 97,79%. Hal ini dikarenakan situasi pandemi COVID-19 beberapa ibu dari bayi takut ke fasilitas pelayanan kesehatan. Kemudian pandemi COVID-19 juga menyebabkan menurunnya cakupan pelayanan kesehatan balita pada tahun 2020 sebesar 92,71 dimana di tahun sebelumnya cakupan pelayanan kesehatan balita sebesar 95,77%. Selain itu pandemi COVID-19 pada tahun 2020 berpengaruh secara signifikan terhadap cakupan skrining kesehatan pada anak pendidikan dasar. Pada tahun tersebut cakupan skrining kesehatan pada anak pendidikan dasar sebesar 0% dimana ditahun sebelumnya cakupan skrining kesehatan pada anak pendidikan dasar sebesar 100%. Hal itu dikarenakan saat pandemi proses belajar mengajar secara tatap muka di sekolah ditiadakan.

Anggaran dan realisasi anggaran selama kurun waktu tahun 2016-2021 di Dinas Kesehatan Kabupaten Klaten dan RSUD Bagas Waras Kabupaten Klaten sebagaimana Tabel 2.15 berikut

Tabel 2.15. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Kesehatan Tahun 2016-2021 (Renstra Periode yang Lalu)

No	Program	Rencana Anggaran Pada Tahun Ke- (Rp.000)						Realisasi Anggaran pada Tahun Ke-(Rp.000)						Persentase Realisasi Anggaran (%)						Rata-rata Pertumbuhan	
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021*	2016	2017	2018	2019	2020	2021*	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.850.673	2.056.722	2.706.169	4.507.907	4.507.907	4.733.302	1.850.673	2.056.722	2.791.156	2.960.813	3.043.248	5.792.134	100%	100%	103%	66%	68%	122	27%	26%
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	623.976	909.513	360.388	1.273.900	3.021.500	1.072.575	623.976	909.513	591.315	1.122.288	356.815	1.110.708	100%	100%	164%	88%	12%	103	51%	12%
3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	9.986	9.986	10.000	115.000	120.000	126.000	9.986	9.986	9.943	76.384	11.850	-	100%	100%	99%	66%	10%	-	-25%	#VALUE!
4	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	25.000	44.358	30.000	60.000	-	-	25.000	44.358	30.000	29.755	-	-	100%	100%	100%	50%	#DIV/0!	-	#VALUE!	#VALUE!
5	Program Obat dan Perbekalan Kesehatan	4.353.641	2.587.725	4.913.243	4.815.000	5.265.000	5.528.250	4.353.641	2.587.725	4.662.376	3.938.315	3.455.323	146.187	100%	100%	95%	82%	66%	2,64	#NUM!	-49%
6	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	1.671.826	14.497.452	26.802.228	31.777.526	34.383.752	34.942.435	1.671.826	14.497.452	7.112.695	7.377.244	21.213.774	376.505	100%	100%	27%	23%	62%	1,08	-34%	-26%
7	Program Pengawasan Obat dan Makanan	51.775	48.325	55.000	130.000	230.000	246.500	51.775	48.325	54.595	97.130	213.377	42.046	100%	100%	99%	75%	93%	17,06	2%	-4%
8	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	77.532	133.767	492.915	492.915	517.560	543.438	77.532	133.767	478.459	439.433	135.419	160.072	100%	100%	97%	89%	26%	29,46	-10%	16%
9	Program Perbaikan Gizi Masyarakat	61.095	58.372	608.822	608.822	639.263	671.226	61.095	58.372	491.360	400.876	604.015	134.981	100%	100%	81%	66%	94%	20,11	-22%	17%
10	Program Pengembangan Lingkungan Sehat	1.172.458	325.994	1.125.123	1.125.123	1.681.379	1.765.448	1.172.458	325.994	994.755	1.041.250	395.600	96.504	100%	100%	88%	93%	24%	5,47	60%	-39%
11	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	358.017	381.063	669.150	670.525	970.525	804.051	358.017	381.063	476.147	1.233.546	12.353.482	644.959	100%	100%	71%	184%	1273%	80,21	34%	12%
12	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	3.836.582	8.081.042	70.068.812	59.102.471	60.482.520	60.502.020	3.836.582	69.907	49.998	23.104	83.412	60.179	100%	1%	0%	0%	0%	0,10	-29%	-56%
13	Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin	9.026.398	55.424.617	10.161.222	10.161.222	11.669.283	12.252.747	9.026.398	8.689.530	9.686.506	17.217.204	22.874.924	16.287.777	100%	16%	95%	169%	196%	132,93	#NUM!	13%

No	Program	Rencana Anggaran Pada Tahun Ke- (Rp.000)						Realisasi Anggaran pada Tahun Ke-(Rp.000)						Persentase Realisasi Anggaran (%)						Rata-rata Pertumbuhan	
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021*	2016	2017	2018	2019	2020	2021*	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
14	Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya	14.874.604	13.704.247	15.971.264	37.441.856	29.750.000	30.712.500	14.874.604	13.704.247	15.102.057	13.880.825	12.814.027	85.702	100%	100%	95%	37%	43%	0,28	39%	-64%
15	Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit / Rumah Sakit Jiwa / Rumah Sakit Paru-Paru / Rumah Sakit Mata	-	-	200.000	2.540.000	2.000.000	1.000.000			197.452			-	#DIV/0!	#DIV/0!	99%	0%	0%	-	#VALUE!	#VALUE!
16	Program Peningkatan Kualitas Perencanaan	-	61.949	60.000	125.000	-	-		61.949	59.255	87.937		50	#DIV/0!	100%	99%	70%	#DIV/0!	-	#VALUE!	#NUM!

Keterangan: *) Data Sementara

Tabel 2.16 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan RSUD Bagas Waras Tahun 2016-2021 (Renstra Periode yang Lalu)

No	Program	Rencana Anggaran Pada Tahun Ke- (Rp.000)						Realisasi Anggaran pada Tahun Ke-(Rp.000)						Persentase Realisasi Anggaran (%)						Rata Rata Pertumbuhan	
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021*	2016	2017	2018	2019	2020	2021*	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	4.040.896	2.632.079	3.500.000	5.275.000	6.025.000	6.430.000	4.040.896	2.632.079	2.935.770	1.520.532	2.104.676	279.921	100	100	84	29	35	4	#NUM!	-41%
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1.186.356	1.707.850	-	2.700.000	4.775.000	5.300.000	1.186.356	1.707.850	-	-	-	-	100	100	#DIV/0!	0	0	0	4%	-100%
3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	181.493	-	-	-	-	-	181.493	-	-	-	-	-	100	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#VALUE!	-100%
4	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	142.354	-	-	-	-	-	142.354	-	-	-	-	-	100	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#VALUE!	-100%
5	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	41.424	22.500	5.000	5.000	-	-	41.424	22.500	4.938	7.500	-	-	100	100	99	150	#DIV/0!	#DIV/0!	#VALUE!	-100%
6	Program Obat dan Perbekalan Kesehatan	-	9.919	-	-	-	-	-	9.919	-	-	-	1.662.398	#DIV/0!	100	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#VALUE!	#VALUE!
7	Program Pengembangan Lingkungan Sehat	471.420	-	700.000	800.000	1.000.000	1.000.000	471.420	-	342.029	-	-	-	100	#DIV/0!	49	0	0	0	38%	-100%
8	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	-	7.363	-	-	-	-	-	7.363	-	-	-	-	#DIV/0!	100	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#VALUE!	#VALUE!

No	Program	Rencana Anggaran Pada Tahun Ke- (Rp.000)						Realisasi Anggaran pada Tahun Ke-(Rp.000)						Persentase Realisasi Anggaran (%)						Rata Rata Pertumbuhan	
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021*	2016	2017	2018	2019	2020	2021*	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
9	Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata	33.712.839	23.432.581	4.775.000	4.000.000	6.100.000	7.000.000	33.712.839	23.432.581	6.453.293	6.544.351	4.335.658		100	100	135	164	71	0	#NUM!	-100%
10	Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata	442.826	47.651	-	1.300.000	1.300.000	1.400.000	442.826	47.651	-	-	-	318.603	100	100	#DIV/0!	0	0	23	18%	-6%
11	Program Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit	81.613	-	-	3.500.000	1.000.000	1.000.000	81.613	-	-	156.996	-		100	#DIV/0!	#DIV/0!	4	0	0	-24%	-100%
12	Program Pelayanan Kesehatan	15.767.379	26.014.678	28.000.000	29.000.000	30.000.000	31.000.000	15.767.379	26.014.678	32.270.721	37.064.486	50.311.521	24.547.498	100	100	115	128	168	79	42%	9%
13	Program Peningkatan Derajat Kesehatan	2.775.000	6.248.475	-	7.000.000	8.000.000	9.000.000	2.775.000	6.248.475	-	-	-		100	100	#DIV/0!	0	0	0	16%	-100%
14	Program Peningkatan Kualitas Perencanaan	-	19.195	20.000	20.000	30.000	30.000	-	19.195	18.997	47.167	-	19.849	#DIV/0!	100	95	236	0	66	#VALUE!	#VALUE!

Keterangan : *) Data Sementara

Berdasarkan tabel diatas, dapat diketahui bahwa realisasi anggaran dapat dikatakan baik. Anggaran RSUD Bagas Waras dari tahun ke tahun mengalami tren kenaikan terutama anggaran yang bersumber dari pendapatan rumah sakit. Meski pada tahun 2016 RSUD Bagas Waras sudah menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) secara penuh namun Pemerintah Daerah masih memberikan subsidi anggaran dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Namun anggaran dari APBD Kabupaten Klaten jumlahnya semakin turun dari tahun ke tahun seiring dengan meningkatnya pendapatan RSUD Bagas Waras.

Berdasarkan tabel-tabel di atas dapat diketahui bahwa realisasi anggaran dikatakan baik. Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja pengelolaan pendanaan pelayanan Dinas Kesehatan Kabupaten Klaten yaitu :

- a. Adanya pandemi covid 19 di tahun 2020 yang menyebabkan tidak bisa berjalannya beberapa kegiatan
- b. Adanya refocusing anggaran untuk kegiatan penanganan covid-19
- c. Adanya peraturan terkait penganggaran dan pengelolaan keuangan yang sering diperbaharui sehingga pelaksanaan kegiatan kurang maksimal
- a. Petunjuk teknis penggunaan dana DAK yang seringkali terlambat diterbitkan sehingga memperlambat pelaksanaan kegiatan
- b. Menu-menu kegiatan anggaran DAK sudah ditentukan dari kementerian secara rigid dan kadangkala tidak sesuai dengan ketentuan keuangan daerah, sehingga penyerapan anggaran tidak bisa maksimal

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Kesehatan dan RSUD Bagas Waras

Dinas Kesehatan Kabupaten Klaten dan RSUD Bagas Waras Kabupaten Klaten dalam melaksanakan program dan kegiatan serta pelayanan terhadap masyarakat menghadapi tantangan yang cukup kompleks. Namun dari tantangan tersebut ada peluang yang dapat digunakan sebagai dasar untuk menyelesaikan tantangan yang dihadapi. Tantangan dan peluang tersebut antara lain :

2.4.1 Tantangan

Tantangan adalah situasi yang merupakan ancaman bagi organisasi yang datang dari luar organisasi (eksternal) dan dapat mengancam eksistensi organisasi dimasa depan.

a. Tantangan Pengembangan Pelayanan Dinas Kesehatan

Tantangan Pengembangan Pelayanan Dinas Kesehatan dalam 5 (lima) tahun ke depan antara lain sebagai berikut:

1. Kerjasama dan dukungan sektor lain terhadap bidang kesehatan masih belum optimal karena masih ada anggapan bahwa urusan kesehatan merupakan tanggung jawab Dinas Kesehatan saja.
2. Gaya hidup masyarakat yang tidak sehat dapat mengakibatkan berbagai macam penyakit.
3. Ketersediaan Sumber Daya Kesehatan baik Sumber Daya Manusia maupun sarana prasarana kesehatan serta distribusi penempatan yang belum optimal.
4. Belum optimalnya pelaksanaan regulasi yang mendukung etos kerja dan budaya kerja.
5. Belum optimalnya pemanfaatan anggaran di bidang kesehatan.
6. Penanganan dan Penanggulangan Pandemi COVID-19.

b. Tantangan Pengembangan Pelayanan RSUD Bagas Waras

Tantangan Pengembangan Pelayanan RSUD Bagas Waras dalam 5 (lima) tahun ke depan antara lain sebagai berikut :

1. Adanya biaya yang tinggi untuk tenaga BLUD karena keterbatasan tenaga PNS
2. Semakin kritisnya masyarakat terhadap pelayanan kesehatan yang diberikan rumah sakit
3. Banyak rumah sakit sekitar yang sudah lebih lama beroperasi
4. Kecenderungan masyarakat ekonomi menengah ke atas berobat ke luar kota
5. Terbatasnya transportasi publik menuju RSUD
6. Bencana alam gunung Merapi, gempa, banjir, angin rebut

2.4.2 Peluang

Peluang adalah situasi atau kondisi yang merupakan peluang dari luar organisasi (eksternal) dan memberikan peluang berkembang bagi organisasi dimasa depan.

- a. Peluang dalam pengembangan pelayanan Dinas Kesehatan dalam 5 (lima) tahun ke depan antara lain sebagai berikut :
 1. Menguatnya komitmen Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan DPRD terhadap dukungan alokasi pembiayaan kesehatan dari APBN dan APBD.
 2. Adanya dukungan dari Pemerintah melalui program pelayanan kesehatan untuk masyarakat miskin yaitu Jamkesmas, Jamkesprop dan Jamkesda.
 3. Adanya dukungan data dan informasi baik dari Dinas Kesehatan maupun dari instansi terkait.
 4. Meningkatnya pemanfaatan dan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi bagi pembangunan kesehatan diantara SIKNAS dan SIKDA.
 5. Adanya bantuan dari luar negeri untuk peningkatan pembangunan kesehatan melalui lembaga donor.
 6. Munculnya organisasi-organisasi baru yang bergerak di bidang kesehatan yang dapat sebagai mitra dalam membangun kualitas kesehatan masyarakat.
- b. Peluang dalam pengembangan pelayanan RSUD Bagas Waras dalam 5 (lima) tahun ke depan antara lain sebagai berikut
 1. Adanya dukungan Pemerintah Daerah untuk menunjang pelayanan RSUD
 2. RSUD Bagas Waras merupakan rumah sakit kelas C dan merupakan rumah sakit rujukan dari fasyankes tingkat I
 3. Meningkatnya kerjasama dengan berbagai pihak
 4. Tarif pelayanan RSUD yang masih murah
 5. Pengelolaan BLUD yang lebih fleksibel dalam pengelolaan keuangan BLUD

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Permasalahan pembangunan adalah penyebab terjadinya kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang di rencanakan serta antara apa yang ingin di capai di masa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat. Berdasarkan salah satu misi Pemerintah Kabupaten Klaten yaitu mewujudkan kualitas sumber daya manusia yang cerdas, sehat, berbudaya, dan responsif gender, maka tidak lepas dari peran Dinas Kesehatan untuk mewujudkannya. Peningkatan kualitas sumber daya manusia dapat terwujud apabila masyarakat Kabupaten Klaten terpenuhi kebutuhan dasar termasuk pelayanan kesehatannya. Dalam pemenuhan kebutuhan dasar tersebut, Dinas Kesehatan memiliki beberapa permasalahan. Permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Kesehatan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi disajikan pada tabel 3.1 dibawah ini.

Tabel 3.1
Identifikasi Permasalahan yang Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Kesehatan Kabupaten Klaten

No	Bidang	Permasalahan
1.	Sekretariat	a. Masih terbatasnya sumber daya manusia yang bekerja di Dinas Kesehatan, RSUD Bagas Waras, dan Puskesmas b. Masih terbatasnya sarana dan prasarana pendukung kegiatan perkantoran. c. Menurunnya disiplin beberapa pegawai karena adanya sistem bekerja dari rumah dan absen manual.
2.	Bidang Pelayanan Kesehatan	a. Masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk mendaftarkan diri dan keluarganya ke Program JKN/KIS

No	Bidang	Permasalahan
		<ul style="list-style-type: none"> b. Masih rendahnya kesadaran badan usaha untuk mendaftarkan pegawainya ke program JKN/KIS c. Masih rendahnya IKS (Indeks Keluarga Sehat) d. Masih terbatasnya sarana dan prasarana pelayanan Kesehatan e. Masih ada 3 puskesmas rawat inap yang bangunannya terpisah f. Masih rendahnya keaktifan fasilitas kesehatan dalam penggunaan Sistem Rujukan Terpadu (SISRUTE)
3.	Bidang Sumber Daya Kesehatan	<ul style="list-style-type: none"> a. Terbatasnya jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDMK) secara kualitas dan kuantitas serta distribusi penempatan yang kurang sesuai. b. Kurangnya penyampaian informasi bidang kesehatan kepada masyarakat c. Kurangnya koordinasi lintas sektoral terkait pengawasan obat dan makanan d. Kurangnya pemberdayaan Puskesmas dalam rangka pengawasan obat dan makanan di wilayahnya e. Rendahnya kesadaran masyarakat terhadap obat dan makanan yang aman f. Kurangnya anggaran APBD yang dialokasikan untuk penyediaan sarana prasarana alat kesehatan Puskesmas, dan anggaran pemeliharannya g. Ketersediaan obat-obatan dan vaksin di Puskesmas masih dibawah standar
4.	Bidang Pengendalian dan Pencegahan Penyakit	<ul style="list-style-type: none"> a. Masih rendahnya capaian SPM bidang kesehatan karena sasaran yang ditetapkan untuk SPM berdasarkan prevalensi bukan sasaran riil. b. Adanya Kejadian Luar Biasa (KLB) berupa Covid-19.

No	Bidang	Permasalahan
		<ul style="list-style-type: none"> c. Rendahnya kesadaran masyarakat usia produktif untuk dilakukan skrining d. Rendahnya kesadaran penderita penyakit tidak menular seperti hipertensi, orang dengan gangguan jiwa (ODGJ), dan diabetes mellitus untuk melakukan pengobatan rutin. e. Kurangnya koordinasi di tingkat Puskesmas melalui kewaspadaan dini dan respon cepat masih kurang. f. Kurang tenaga kesehatan yang dilatih tentang pelayanan jiwa. g. Kurangnya kesadaran masyarakat untuk segera periksa saat mengalami gejala atau beresiko terpapar penyakit menular (DBD, TBC, HIV, Leptospirosis). h. Kurangnya dukungan lintas sector dalam penemuan dan pemantauan pengobatan kasus penyakit menular. i. Masih adanya stigma dan diskriminasi terhadap ODHA (orang dengan HIV/AIDS).
	<p>Bidang Kesehatan Masyarakat</p>	<ul style="list-style-type: none"> a. Masih tingginya angka kematian bayi. b. Masih tingginya angka kematian balita dan angka kematian anak balita. c. Masih tingginya kasus kematian ibu. d. Masih adanya kasus balita gizi buruk. e. Masih tingginya prevalensi stunting. f. Pemantauan pertumbuhan, khususnya Posyandu masih ada yang belum jalan karena ada pembatasan sosial. Belum semua posyandu mempunyai alat ukur terstandar. g. Rendahnyanya tingkat kesadaran masyarakat menerapkan pilar STBM (pilar 4 dan 5) dan belum

No	Bidang	Permasalahan
		<p>tersedianya sarana untuk mendukung penerapan pilar STBM (pilar 4 dan 5).</p> <p>h. Belum optimalnya rumah tangga berperilaku hidup bersih dan sehat.</p> <p>i. Masih banyak masyarakat yang belum memiliki jamban sehat (masih menumpang/sharing).</p> <p>j. Belum semua puskesmas mempunyai <i>cold storage</i> untuk penyimpanan limbah berbahaya dan beracun.</p> <p>k. kurangnya komitmen dari pimpinan sektor terkait dan masyarakat untuk mengembangkan desa siaga aktif.</p>

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Bupati dan Wakil Bupati Terpilih

Visi pembangunan dalam RPJMD Pemerintah Kabupaten Klaten Tahun 2021-2026 merupakan visi Bupati dan Wakil Bupati yang disampaikan pada saat proses pemilihan Kepala Daerah. Visi tersebut adalah :

“Terwujudnya Kabupaten Klaten Yang Maju, Mandiri dan Sejahtera.”

Misi pembangunan yang ditetapkan dalam mencapai visi yaitu sebagai berikut:

1. Mewujudkan Tataan Kehidupan Masyarakat yang Berahlak dan Berkepribadian;
2. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik, profesional, jujur, bersih, transparan, bertanggungjawab, dan anti korupsi;
3. Meningkatkan kemandirian ekonomi daerah berbasis sektor unggulan daerah berdasarkan ekonomi kerakyatan;
4. Mewujudkan pemerataan sarana prasarana wilayah yang berkualitas sesuai rencana tata ruang wilayah;
5. Mewujudkan kualitas sumber daya manusia yang cerdas, sehat,berbudaya, dan responsif gender;
6. Mewujudkan kualitas pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan.

Sesuai dengan tugas dan fungsinya, Dinas Kesehatan Kabupaten Klaten mengarah pada pencapaian unsur visi : **Maju dan Sejahtera**. Adapun misi RPJMD

yang terkait dengan tugas dan fungsi Dinas Kesehatan Kabupaten Klaten yaitu misi ke-5 yaitu: **Mewujudkan kualitas sumber daya manusia yang cerdas, sehat, berbudaya, dan responsif gender**, dengan tujuan mewujudkan kualitas sumber daya manusia yang cerdas, sehat, berbudaya, dan responsif gender dan sasaran meningkatnya derajat kesehatan masyarakat.

Faktor pendorong dan faktor penghambat yang dihadapi Dinas Kesehatan Kabupaten Klaten dalam pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah tercantum pada tabel berikut ini.

Tabel 3.2
Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Dinas Kesehatan Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

No	Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
	<p>Misi : Mewujudkan kualitas sumber daya manusia yang cerdas, sehat, berbudaya, dan responsif gender</p> <p>Tujuan Mewujudkan kualitas sumber daya manusia yang cerdas, sehat, berbudaya, dan responsif gender</p> <p>Sasaran Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Masih adanya kasus kematian ibu, bayi, balita, dan kasus balita gizi buruk dan masih tingginya prevalensi stunting 2. Masih tingginya penyakit menular dan semakin meningkatnya kasus penyakit tidak menular sebagai penyebab kematian 3. Masih ada masyarakat yang belum terdaftar di Program JKN/KIS 4. Masih rendahnya IKS (Indeks Keluarga Sehat). 5. Masih adanya pelayanan dasar dan rujukan yang belum memenuhi standa 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Permasalahan kesehatan sangat kompleks dan tidak dapat diselesaikan sendiri oleh sektor kesehatan 2. Kurangnya kesadaran masyarakat berperilaku hidup bersih dan sehat 3. Masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk skrining kesehatan dan melakukan pengobatan 4. Masih rendahnya kesadaran masyarakat/badan usaha untuk mendaftarkan diri dan keluarganya/pegawainya ke Program JKN/KIS. 5. Kurangnya penyampaian informasi bidang 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kesadaran dan perilaku masyarakat untuk hidup sehat meningkat. 2. Tersedianya dukungan dan anggaran untuk pembangunan kesehatan 3. Tersedianya media komunikasi berbasis teknologi sehingga dapat diakses secara cepat oleh siapapun

			<p>kesehatan kepada masyarakat.</p> <p>6. Masih terbatasnya SDM, sarana dan prasarana pelayanan kesehatan secara kualitas dan kuantitas.</p> <p>7. kurangnya komitmen dari pimpinan sektor terkait dan masyarakat untuk mengembangkan desa siaga aktif</p>	
--	--	--	--	--

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi

3.3.1 Telaahan Renstra Kementerian Kesehatan Republik Indonesia

Visi Kementerian Kesehatan Republik Indonesia tahun 2020-2024 adalah menciptakan manusia yang sehat, produktif, mandiri, dan berkeadilan.

Dalam rangka mewujudkan visi tersebut maka misi Kementerian Kesehatan adalah :

1. Menurunkan angka kematian ibu dan bayi
2. Menurunkan angka stunting pada balita
3. Memperbaiki pengelolaan Jaminan Kesehatan Nasional
4. Meningkatkan kemandirian dan penggunaan produk farmasi dan alat kesehatan dalam negeri

Sebagai penjabaran dari Visi dan Misi Kementerian Kesehatan tahun 2020-2024, maka tujuan pembangunan bidang kesehatan yang ingin dicapai yaitu:

1. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat melalui pendekatan siklus hidup
2. Penguatan pelayanan kesehatan dasar dan rujukan
3. Peningkatan pencegahan dan pengendalian penyakit dan pengelolaan kedaruratan kesehatan masyarakat
4. Peningkatan sumber daya kesehatan
5. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan inovatif

Sasaran strategis yang ingin dicapai Kementerian Kesehatan RI dalam dalam periode 2020-2024 adalah :

1. Meningkatnya kesehatan ibu, anak dan gizi masyarakat
2. Meningkatnya ketersediaan dan mutu fasyankes dasar dan rujukan.
3. Meningkatnya pencegahan dan pengendalian penyakit serta pengelolaan kedaruratan kesehatan masyarakat
4. Meningkatnya akses, kemandirian dan mutu kefarmasian dan alat kesehatan
5. Meningkatnya pemenuhan SDM Kesehatan dan kompetensi sesuai standar
6. Terjaminnya pembiayaan kesehatan
7. Meningkatnya sinergisme pusat dan daerah serta meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih
8. Meningkatnya efektivitas pengelolaan litbangkes dan sistem informasi kesehatan untuk pengambilan keputusan

Sesuai dengan tugas dan fungsi, Dinas Kesehatan Kabupaten Klaten mendukung pencapaian sasaran-sasaran tersebut sehingga peran Dinas Kesehatan Kabupaten Klaten sangat dibutuhkan.

Faktor pendorong dan faktor penghambat dalam pencapaian sasaran renstra Kementerian Kesehatan tercantum pada tabel berikut :

Tabel 3.3
Permasalahan Pelayanan Dinas Kesehatan Kabupaten Klaten
berdasarkan Sasaran Renstra K/L beserta Faktor Penghambat dan Pendorong
Keberhasilan Penanganannya

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra K/L	Permasalahan Pelayanan Pelayanan Perangkat Daerah	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	Meningkatnya kesehatan ibu, anak dan gizi masyarakat	Masih adanya kematian ibu, bayi, balita dan masih adanya kasus balita gizi buruk	1.Cakupan K4 yang masih rendah. 2.Masih adanya persalinan di non fasyankes. 3.Cakupan kunjungan nifas yang masih dibawah target 4.Cakupan kunjungan bayi dan balita yang masih rendah	1.Adanya kesamaan tujuan dan sasaran pembanguna kesehatan di Kementerian Kesehatan, Kabupaten Klaten. 2.Adanya dukungan anggaran 3.Adanya NGO yang

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra K/L	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
			5. Cakupan D/S yang rendah 6. Pemantauan pertumbuhan yang tidak optimal dikarenakan operasional posyandu tidak berjalan (karena Pandemi COVID 19) 7. Adanya penyakit penyerta pada balita gizi buruk 8. Masih terbatasnya SDM yang terlatih tatalaksana gibur 9. Kesadaran orang tua masih kurang untuk di rawat pada balita gibur	bekerjasama dengan Dinas Kesehatan Kab Klaten
2	Meningkatnya ketersediaan dan mutu fasyankes dasar dan rujukan	1. Masih adanya 3 puskesmas rawat inap yang bangunannya terpisah. 2. Rendahnya keaktifan fasyankes dalam menggunakan SISRUTE (sistem rujukan terintegrasi)	1. Ketersediaan lahan. 2. Kurangnya komitmen dari fasilitas pelayanan kesehatan dasar dan rujukan	1. Adanya upaya peningkatan komitmen dari fasyankes dasar dan rujukan dalam menggunakan SISRUTE. 2. Peningkatan monitoring dan evaluasi. 3. Adanya dukungan anggaran dari APBN maupun APBD
3	Meningkatnya pencegahan dan pengendalian penyakit serta pengelolaan kedaruratan	- Masih rendahnya tingkat kesadaran masyarakat untuk skrining	- Kesadaran masyarakat untuk berperilaku Hidup Bersih dan Sehat kurang. - Belum adanya aturan untuk	- Meningkatkan jumlah Fasilitas kesehatan swasta, Dokter Praktek swasta.

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra K/L	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
	kesehatan masyarakat	kesehatan dan pengobatan - Belum optimalnya koordinasi dengan RS	reward punish bagi faskes yang tidak membuat laporan	- Adanya Akreditasi pada Faskes/RS
4	Meningkatnya akses, kemandirian dan mutu kefarmasian dan alat kesehatan	Ketersediaan obat-obatan dan vaksin di puskesmas masih di bawah standar	Kurangnya anggaran APBD untuk penyediaan sarana prasarana alat kesehatan puskesmas dan pemeliharaannya. Keterlambatan LKPP dalam penayangan katalog obat dan alat Kesehatan	Kebijakan satu pintu dalam pengelolaan obat, BMHP, dan vaksin
5	Meningkatnya pemenuhan SDM Kesehatan dan kompetensi sesuai Standar	Masih kurangnya SDM Kesehatan secara kualitas dan kuantitas serta distribusi penempatan SDM Kesehatan	Sering adanya mutasi pegawai yang menyebabkan SDM yang sudah terlatih pindah tempat kerja	Adanya dukungan pembiayaan dari pemerintah pusat untuk penyediaan tenaga kesehatan melalui anggaran BOK (Bantuan Operasional Kesehatan)
6	Terjaminnya pembiayaan kesehatan	Cakupan kepesertaan masyarakat dalam program JKN KIS belum 100%	1. Masih rendahnya kesadaran masyarakat/badan usaha untuk mendaftarkan dirinya dan keluarganya/pegawainya ke Program JKN/KIS. 2. Adanya aturan perubahan besaran premi asuransi BPJS	Adanya dukungan pembiayaan dari Pemerintah pusat maupun daerah
7	Meningkatnya sinergisme pusat dan daerah serta meningkatnya tata kelola	Beberapa kebijakan tidak bisa diterapkan di Pemerintah Daerah	Beberapa peraturan kurang sejalan antara kebijakan pemerintah pusat	1. Adanya koordinasi yang baik antara pemerintah

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra K/L	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
	pemerintahan yang baik dan bersih		dan pemerintah daerah	pusat dan daerah. 2. Adanya sinergisme dalam hal penganggaran
8	Meningkatnya efektivitas pengelolaan litbangkes dan sistem informasi kesehatan untuk pengambilan keputusan	<ul style="list-style-type: none"> - Belum ada kerjasama litbang dengan institusi terutama institusi pendidikan. - aplikasi belum terpadu dan satu pintu, masih bersifat sektoral 	terbatasnya jumlah SDM pranata komputer dan belum mempunyai tenaga ahli programmer	aplikasi sistem informasi kesehatan dapat dikembangkan sendiri apabila sdh mempunyai tenaga ahli programmer jaringan internet dalam menjalankan aplikasi sistem informasi kesehatan sudah memadai

3.3.2 Telaahan Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah

Sasaran yang ingin dicapai dalam dalam Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah adalah :

1. Menurunnya angka kesakitan dan kematian, dengan indikator sasaran sebagai berikut:
 - AKI (Angka Kematian Ibu)
 - AKB (Angka Kematian Bayi)
 - AKABA (Angka Kematian Balita)
 - Persentase ketercapaian upaya pencegahan dan pengendalian penyakit menular
 - Persentase ketercapaian upaya pencegahan dan pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa
 - Persentase pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan atau berpotensi bencana provinsi
 - Persentase fasilitas pelayanan kesehatan primer dan rujukan sesuai ketentuan

- Indeks Keluarga Sehat Wilayah Provinsi
2. Meningkatnya akuntabilitas kinerja, dengan indikator sasaran sebagai berikut:
 - Nilai SAKIP Dinas Kesehatan
 3. Meningkatnya kualitas pelayanan, dengan indikator sasaran sebagai berikut:
 - Nilai kepuasan masyarakat

Sesuai dengan tugas dan fungsi, Dinas Kesehatan Kabupaten Klaten mendukung pencapaian semua sasaran Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah tersebut. Faktor pendorong dan faktor penghambat dalam pencapaian sasaran renstra Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah. tercantum pada tabel berikut :

Tabel 3.4
Permasalahan Pelayanan Dinas Kesehatan Kabupaten Klaten
berdasarkan Sasaran Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah beserta
Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	Menurunnya angka kesakitan dan kematian <ul style="list-style-type: none"> • AKI (Angka Kematian Ibu) • AKB (Angka Kematian Bayi) • AKABA (Angka Kematian Balita) • Persentase ketercapaian upaya pencegahan dan pengendalian Penyakit Menular • Persentase ketercapaian upaya pencegahan dan pengendalian Penyakit Tidak 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Masih adanya kasus kematian ibu, bayi, dan balita. 2. Masih adanya kasus balita gizi buruk 3. Masih rendahnya capaian SPM kesehatan. 4. Masih adanya kasus penyakit menular dan penyakit tidak menular 5. KLB Covid-19 6. Masih rendahnya Indeks Keluarga Sehat (IKS) 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Cakupan K4 yang masih rendah. 2. Masih adanya persalinan di non fasyankes. 3. Cakupan kunjungan nifas yang masih dibawah target 4. Cakupan kunjungan bayi dan balita yang masih rendah 5. Cakupan D/S yang rendah 6. Pemantauan pertumbuhan yang tidak optimal 	<ul style="list-style-type: none"> - Dukungan anggaran baik APBD maupun APBN. - Dukungan /peran serta lintas sector dalam pelaksanaan program kesehatan - Peran kader kesehatan

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
	<p>Menular dan Kesehatan Jiwa</p> <ul style="list-style-type: none"> • Persentase pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan atau berpotensi bencana provinsi • Persentase fasilitas pelayanan kesehatan primer dan rujukan sesuai ketentuan • Indeks Keluarga Sehat Wilayah Provinsi 		<p>dikarenakan operasional posyandu tidak berjalan (karena Pandemi COVID 19)</p> <p>7. Adanya penyakit penyerta pada balita gizi buruk</p> <p>8. Masih terbatasnya SDM yang terlatih tatalaksana gibur</p> <p>9. Kesadaran orang tua masih kurang untuk di rawat pada balita gibur</p> <p>10. Kesadaran masyarakat untuk skrining kesehatan dan pengobatan rutin masih rendah.</p> <p>11. Belum optimalnya koordinasi dengan layanan KIA swasta/mandiri (klinik bersalin, praktek dokter obsgyn mandiri)</p> <p>12. Masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk melakukan pengobatan rutin</p> <p>13. SDM yang dilatih pelayanan jiwa masih sedikit</p>	
2	Meningkatnya akuntabilitas kinerja	Capaian kinerja belum maksimal sesuai target dan	Penentuan sasaran kegiatan dalam penghitungan	Adanya dukungan dari

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
		ada yang belum memenuhi target	capaian tidak sesuai riil.	pemerintah daerah
3	Meningkatnya kualitas pelayanan	Menurunnya Cakupan Pelayanan Kesehatan sesuai standar	1.SDM yang dilatih pelayanan Jiwa masih sedikit. 2.Banyaknya nakes yang merangkap tugas	1. Adanya dukungan penganggaran. 2. Adanya penilaian kinerja puskesmas

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

3.4.1 Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) merupakan produk perencanaan ruang yang digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan program-program pembangunan di daerah serta mendorong percepatan perkembangan masyarakat secara tertib, teratur dan terencana. Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) diperlukan sebagai upaya sinkronisasi antara rencana tata ruang dengan rencana pembangunan.

Penelaahan substansi rencana tata ruang mencakup rencana struktur ruang dan rencana pola ruang, Rencana struktur ruang dan pola ruang memuat informasi mengenai lokasi spasial yang akan dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan dalam perumusan program dan kegiatan. Pembangunan kesehatan tidak menghadapi permasalahan yang berkaitan dengan rencana tata ruang tata wilayah.

3.4.2 Telaah Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) adalah instrument pendukung perencanaan pembangunan berkelanjutan melalui upaya internalisasi kepentingan lingkungan hidup dan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan kedalam perencanaan pembangunan tersebut. Perumusan isu strategis dalam dokumen KLHS merupakan hasil dari capain TPB yang belum

memenuhi target nasional dan indikator daerah. Isu strategis dalam KLH untuk Dinas Kesehatan adalah sebagai berikut:

Tabel 3.5
Isu Pembangunan Berkelanjutan dan Rekomendasi KLHS
Terkait Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Tujuan TPB	Target TPB Yang Belum Tercapai/ Indikator Belum Menjadi Target Kinerja	Isu Pembangunan Berkelanjutan	Rekomendasi KLHS
Mengakhiri Kemiskinan dalam Segala Bentuk Dimanapun	Proporsi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan.	1.3.1.(a)/SBT: Masih perlunya peningkatan peserta jaminan kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan, kondisi saat ini masih sebesar 90,71%.	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat (Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan)
	Persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan.	1.4.1.(a)/SST: Masih adanya perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya bukan di fasilitas kesehatan sebesar 0,07%.	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat (Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan)
	Persentase anak umur 12-23 bulan yang menerima imunisasi dasar lengkap.	1.4.1.(b)/SST: Masih adanya anak umur 12-23 bulan yang tidak menerima imunisasi dasar lengkap sebesar 11,73%.	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat (Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan)
	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak.	1.4.1.(d)/SST: Masih adanya rumah tangga yang tidak memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak dan berkelanjutan sebesar 8,86%.	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat (Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan)
	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan.	1.4.1.(e)/SST: Masih adanya masyarakat yang belum mendapatkan akses sanitasi layak sebesar 0,21%.	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat (Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan)

Menghilangkan Kelaparan, Mencapai Ketahanan Pangan dan Gizi yang Baik, serta Meningkatkan Pertanian Berkelanjutan	Prevalensi kekurangan gizi (underweight) pada anak balita.	2.1.1.(a)/SST: Masih perlunya upaya mempertahankan prevalensi kekurangan gizi (underweight) pada anak balita.	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat (Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan)
	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah lima tahun/balita.	2.2.1*/SBT: Masih perlunya penurunan prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah lima tahun/balita, kondisi saat ini masih sebesar 7,1%.	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat (Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan)
	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah dua tahun/baduta.	2.2.1.(a)/TAD 1: Belum adanya data prevalensi stunting pada anak di bawah dua tahun/baduta	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat (Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan)
	Prevalensi malnutrisi (berat badan/tinggi badan) anak pada usia kurang dari 5 (lima) tahun, berdasarkan tipe.	2.2.2*/SST: Masih adanya prevalensi malnutrisi (berat badan/tinggi badan) anak pada usia kurang dari 5 tahun sebesar 7,3%	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat (Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan)
	Prevalensi anemia pada ibu hamil.	2.2.2.(a)/SST: Masih adanya prevalensi anemia pada ibu hamil sebesar 9,28%.	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat (Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan)
	Persentase bayi usia kurang dari 6 (enam) bulan yang mendapatkan ASI eksklusif	2.2.2.(b)/SST: Masih adanya bayi usia kurang dari 6 bulan yang tidak mendapatkan ASI eksklusif sebesar 17,85%.	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh	Angka Kematian Neonatal (AKN) per 1000 kelahiran hidup.	3.2.2*/ SBT: Masih tingginya Angka Kematian Neonatal (AKN) yaitu sebesar 56,03 per 1000 kelahiran hidup.	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
	Jumlah orang yang memerlukan intervensi	3.3.5*/SBT: Masih tingginya jumlah	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan

Penduduk Semua Usia	terhadap penyakit tropis yang terabaikan (Filariasis dan Kusta).	orang yang memerlukan intervensi terhadap penyakit tropis yang terabaikan (Filariasis dan Kusta) sebesar 28 jiwa	Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
	Persentase merokok pada penduduk umur ≤ 18 tahun.	3.4.1.(a)/TAD: Belum adanya data terkait persentase merokok pada penduduk umur ≤ 18 tahun.	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
	Prevalensi tekanan darah tinggi	3.4.1.(b)/TBC: Masih tingginya prevalensi tekanan darah tinggi sebesar 49%.	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
	Prevalensi obesitas pada penduduk umur ≥ 18 tahun.	3.4.1.(c)/TBC: Masih tingginya prevalensi obesitas pada penduduk umur ≥ 18 tahun sebesar 51%.	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
	Jumlah penduduk yang dicakup asuransi kesehatan atau sistem kesehatan masyarakat per 1000 penduduk.	3.8.2*/SST: Belum sepenuhnya jumlah penduduk dicakup asuransi kesehatan atau sistem kesehatan masyarakat.	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
	Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).	3.8.2.(a)/SST: Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) sebesar 90,71%.	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
	Persentase merokok pada penduduk umur ≥ 15 tahun.	3.a.1*/TAD: Belum adanya data terkait persentase merokok pada penduduk umur ≥ 15 tahun.	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
	Persentase ketersediaan obat dan vaksin di Puskesmas.	3.b.1.(a)/SST: Perlu peningkatan ketersediaan obat dan vaksin di Puskesmas.	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
Menjamin Ketersediaan serta Pengelolaan Air Bersih dan Sanitasi yang Berkelanjutan	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak	6.1.1.(a)/SST: Masih adanya rumah tangga yang tidak memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak sebesar 8,86%.	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan

Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak.	6.2.1.(b)/SBT: Masih perlunya peningkatan persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak menjadi 100%, kondisi saat ini 99,79%.	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan
Jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM).	6.2.1.(c)/SST: Masih perlunya upaya mempertahankan jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM).	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan
Jumlah desa/kelurahan yang Open Defecation Free (ODF)/ Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS).	6.2.1.(d)/SST: Masih perlunya upaya mempertahankan jumlah desa/kelurahan yang Open Defecation Free (ODF)/ Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS).	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan

Keterangan :

SST : Indikator TPB yang sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target nasional

SBT : Indikator TPB yang sudah dilaksanakan tetapi belum mencapai target nasional

TTC : Indikator TPB tidak ada target daerah tetapi tercapai

TBC : Indikator TPB tidak ada target daerah dan belum tercapai

TAD : Indikator TPB belum ada data

Sumber: Dokumen KLHS RPJMD Kabupaten Klaten Tahun 2021-2026

Uraikan singkat terhadap isu strategis dari target yang belum tercapai sebagai berikut :

Tabel 3.6
Permasalahan Pelayanan Dinas Kesehatan Berdasarkan KLHS RPJMD Kabupaten Klaten
Beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan

No	Tujuan TPB	Isu Pembangunan Berkelanjutan	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	Mengakhiri Kemiskinan dalam Segala Bentuk Dimanapun	1.3.1.(a)/SBT: Masih perlunya peningkatan peserta jaminan kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan, kondisi saat ini masih sebesar 90,71%.	Masih rendahnya kesadaran untuk mendaftarkan dirinya dan keluarganya ke Program JKN/KIS , masih ada badan usaha yang tidak patuh untuk mendaftarkan pegawainya ke program JKN/KIS	Adanya dukungan anggaran untuk pembiayaan program JKN
2		1.4.1.(a)/SST: Masih adanya perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya bukan di fasilitas kesehatan sebesar 0,07%.	Masih adanya ibu bersalin di rumah / “kebrojolan”	Adanya program P4K (program perencanaan Persalinan dan pencegahan Komplikasi) yang mendapat dukungan dari lintas sektor / toma/ toga
3		1.4.1.(b)/SST: Masih adanya anak umur 12-23 bulan yang tidak menerima imunisasi dasar lengkap sebesar 11,73%.	Dropping vaksin dari kementerian kadang mengalami keterlambatan	Kesadaran masyarakat untuk imunisasi dasar lengkap cukup tinggi
4		1.4.1.(d)/SST: Masih adanya rumah tangga yang tidak memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak dan berkelanjutan sebesar 8,86%.	Belum semua masyarakat tercukupinya sumber air minumnya	Tersedianya penyelenggara sumber air minum yang dikelola oleh masyarakat / swasta

5		1.4.1.(e)/SST: Masih adanya masyarakat yang belum mendapatkan akses sanitasi layak sebesar 0,21%.	Masih kurangnya sarana prasarana terkait akses sanitasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk berperilaku hidup bersih dan sehat. 2. Adanya dukungan anggaran dari Pemerintah Daerah untuk pembangunan jamban masyarakat miskin
6	Menghilangkan Kelaparan, Mencapai Ketahanan Pangan dan Gizi	2.1.1.(a)/SST: Masih perlunya upaya mempertahankan prevalensi kekurangan gizi (underweight) pada anak balita.	Kurangnya pengetahuan dan kesadaran orangtua/pengasuh dalam Pola Asuh / Makan pada balita. Tidak berjalannya posyandu menyebabkan pemantauan pertumbuhan balita terhambat	Adanya program PMBA (Pemberian Makan pada Ba dan Anak), adanya konselor ASI dan PMBA di Puskesmas dan kader sebagai motivator ASI dan PMBA
7	yang Baik, serta Meningkatkan Pertanian Berkelanjutan	2.2.1*/SBT: Masih perlunya penurunan prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah lima tahun/balita, kondisi saat ini masih sebesar 7,1%.	Kurangnya pengetahuan orangtua tentang Stunting pada Balita, posyandu yang tidak berjalan, belum semua posyandu memiliki alat antropometri sesuai standar	Adanya dukungan linsek/linprog dalam penanganan stunting, dengan penyediaan alat antropometri, PMT dan peningkatan kapasitas kader melalui dana desa
8		2.2.1.(a)/TAD 1: Belum adanya data prevalensi stunting pada anak di bawah dua tahun/baduta	Belum semua posyandu mempunyai alat antropometri untuk mengukur panjang/tinggi badan sesuai standar, belum semua kader bisa menggunakan alat ukur tersebut dengan baik dan benar.	Adanya dukungan dari Dana Desa untuk penyediaan alat antropometri sesuai standar dan peningkatan kapasitas. Sudah adanya tenaga pelaksana gizi di tiap Puskesmas
9		2.2.2*/SST: Masih adanya prevalensi malnutrisi (berat badan/tinggi badan) anak pada	Kurangnya kesadaran dan pengetahuan orangtua masalah gizi pada balita, anak dianggap tidak ada masalah kesehatan kalau tidak sakit. Belum semua	Adanya motivator ASI dan PMBA dari kader kesehatan, ada sosialisasi mengenai Tatalaksana Gizi Buruk untuk Puskesmas

		usia kurang dari 5 tahun sebesar 7,3%	Puskesmas terlatih Tatalaksana Gizi Buruk	
10		2.2.2.(a)/SST: Masih adanya prevalensi anemia pada ibu hamil sebesar 9,28%.	Kurang kesadaran ibu hamil tentang pentingnya mengkonsumsi tablet tambah darah, ibu hamil tidak periksa kehamilan secara teratur	Adanya penyuluhan atau konseling kehamilan di Puskesmas/Posyandu, adanya kelas ibu hamil di desa
11		2.2.2.(b)/SST: Masih adanya bayi usia kurang dari 6 bulan yang tidak mendapatkan ASI eksklusif sebesar 17,85%.	Ibu bekerja, kurangnya pengetahuan pengasuh/orangtua tentang pentingnya ASI Eksklusif 6 bulan	Adanya kader sebagai motivator ASI dan tenaga kesehatan sebagai konselor ASI
12	Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia	3.2.2*/ SBT: Masih tingginya Angka Kematian Neonatal (AKN) yaitu sebesar 56,03 per 1000 kelahiran hidup.	Banyaknya kematian neonatal yang disebabkan karena BBLR , asfiksia dan kelainan kongenital	Adanya program ANC Terpadu dan inovasi di Tingkat Kabupaten yaitu jika jimil (siji kader siji ibu hamil)
13		3.3.5*/SBT: Masih tingginya jumlah orang yang memerlukan intervensi terhadap penyakit tropis yang terabaikan (Filariasis dan Kusta) sebesar 28 jiwa		
14		3.4.1.(a)/TAD: Belum adanya data terkait persentase merokok pada penduduk umur ≤18 tahun.	Belum terbukanya masyarakat dalam penyampaian informasi merokok	Survey PHBS
15		3.4.1.(b)/TBC: Masih tingginya prevalensi tekanan darah tinggi sebesar 49%.	Kurangnya kesadaran masyarakat untuk skrining kesehatan dan pengobatan rutin	Adanya dukungan penganggaran

16	3.4.1.(c)/TBC: Masih tingginya prevalensi obesitas pada penduduk umur ≥ 18 tahun sebesar 51%.	Kesadaran masyarakat dalam pengaturan pola makan, istirahat dan aktivitas masih rendah	Terbentuknya Posbindu PTM di desa-desa
17	3.8.2*/SST: Belum sepenuhnya jumlah penduduk dicakup asuransi kesehatan atau sistem kesehatan masyarakat.	Masih rendahnya kesadaran masyarakat/badan usaha untuk mendaftarkan dirinya dan keluarganya/pegawainya ke Program JKN/KIS. Adanya aturan perubahan besaran premi asuransi BPJS	Adanya dukungan pembiayaan dari Pemerintah pusat maupun daerah
18	3.8.2.(a)/SST: Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) sebesar 90,71%.	Masih rendahnya kesadaran masyarakat/badan usaha untuk mendaftarkan dirinya dan keluarganya/pegawainya ke Program JKN/KIS. Data masyarakat miskin belum update. Adanya aturan perubahan besaran premi asuransi BPJS	Adanya dukungan pembiayaan dari Pemerintah pusat maupun daerah
19	3.a.1*/TAD: Belum adanya data terkait persentase merokok pada penduduk umur ≥ 15 tahun.	Bukan merupakan indikator dari Kementerian Kesehatan	
20	3.b.1.(a)/SST: Perlu peningkatan ketersediaan obat dan vaksin di Puskesmas.	Keterbatasan anggaran untuk penyediaan dan manajemen obat dan vaksin	Pengelolaan obat dan vaksin satu pintu di Instalasi Farmasi Kabupaten

21	Menjamin Ketersediaan serta Pengelolaan Air Bersih dan Sanitasi yang Berkelanjutan	6.1.1.(a)/SST: Masih adanya rumah tangga yang tidak memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak sebesar 8,86%.	Belum semua masyarakat tercukupinya sumber air minumnya	Tersedianya penyelenggara sumber air minum yang dikelola oleh masyarakat / swasta
22		6.2.1.(b)/SBT: Masih perlunya peningkatan persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak menjadi 100%, kondisi saat ini 99,79%.		-Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk berperilaku hidup bersih dan sehat - Adanya dukungan anggaran dari Pemerintah Daerah untuk pembangunan jamban masyarakat miskin
23		6.2.1.(c)/SST: Masih perlunya upaya mempertahankan jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM).	Masih banyak masyarakat yang Buang Air Besar numpang pada keluarga atau MCK	Perilaku masyarakat untuk melaksanakan 5 Pilar STBM semakin meningkat
24		6.2.1.(d)/SST: Masih perlunya upaya mempertahankan jumlah desa/kelurahan yang Open Defecation Free (ODF)/ Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS).	Masih banyak masyarakat yang Buang Air Besar numpang pada keluarga atau MCK	Perilaku masyarakat untuk BAB di jamban sudah meningkat

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

Isu strategis merupakan suatu kondisi yang berpotensi menjadi masalah maupun menjadi peluang suatu daerah dimasa datang. Berkaitan dengan peran Dinas Kesehatan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, terutama dalam memberikan pelayanan di bidang kesehatan, Isu-isu yang perlu mendapat perhatian diidentifikasi sebagai berikut:

1. Masih tingginya kasus kematian ibu, bayi dan balita
2. Masih tingginya stunting dan gizi buruk
3. Belum semua masyarakat mendapat jaminan kesehatan
4. Belum maksimalnya pelayanan kesehatan
5. Belum maksimalnya pencapaian SPM kesehatan
6. Kurangnya SDM kesehatan baik kuantitas maupun kualitas

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan Jangka Menengah Perangkat Daerah

Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut. Tujuan yang ingin dicapai dalam pelaksanaan Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Klaten dalam kurun waktu tahun 2021-2026 sebagai berikut :

”Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat”

4.2. Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian outcome program Perangkat Daerah. Tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah beserta indikator kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Klaten disajikan dalam Tabel 4.1 sebagaimana berikut ini.

Tabel 4.1
Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

Tujuan 1	Sasaran 2	Indikator Tujuan/ Sasaran 3	Formula Indikator (Indikator Tujuan) dan Sumber Referensi Indikator 4	Satuan 5	Kondisi Awal		Target Kinerja Tujuan/ Sasaran Tahun Ke-				
					2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
					6	7	8	9	10	11	12
Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat		Usia harapan hidup	Usia perkiraan lama hidup rata-rata penduduk dengan asumsi tidak ada perubahan pola mortalitas menurut umur	Tahun	76,78	76,78	76,84	76,89	76,93	76,98	77,02
	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup	Jumlah kematian bayi (berumur kurang 1 tahun) pada tahun tertentu dibagi jumlah kelahiran hidup pada tahun tertentu dikali 1000	/1000 Kelahiran Hidup	9,34	10,01	10,00	9,98	9,96	9,93	9,91
		Angka Kematian Balita per 1000 kelahiran hidup	Jumlah Kematian Balita (berumur kurang 5 tahun) pada satu tahun tertentu dibagi Jumlah Kelahiran Hidup pada satu tahun tertentu dikali 1000	/1000 Kelahiran Hidup	1,52	1,59	1,57	1,54	1,51	1,48	1,46
		Kasus Kematian Ibu	Jumlah ibu hamil yang meninggal karena hamil, bersalin, dan nifas di suatu wilayah tertentu selama 1 tahun	orang	17	15	14	13	12	11	10
		Indeks Keluarga Sehat	Indeks yang dibentuk dari 12 indikator keluarga sehat (entri data di aplikasi keluar hasil IKS)	%	0,252	0,258	0,26	0,262	0,265	0,268	0,27

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1. Strategi

Strategi merupakan pernyataan-pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai serta selanjutnya dijabarkan dalam serangkaian kebijakan. Strategi yang digunakan dalam rangka pencapaian sasaran Dinas Kesehatan Kabupaten Klaten adalah sebagai berikut:

- 1) Peningkatan Kesehatan Ibu, Bayi dan Anak.
- 2) Peningkatan Indeks Keluarga Sehat (IKS)
- 3) Peningkatan upaya perbaikan gizi dan pencegahan stunting
- 4) Pencegahan dan pengendalian penyakit menular dan tidak menular.
- 5) Peningkatan pelayanan kesehatan yang paripurna, bermutu, terjangkau dan merata.
- 6) Peningkatan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS).
- 7) Menjamin ketersediaan dan pemerataan sumberdaya kesehatan
- 8) Peningkatan mutu sediaan farmasi, makanan minuman, alat kesehatan dan perbekalan kesehatan.
- 9) Peningkatan sistem informasi kesehatan
- 10) Pengelolaan pelayanan kesehatan lingkungan

5.2. Arah Kebijakan

Kebijakan adalah pedoman yang wajib dipatuhi dalam melakukan tindakan untuk melaksanakan strategi yang dipilih, agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran. Kebijakan yang diambil Dinas Kesehatan Kabupaten Klaten dalam rangka pelaksanaan strategi adalah sebagai berikut :

- 1) Menurunkan angka kematian ibu, bayi dan anak balita.
- 2) Meningkatkan kemitraan dengan lintas sektoral terkait
- 3) Meningkatkan Indeks Keluarga Sehat (IKS) melalui Program Indonesia Sehat Pendekatan Keluarga (PIS-PK)
- 4) Menurunkan kasus gizi buruk dan prevalensi stunting

- 5) Menurunkan angka kesakitan dan kematian penyakit menular dan tidak menular serta mengendalikan faktor resiko penyakit menular dan tidak menular serta meningkatkan surveilans.
- 6) Penguatan jejaring penanggulangan penyakit menular dan penyakit tidak menular
- 7) Pengendalian penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi.
- 8) Optimalisasi surveilans epidemiologi dan penanggulangan wabah.
- 9) Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, dengan cara meningkatkan akses pelayanan kesehatan bagi masyarakat utamanya penduduk miskin dengan pelayanan kesehatan dasar yang mudah, murah dan terjangkau oleh masyarakat di Puskesmas dan jaringannya.
- 10) Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan dengan dukungan peningkatan manajemen, sarana prasarana, SDM Kesehatan dan pembiayaan kesehatan.
- 11) Meningkatkan jumlah penduduk memiliki jaminan kesehatan untuk UHC (*Universal Health Coverage*)
- 12) Meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat dengan pemberdayaan dan partisipasi masyarakat secara aktif mandiri.
- 13) Meningkatkan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia kesehatan dan distribusi penempatan yang sesuai dan merata.
- 14) Memastikan ketersediaan obat, perbekalan kesehatan dan alat kesehatan
- 15) Meningkatkan pembinaan pengawasan obat, makanan minuman dan perbekalan kesehatan yang beredar di masyarakat
- 16) Meningkatkan perangkat dan pengelolaan sistem informasi kesehatan
- 17) Meningkatkan cakupan ODF dan STBM.

Keterkaitan antara strategi dan arah kebijakan Dinas kesehatan dalam lima tahun mendatang dicantumkan pada tabel berikut ini :

Tabel 5.1

Strategi dan Arah Kebijakan Jangka Menengah Pelayanan Dinas Kesehatan

Visi RPJMD : “Terwujudnya Kabupaten Klaten Yang Maju, Mandiri dan Sejahtera”			
Misi RPJMD yang terkait : Mewujudkan kualitas sumber daya manusia yang cerdas, sehat, berbudaya, dan responsif gender			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Peningkatan Kesehatan Ibu, Bayi dan Anak.	1. Menurunkan angka kematian ibu, bayi dan anak balita. 2. Meningkatkan kemitraan dengan lintas sektoral terkait
		Peningkatan Indeks Keluarga Sehat (IKS)	Meningkatkan Indeks Keluarga Sehat (IKS) melalui Program Indonesia Sehat Pendekatan Keluarga (PIS-PK)
		Peningkatan upaya perbaikan gizi dan pencegahan stunting	Menurunkan kasus gizi buruk dan prevalensi stunting
		Pencegahan dan pengendalian penyakit menular dan tidak menular	1. Menurunkan angka kesakitan dan kematian penyakit menular dan tidak menular serta mengendalikan faktor resiko penyakit menular dan tidak menular serta meningkatkan surveilan. 2. Penguatan jejaring penanggulangan penyakit menular dan penyakit tidak menular. 3. Pengendalian penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi dan vaksinasi Covid-19

Visi RPJMD : “Terwujudnya Kabupaten Klaten Yang Maju, Mandiri dan Sejahtera”			
Misi RPJMD yang terkait : Mewujudkan kualitas sumber daya manusia yang cerdas, sehat, berbudaya, dan responsif gender			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
			4. Optimalisasi surveilans epidemiologi dan penanggulangan wabah.
		Peningkatan pelayanan kesehatan yang paripurna, bermutu, terjangkau dan merata	<p>1. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, dengan cara meningkatkan akses pelayanan kesehatan bagi masyarakat utamanya penduduk miskin dengan pelayanan kesehatan dasar yang mudah, murah dan terjangkau oleh masyarakat di Puskesmas dan jaringannya.</p> <p>2. Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan dengan dukungan peningkatan manajemen, sarana prasarana, tenaga kesehatan dan pembiayaan kesehatan.</p> <p>3. Meningkatkan jumlah penduduk memiliki jaminan kesehatan untuk UHC (<i>Universal Health Coverage</i>)</p>
		Peningkatan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS).	Meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat dengan

Visi RPJMD : “Terwujudnya Kabupaten Klaten Yang Maju, Mandiri dan Sejahtera”			
Misi RPJMD yang terkait : Mewujudkan kualitas sumber daya manusia yang cerdas, sehat, berbudaya, dan responsif gender			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
			pemberdayaan dan partisipasi masyarakat secara aktif mandiri
		Menjamin ketersediaan dan pemerataan sumberdaya kesehatan	Meningkatkan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia kesehatan dan distribusi penempatan yang sesuai
		Peningkatan mutu sediaan farmasi, makanan minuman, alat kesehatan dan perbekalan kesehatan.	1. Peningkatan ketersediaan obat, perbekalan kesehatan dan alat kesehatan Meningkatkan kemitraan dengan lintas sektoral terkait. 2. Meningkatkan pembinaan pengawasan obat, makanan minuman dan perbekalan kesehatan yang beredar di masyarakat
		Peningkatan sistem informasi kesehatan	Meningkatkan perangkat dan pengelolaan sistem informasi kesehatan
		Peningkatan kualitas kesehatan lingkungan	Meningkatkan cakupan ODF dan STBM

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Sebagai perwujudan dari beberapa kebijakan dan strategi dalam rangka mencapai tujuan, maka langkah operasionalnya harus dituangkan ke dalam Program dan Kegiatan beserta Sub Kegiatan yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Kesehatan Kabupaten Klaten.

Yang dimaksud dengan Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah atau masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda). Sementara itu Kegiatan Perangkat Daerah adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam rangka mencapai hasil (*outcome*) suatu program.

Rencana Program dan Kegiatan Dinas Kesehatan yang akan dilaksanakan selama 5 (lima) tahun mendatang diuraikan sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

- a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - 1) Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah.
 - 2) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD.
 - 3) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD.
 - 4) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD.
 - 5) Sub Kegiatan Valuasi Kinerja Perangkat Daerah.
- b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - 1) Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN.
 - 2) Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN.
 - 3) Sub Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD.
 - 4) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD.
 - 5) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD.

- 6) Sub Kegiatan Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran.
- c. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - 1) Sub Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai.
 - 2) Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya.
- d. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - 1) Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor.
 - 2) Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor.
 - 3) Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan.
 - 4) Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu.
 - 5) Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.
- e. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - 1) Sub Kegiatan Pengadaan Mebel.
 - 2) Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.
- f. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - 1) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat.
 - 2) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik.
 - 3) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.
- g. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - 1) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan.
 - 2) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan.
 - 3) Sub Kegiatan Pemeliharaan mebel.
 - 4) Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya.
 - 5) Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.
- h. Kegiatan Peningkatan Pelayanan BLUD
 - 1) Sub Kegiatan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD.

2. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat

- a. Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten Kota.
 - 1) Sub Kegiatan Pembangunan Puskesmas
 - 2) Sub Kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas
 - 3) Sub Kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya
 - 4) Sub Kegiatan Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan
 - 5) Sub Kegiatan Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan
 - 6) Sub Kegiatan Pengadaan Obat, Vaksin
 - 7) Sub Kegiatan Pengadaan Bahan Habis Pakai
 - 8) Sub Kegiatan Pemeliharaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan
 - 9) Sub Kegiatan Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan
- b. Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota.
 - 1) Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil.
 - 2) Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin.
 - 3) Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir.
 - 4) Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita.
 - 5) Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar.
 - 6) Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif.
 - 7) Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut.
 - 8) Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi.
 - 9) Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus.
 - 10) Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat.
 - 11) Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis.
 - 12) Sub Kegiatan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi HIV.
 - 13) Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB).

- 14) Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/Atau Berpotensi Bencana.
 - 15) Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat.
 - 16) Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga.
 - 17) Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan.
 - 18) Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan.
 - 19) Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya.
 - 20) Sub Kegiatan Pengelolaan Surveilans Kesehatan.
 - 21) Sub Kegiatan Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus.
 - 22) Sub Kegiatan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular.
 - 23) Sub Kegiatan Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat.
 - 24) Sub Kegiatan Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Lab Rujukan/Nasional.
 - 25) Sub Kegiatan Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya.
 - 26) Sub Kegiatan Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota.
 - 27) Sub Kegiatan Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah.
 - 28) Sub Kegiatan Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT).
- c. Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi
- 1) Sub Kegiatan Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan.
 - 2) Sub Kegiatan Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan.
 - 3) Sub Kegiatan Pengadaan Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet.
- d. Kegiatan Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C dan D serta Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
- 1) Sub Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya.
 - 2) Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan

3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan

- a. Kegiatan Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota
 - 1) Sub Kegiatan Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan

- 2) Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan
- b. Kegiatan Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota
 - 1) Sub Kegiatan Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan
 - 2) Sub Kegiatan Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar
- c. Kegiatan Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
 - 1) Sub Kegiatan Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

4. Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman

- a. Kegiatan Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)
 - 1) Sub Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)
 - 2) Sub Kegiatan Penyediaan dan Pengelolaan Data Perizinan dan Tindak Lanjut Pengawasan Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)
- b. Kegiatan Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga
 - 1) Sub Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga
- c. Kegiatan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)

- 1) Sub Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain jasa boga, rumah makan/restoran dan Depot Air Minum (DAM)
- d. Kegiatan Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan
 - 1) Sub Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan Serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan
- e. Kegiatan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga
 - 1) Sub Kegiatan Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan

5. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan

- a. Kegiatan Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota
 - 1) Sub Kegiatan Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat
- b. Kegiatan Pelaksanaan Sehat dalam Rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota
 - 1) Sub Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat
- c. Kegiatan Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
 - 1) Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Dan Supervisi Pengembangan Dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)

Secara rinci rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif secara rinci tercantum pada Tabel 6.1 (terlampir).

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Bagian penting dalam proses penyusunan Renstra Dinas Kesehatan adalah ketersediaan indikator kinerja yang berguna untuk mengukur capaian target kinerja pembangunan daerah. Indikator kinerja adalah alat ukur untuk menilai keberhasilan pembangunan secara kuantitatif maupun kualitatif. Keberadaan indikator sangat penting baik dalam evaluasi kinerja program-program pembangunan daerah. Indikator kinerja menjadi kunci dalam pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kinerja, yaitu sebagai ukuran untuk menilai ketercapaian kinerja pembangunan daerah. Dalam perencanaan pembangunan daerah, indikator menjadi ukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan, serta program dan kegiatan yang telah dirumuskan dalam dokumen perencanaan.

7.1 Indikator Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah

Indikator kinerja penyelenggaraan urusan kesehatan adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai oleh Dinas Kesehatan dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Klaten. Target indikator kinerja Dinas Kesehatan yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD ini akan diukur dalam evaluasi kinerja pembangunan. Pencapaian kinerja indikator yang termuat juga akan menjadi bahan dalam pelaporan kinerja Dinas Kesehatan selama lima tahun, sehingga perlu dipedomani oleh seluruh aparatur Dinas Kesehatan

Indikator Kinerja penyelenggaraan urusan Dinas Kesehatan ditampilkan dalam Tabel 7.1 sebagai berikut:

Tabel 7.1**Indikator Kinerja Penyelenggaraan Urusan Tahun 2021-2026**

No	Indikator	Definisi Operasional/ Formulasi Indikator	Satuan	Kondisi Awal 2020	Target Capaian Setiap Tahun						Target Akhir RPJMD
					2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	Usia harapan hidup	Usia perkiraan lama hidup rata-rata penduduk dengan asumsi tidak ada perubahan pola mortalitas menurut umur	Tahun	76.78	76,78	76,84	76,89	76,93	76,98	77,02	77,02

7.2 Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah

Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi/instansi pemerintah daerah (Permenpan Nomor Per/09/M.PAN/5/2007). Dengan kata lain IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Tujuan dari ditetapkannya indikator kinerja utama bagi setiap instansi pemerintah adalah untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik; dan untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Dengan ditetapkannya indikator kinerja utama, instansi pemerintah dapat menggunakannya untuk beberapa dokumen, antara lain: perencanaan jangka menengah perencanaan tahunan, perencanaan anggaran, penyusunan dokumen penetapan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan akuntabilitas kinerja evaluasi kinerja instansi pemerintah, pemantauan dan pengendalian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan-kegiatan. Indikator kinerja utama Dinas Kesehatan dapat dilihat pada Tabel 7.2 di bawah ini :

Tabel 7.2
Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah

No	Indikator	Formula Indikator dan Sumber Referensi	Satuan	Kondisi Awal	Target Capaian Setiap Tahun						Target Akhir RPJMD
				2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup	Jumlah kematian bayi (berumur kurang 1 tahun) pada tahun tertentu dibagi jumlah kelahiran hidup pada tahun tertentu dikali 1000	/1000 Kelahiran Hidup	9,34	10,01	10,00	9,98	9,96	9,93	9,91	9,91
2	Angka Kematian Balita per 1000 kelahiran hidup	Jumlah Kematian Balita (berumur kurang 5 tahun) pada satu tahun tertentu dibagi Jumlah Kelahiran Hidup pada satu tahun tertentu dikali 1000	/1000 Kelahiran Hidup	1,52	1,59	1,57	1,54	1,51	1,48	1,46	1,46
3	Kasus Kematian Ibu	Jumlah ibu hamil yang meninggal karena hamil, bersalin, dan nifas di suatu wilayah tertentu selama 1 tahun	orang	17	15	14	13	12	11	10	10
4	Indeks Keluarga Sehat	Indeks yang dibentuk dari 12 indikator keluarga sehat (entri data di aplikasi keluar hasil IKS)	%	0,252	0,258	0,26	0,262	0,265	0,268	0,27	0,27

BAB VIII

PENUTUP

8.1. Pedoman Transisi

Masa berlaku Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kesehatan Tahun 2021–2026 adalah selama lima tahun. Untuk menjaga kesinambungan pembangunan serta mengisi kekosongan dokumen perencanaan pada masa transisi, maka Renstra Tahun 2021-2026 dapat digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Renja Dinas Kesehatan Tahun 2027, dengan tetap berpedoman pada RPJPD Kabupaten Klaten Tahun 2021 – 2026.

8.2. Kaidah Pelaksanaan

Beberapa kaidah pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kesehatan Tahun 2021–2026 yang perlu diatur sebagai berikut:

1. Sekretariat dan bidang-bidang pada Dinas Kesehatan agar mendukung pencapaian target-target Renstra dan melaksanakan program dan kegiatan yang tercantum Renstra dengan sebaik-baiknya.
2. Diharapkan seluruh aparatur di Sekretariat dan bidang-bidang pada Dinas Kesehatan dapat menjalin koordinasi dan kerjasama yang baik, sehingga tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra ini dapat tercapai.
3. Renstra akan dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan yang merupakan dokumen perencanaan tahunan dalam kurun waktu tahun 2021 hingga tahun 2026. Untuk menjaga konsistensi dan keselarasan kebijakan, program dan kegiatan, maka Penyusunan Renja wajib berpedoman pada Renstra.
4. Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta memastikan pencapaian target-target Renstra, maka perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan, pelaksanaan dan hasil program dan kegiatan Renstra secara berkala.
5. Apabila terjadi perubahan kebijakan pembangunan di tingkat nasional dan atau daerah, maka dapat dilakukan perubahan Dinas Kesehatan sesuai dengan kaidah dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

LAMPIRAN

TABEL 6.1. RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN BESERTA PENDANAAN PADA RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) DINAS KESEHATAN KABUPATEN KLATEN TAHUN 2021-2026

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Formula/Rumus Perhitungan Indikator Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2020)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2021)	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Penanggung jawab				
								Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		target	Rp	target	Rp		target	Rp	target	Rp
								target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp									
Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)							
				Usia harapan hidup	Usia perkiraan lama hidup rata-rata penduduk dengan asumsi tidak ada perubahan pola mortalitas menurut umur	76,78 Tahun	76,78 Tahun	76,84 Tahun		76,89 Tahun		76,93 Tahun		76,98 Tahun		77,02 Tahun		77,02 Tahun	Dinas Kesehatan							
Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat				Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup	Jumlah kematian bayi (berumur kurang 1 tahun) pada tahun tertentu dibagi jumlah kelahiran hidup pada tahun tertentu dikali 1000	9,34/1000 kelahiran hidup	9,09 /1000 kelahiran hidup	10,00/1000 kelahiran hidup		9,98/1000 kelahiran hidup		9,96 /1000 kelahiran hidup		9,93/1000 kelahiran hidup		9,91 /1000 kelahiran hidup		9,91 /1000 kelahiran hidup	Dinas Kesehatan							
				Angka Kematian Balita per 1000 kelahiran hidup	Jumlah Kematian Balita (berumur kurang 5 tahun) pada satu tahun tertentu dibagi Jumlah Kelahiran Hidup pada satu tahun tertentu dikali 1000	1,52 /1000 kelahiran hidup	1,44 /1000 kelahiran hidup	1,57 /1000 Kelahiran Hidup		1,54 /1000 Kelahiran Hidup		1,51 /1000 Kelahiran Hidup		1,48 /1000 Kelahiran Hidup		1,46 /1000 Kelahiran Hidup		1,46 /1000 Kelahiran Hidup	Dinas Kesehatan							
				Kasus Kematian Ibu	Jumlah ibu hamil yang meninggal karena hamil, bersalin, dan nifas di suatu wilayah tertentu selama 1 tahun	17 orang	12 orang	14 orang		13 orang		12 orang		11 orang		10 orang		10 orang	Dinas Kesehatan							
				Indeks Keluarga Sehat	Indeks yang dibentuk dari 12 indikator keluarga sehat (entri data di aplikasi keluar hasil IKS)	0,292%	0,295%	0,26 %		0,26 %		0,27 %		0,27 %		0,27 %		0,27 %	Dinas Kesehatan							
		1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja yang tersusun dibagi jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja yang direncanakan dikali 100	100%	100%	100 %	301.768.090.000	100 %	294.320.104.000	100 %	299.041.572.000	100 %	292.977.977.000	100 %	290.186.366.000	100 %	1.478.294.109.000	Dinas Kesehatan						
		1.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja yang tersusun	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja yang tersusun dibagi jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja yang direncanakan dikali 100	100 %	100 %	100 %	220.590.000	100 %	220.590.000	100 %	220.590.000	100 %	223.490.000	100 %	226.448.000	100 %	1.111.708.000	Dinas Kesehatan						
		1.02.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang tersusun	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang tersusun	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang tersusun	11 dokumen	11 dokumen	11 dokumen	95.590.000	11 dokumen	95.590.000	11 dokumen	95.590.000	11 dokumen	95.990.000	11 dokumen	96.398.000	55 dokumen	479.158.000	Dinas Kesehatan, RSD Bagas Waras						
		1.02.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RRA-SKPD	Jumlah Dokumen RRA-SKPD tersusun	Jumlah Dokumen RRA-SKPD tersusun	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	50.000.000	2 dokumen	50.000.000	2 dokumen	50.000.000	2 dokumen	51.000.000	2 dokumen	52.020.000	10 dokumen	253.020.000	Dinas Kesehatan						
		1.02.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD tersusun	Jumlah Dokumen DPA-SKPD tersusun	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	30.000.000	2 dokumen	30.000.000	2 dokumen	30.000.000	2 dokumen	30.600.000	2 dokumen	31.212.000	10 dokumen	151.812.000	Dinas Kesehatan						
		1.02.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Kinerja Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen LKIP tersusun	Jumlah dokumen LKIP tersusun	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	15.000.000	1 dokumen	15.000.000	1 dokumen	15.000.000	1 dokumen	15.300.000	1 dokumen	15.608.000	5 dokumen	75.906.000	Dinas Kesehatan						
		1.02.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah tersusun	Jumlah dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah tersusun	29 dokumen	15 dokumen	29 dokumen	30.000.000	29 dokumen	30.000.000	29 dokumen	30.000.000	29 dokumen	30.600.000	29 dokumen	31.212.000	145 dokumen	151.812.000	Dinas Kesehatan						
		1.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pembayaran gaji, tunjangan ASN dan penyelesaian laporan keuangan tepat waktu	Jumlah pembayaran gaji, tunjangan ASN dan penyelesaian laporan keuangan tepat waktu dibagi jumlah pembayaran gaji, tunjangan ASN dan laporan keuangan dikali 100	100 %	100 %	100 %	154.761.983.000	100 %	156.570.675.000	100 %	157.444.535.000	100 %	157.444.535.000	100 %	158.492.172.000	100 %	784.713.900.000	Dinas Kesehatan						
		1.02.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang terbayarkan gaji dan tunjangan	Jumlah ASN yang terbayarkan gaji dan tunjangan	1.307 orang	1.307 orang	1.307 orang	154.641.983.000	1.381 orang	156.450.675.000	1.401 orang	157.314.535.000	1.416 orang	157.314.535.000	1.416 orang	158.362.172.000	1.416 orang	784.083.900.000	Dinas Kesehatan						
		1.02.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah pembayaran Honor KPA, PPTKA, PPA SKPD, Bendahara pengeluaan, bendahara penerimaan, bendahara pengeluaran pembantu dan bendahara penerimaan pembantu	Jumlah pembayaran Honor KPA, PPTKA, PPA SKPD, Bendahara pengeluaan, bendahara penerimaan, bendahara pengeluaran pembantu dan bendahara penerimaan pembantu	0	0	12 bulan	60.000.000	12 bulan	60.000.000	12 bulan	60.000.000	12 bulan	60.000.000	12 bulan	60.000.000	12 bulan	300.000.000	Dinas Kesehatan						
		1.02.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi SKPD yang tersusun	Jumlah dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi SKPD yang tersusun	Jumlah dokumen Penatausahaan Keuangan SKPD yang tersusun	0	0	125 dokumen	40.000.000	125 dokumen	40.000.000	125 dokumen	50.000.000	125 dokumen	50.000.000	125 dokumen	50.000.000	625 dokumen	230.000.000	Dinas Kesehatan						
		1.02.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	0	0	1 dokumen	20.000.000	1 dokumen	20.000.000	1 dokumen	20.000.000	1 dokumen	20.000.000	1 dokumen	20.000.000	5 dokumen	100.000.000	Dinas Kesehatan						
		1.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase penyelesaian administrasi kepegawaian tepat waktu	Jumlah administrasi kepegawaian yang diselesaikan tepat waktu dibagi jumlah administrasi kepegawaian dikali 100	100 %	100 %	100 %	185.000.000	100 %	110.000.000	100 %	110.000.000	100 %	112.200.000	100 %	114.444.000	100 %	631.644.000	Dinas Kesehatan						
		1.02.01.2.05.01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai yang diadakan	Jumlah Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai yang diadakan	Jumlah Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai yang diadakan	101 Orang	101 Orang	101 Orang	110.000.000	101 Orang	110.000.000	101 Orang	110.000.000	101 Orang	112.200.000	101 Orang	114.444.000	505 Orang	556.644.000	Dinas Kesehatan						
		1.02.01.2.05.02	Pengadaan Paksiain Dinas Beserta Alat Kelengkapannya	Jumlah Pengadaan Paksiain Dinas Beserta Alat Kelengkapannya	Jumlah Pengadaan Paksiain Dinas Beserta Alat Kelengkapannya	0	0	145 stel	75.000.000	stel	-	stel	-	stel	-	stel	-	145 stel	75.000.000	Dinas Kesehatan						
		1.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah tepat waktu	Jumlah kebutuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang terpenuhi tepat waktu dibagi jumlah kebutuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah satu tahun dikali 100	100 %	100 %	100 %	469.000.000	100 %	479.000.000	100 %	469.000.000	100 %	469.000.000	100 %	469.000.000	100 %	2.356.000.000	Dinas Kesehatan						
		1.02.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang tersedia	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang tersedia	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang tersedia	10 unit	10 unit	10 unit	25.000.000	10 unit	25.000.000	10 unit	25.000.000	10 unit	25.000.000	10 unit	25.000.000	50 unit	125.000.000	Dinas Kesehatan						
		1.02.01.2.06.02	Penyediaan Perlatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Perlatan dan Perlengkapan Kantor tersedia	Jumlah Perlatan dan Perlengkapan Kantor tersedia	15 unit	15 unit	15 unit	30.000.000	15 unit	30.000.000	15 unit	30.000.000	15 unit	30.000.000	15 unit	30.000.000	75 unit	150.000.000	Dinas Kesehatan						
		1.02.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan tersedia	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan tersedia	130.000 eksemplar	130.000 eksemplar	130.000 eksemplar	39.000.000	130.000 eksemplar	39.000.000	130.000 eksemplar	39.000.000	130.000 eksemplar	39.000.000	130.000 eksemplar	39.000.000	650.000 eksemplar	195.000.000	Dinas Kesehatan						
		1.02.01.2.06.08	Facilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Kunjungan Tamu terfasilitasi	Jumlah Kunjungan Tamu terfasilitasi	600 kali	600 kali	600 kali	125.000.000	600 kali	125.000.000	600 kali	125.000.000	600 kali	125.000.000	600 kali	125.000.000	3.000 kali	625.000.000	Dinas Kesehatan						
		1.02.01.2.06.09	Penyenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100 kali	100 kali	100 kali	250.000.000	100 kali	260.000.000	100 kali	250.000.000	100 kali	250.000.000	100 kali	250.000.000	500 kali	1.260.000.000	Dinas Kesehatan						
		1.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah tepat waktu	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah tepat waktu dibagi jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dalam 1 tahun dikali 100	100 %	100 %	100 %	2.450.000.000	100 %	452.000.000	100 %	450.000.000	100 %	450.000.000	100 %	450.000.000	100 %	4.252.000.000	Dinas Kesehatan						
		1.02.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Mebel yang diadakan	Jumlah Mebel yang diadakan	73 unit	73 unit	73 unit	200.000.000	75 unit	200.000.000	75 unit	200.000.000	75 unit	200.000.000	75 unit	200.000.000	373 unit	1.000.000.000	Dinas Kesehatan						
		1.02.01.2.07.06	Pengadaan Perlatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Perlatan dan Mesin Lainnya yang diadakan	Jumlah Perlatan dan Mesin Lainnya yang diadakan	20 unit	20 unit	20 unit	200.000.000	20 unit	200.000.000	20 unit	200.000.000	20 unit	200.000.000	20 unit	200.000.000	100 unit	1.000.000.000	Dinas Kesehatan						
		1.02.01.2.07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dibangun	Jumlah Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dibangun	1 unit	1 unit	1 unit	2.000.000.000	unit	-	unit	-	unit	-	unit	-	1 unit	2.000.000.000	Dinas Kesehatan						

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Formula/Rumus Perhitungan Indikator Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2020)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2021)	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Peringkat Daerah		Unit Kerja Penanggung jawab		
								Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026			target	Rp
								target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		target	Rp
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	
		1.02.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang diadakan	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang diadakan	10 unit	10 unit	10 unit	50.000.000	10 unit	52.000.000	10 unit	50.000.000	10 unit	50.000.000	10 unit	50.000.000	50 unit	252.000.000	Dinas Kesehatan
		1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Ususan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan Jasa Penunjang Ususan Pemerintahan Daerah tepat waktu	Jumlah kebutuhan Jasa Penunjang Ususan Pemerintahan Daerah yang terpenuhi tepat waktu dibagi Jumlah kebutuhan Jasa Penunjang Ususan Pemerintahan Daerah dalam 1 tahun dikali 100	100 %	100 %	100 %	5.550.000.000	100 %	5.565.000.000	100 %	5.565.000.000	100 %	5.565.000.000	100 %	5.565.000.000	100 %	27.810.000.000	Dinas Kesehatan
		1.02.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat Terkirim	Jumlah Surat Terkirim	6000 eksemplar	4281 eksemplar	6.000 eksemplar	15.000.000	6.000 eksemplar	15.000.000	6.000 eksemplar	15.000.000	6.000 eksemplar	15.000.000	6.000 eksemplar	15.000.000	30.000 eksemplar	75.000.000	Dinas Kesehatan
		1.02.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang terbayar	Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang terbayar	12 bulan	6bulan	12 bulan	385.000.000	12 bulan	400.000.000	12 bulan	400.000.000	12 bulan	400.000.000	12 bulan	400.000.000	12 bulan	1.985.000.000	Dinas Kesehatan
		1.02.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Honor Jasa Pelayanan Umum Kantor	Honor Jasa Pelayanan Umum Kantor terbayar	233 orang	233 orang	233 orang	5.150.000.000	234 orang	5.150.000.000	236 orang	5.150.000.000	236 orang	5.150.000.000	236 orang	5.150.000.000	236 orang	25.750.000.000	Dinas Kesehatan, RSD Bagas Waras, Puskesmas
		1.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Ususan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Ususan Pemerintahan Daerah yang terpelihara	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Ususan Pemerintahan Daerah yang terpelihara dibagi Barang Milik Daerah Penunjang Ususan Pemerintahan Daerah dikali 100	100 %	100 %	100 %	788.123.000	100 %	671.000.000	100 %	676.000.000	100 %	670.088.000	100 %	682.900.000	100 %	3.488.081.000	Dinas Kesehatan
		1.02.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan terpelihara dan pajaknya terbayar	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan terpelihara dan pajaknya terbayar	47 unit	20 unit	47 unit	150.000.000	47 unit	153.000.000	47 unit	156.000.000	47 unit	150.058.000	47 unit	162.000.000	47 unit	771.058.000	Dinas Kesehatan
		1.02.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinannya	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan terpelihara serta pajak dan perizinannya terbayar	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan terpelihara serta pajak dan perizinannya terbayar	47 unit	25 unit	47 unit	275.475.000	47 unit	273.000.000	47 unit	275.000.000	47 unit	275.000.000	47 unit	275.000.000	47 unit	1.373.475.000	Dinas Kesehatan
		1.02.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel terpelihara	Jumlah Mebel terpelihara	15 unit	10 unit	15 unit	20.000.000	15 unit	20.000.000	15 unit	20.000.000	15 unit	20.000.000	15 unit	20.400.000	15 unit	100.400.000	Dinas Kesehatan
		1.02.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya terpelihara	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya terpelihara	20 unit	10 unit	20 unit	25.000.000	22 unit	25.000.000	24 unit	25.000.000	26 unit	25.000.000	28 unit	25.500.000	28 unit	125.500.000	Dinas Kesehatan
		1.02.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya terpelihara/terpelihara	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya terpelihara/terpelihara	3 unit	3 unit	3 unit	317.648.000	3 unit	200.000.000	3 unit	200.000.000	3 unit	200.000.000	3 unit	200.000.000	3 unit	1.117.648.000	Dinas Kesehatan, RSD Bagas Waras, Puskesmas
		1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase layanan BLUD sesuai SOP	Jumlah layanan BLUD sesuai SOP dibagi Jumlah layanan BLUD dikali 100	100 %	100 %	100 %	137.343.394.000	100 %	130.251.839.000	100 %	134.106.447.000	100 %	128.043.694.000	100 %	124.186.402.000	100 %	653.931.776.000	Dinas Kesehatan, RSD Bagas Waras, Puskesmas
		1.02.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	68 layanan	68 layanan	68 layanan	137.343.394.000	69 layanan	130.251.839.000	69 layanan	134.106.447.000	69 layanan	128.043.694.000	69 layanan	124.186.402.000	69 layanan	653.931.776.000	Dinas Kesehatan, RSD Bagas Waras, Puskesmas
		1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Ibu Hamil yang mendapatkan layanan kesehatan Ibu hamil	Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan dibagi Jumlah ibu hamil di kabupaten/kota dikali 100 %	93,44%	42,33%	100 %	86.465.858.000	100 %	104.205.633.000	100 %	108.668.574.000	100 %	101.591.433.000	100 %	94.170.760.000	100 %	495.102.258.000	Dinas Kesehatan
				Persentase Ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan persalinan dibagi jumlah ibu bersalin di kabupaten/kota dikali 100 %	99,99%	45,32%	100 %		100 %		100 %		100 %		100 %		100 %	Dinas Kesehatan	
				Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar dibagi jumlah bayi baru lahir di kabupaten/kota dikali 100 %	96,70%	43,54%	100 %		100 %		100 %		100 %		100 %		100 %	Dinas Kesehatan	
				Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	Jumlah balita yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar dibagi Jumlah balita	92,71%	45,33%	100 %		100 %		100 %		100 %		100 %		100 %	Dinas Kesehatan	
				Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar dibagi jumlah anak usia pendidikan dasar di kabupaten/kota dikali 100 %	31,13%	4,16%	100 %		100 %		100 %		100 %		100 %		100 %	Dinas Kesehatan	
				Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	Jumlah orang usia 15-59 tahun yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar dibagi jumlah orang usia 15-59 tahun di kabupaten/kota dikali 100 %	73,26%	37%	100 %		100 %		100 %		100 %		100 %		100 %	Dinas Kesehatan	
				Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	Jumlah warga negara usia 60 tahun yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar dibagi jumlah orang warga negara usia 60 tahun di kabupaten/kota dikali 100 %	73,14%	42,81%	100 %		100 %		100 %		100 %		100 %		100 %	Dinas Kesehatan	
				Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Jumlah penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar dibagi jumlah penderita hipertensi di kabupaten/kota dikali 100 %	52,28%	21%	100 %		100 %		100 %		100 %		100 %		100 %	Dinas Kesehatan	
				Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Jumlah penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar dibagi jumlah penderita DM di kabupaten/kota dikali 100 %	90,76%	56%	100 %		100 %		100 %		100 %		100 %		100 %	Dinas Kesehatan	
				Persentase ODGI berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jwa sesuai standar	Jumlah penderita ODGI yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar dibagi jumlah penderita ODGI di kabupaten/kota dikali 100 %	88,32%	51,82%	100 %		100 %		100 %		100 %		100 %		100 %	Dinas Kesehatan	
				Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	Jumlah terduga TBC yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar dibagi jumlah perkiraan terduga TBC di kabupaten/kota dikali 100 %	29,28%	3,23%	100 %		100 %		100 %		100 %		100 %		100 %	Dinas Kesehatan	
				Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	Jumlah orang dengan resiko terinfeksi HIV yang mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar dibagi jumlah orang dengan	84,08%	52,68%	100 %		100 %		100 %		100 %		100 %		100 %	Dinas Kesehatan	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Formula/Rumus Perhitungan Indikator Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2020)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2021)	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkit Daerah		Unit Kerja Penanggung jawab		
								Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026			target	Rp
								target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	
				Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah lima tahun/balita	Jumlah anak balita pendek dan sangat pendek pada waktu tertentu dibagi dengan jumlah anak balita 0 - 59 bulan pada waktu yang sama dikali 100%	10,61%	10,42%	11,3 %		11 %		10,7 %		10,5 %		10,3 %		10,3 %	Dinas Kesehatan	
				Cakupan STBM	Jumlah Desa / Kelurahan yang telah melaksanakan 5 Pilar STBM dibagi Jumlah Seluruh Desa / Kelurahan x 100%	24,90%	27,40%	70 %		90 %		100 %		100 %		100 %		100 %	Dinas Kesehatan	
				Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	Jumlah Desa / Kelurahan UCI dibagi Jumlah Seluruh Desa / Kelurahan x100%	100%	41,18%	100 %		100 %		100 %		100 %		100 %		100 %	Dinas Kesehatan	
				Cakupan KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam	Jumlah KLB dibagi Jumlah KLB yang ditangani kurang dari 24 jam dikali 100%	100%	100%	100 %		100 %		100 %		100 %		100 %		100 %	Dinas Kesehatan	
				Cakupan balita pneumonia yang ditangani	Jumlah penderita pneumonia balita yang ditangani di suatu wilayah kerja pada kurun waktu satu tahun dibagi Jumlah perkiraan penderita pneumonia balita di suatu wilayah kerja pada kurun waktu yang sama/kerja pada kurun waktu yang sama x100%	24,50%	6,10%	12 %		15 %		20 %		25 %		30 %		30 %	Dinas Kesehatan	
				Penderita diare yang ditangani	Jumlah penderita diare yang datang dan dilayani disaran kesehatan dan kader di suatu wilayah tertentu dalam waktu satu tahun dibagi Jumlah perkiraan penderita diare pada satu wilayah tertentu dalam waktu yang sama 100% dari angka kesakitan diare x jumlah penduduk x100%	6,20%	1,2	6 %		7 %		8 %		9 %		10 %		10 %	Dinas Kesehatan	
				Angka Kejadian HIV	Jumlah Infeksi baru HIV pada populasi usia lebih dari 15 tahun dibagi dengan jumlah penduduk usia lebih dari 15 tahun yang tidak terkena HIV dikali 1000	0,15 /1000 penduduk yang tidak terinfeksi HIV	0,07 /1000 penduduk yang tidak terinfeksi HIV	0,19 /1000 penduduk yang tidak terinfeksi HIV		0,18 /1000 penduduk yang tidak terinfeksi HIV		0,18 /1000 penduduk yang tidak terinfeksi HIV		0,18 /1000 penduduk yang tidak terinfeksi HIV		0,18 /1000 penduduk yang tidak terinfeksi HIV		0,18 /1000 penduduk yang tidak terinfeksi HIV	Dinas Kesehatan	
				Insiden Tuberkulosis (TB) per 100.000 penduduk	Jumlah semua kasus TB baru dan kambuh pada waktu tertentu dibagi jumlah penduduk pada periode waktu yang sama kemudian dikali 100.000	58,4 /100.000 penduduk	25,5 /100.000 penduduk	35 /100.000 penduduk		40 /100.000 penduduk		45 /100.000 penduduk		50 /100.000 penduduk		55 /100.000 penduduk		55 /100.000 penduduk	Dinas Kesehatan	
				Angka kejadian Malaria	Penduduk yang menderita malaria pada tahun tertentu dibagi jumlah penduduk beresiko pada kurun waktu 1 tahun x 100.000	0,8	0,6	< 1 /100.000		< 1 /100.000		< 1 /100.000		< 1 /100.000		< 1 /100.000		< 1 /100.000	Dinas Kesehatan	
				Persentase orang yang memerlukan intervensi terhadap penyakit tropis yang terabaikan (Filariasis dan Kusta)	Cara Perhitungan Kusta: Jumlah kasus baru tanpa cacat yang ditemukan dan diobati dibagi semua kasus baru kusta yang diobati dikali 100%	70,60%	100%	10 %		10 %		10 %		10 %		10 %		10 %	Dinas Kesehatan	
				Angka Kejadian DBD	Penduduk yang menderita DBD pada tahun tertentu dibagi jumlah penduduk beresiko pada kurun waktu 1 tahun x 100.000	33,45 /100.000	7,9/100.000	20 /100.000		20 /100.000		20 /100.000		20 /100.000		20 /100.000		20 /100.000	Dinas Kesehatan	
				Persentase Penduduk Memiliki JKN untuk mencapai UHC (Universal Health Coverage)	Jumlah Penduduk Memiliki JKN dibagi Jumlah Penduduk dikali 100	89%	91%	95 %		95 %		95 %		95 %		95 %		95 %	Dinas Kesehatan	
				Persentase Puskesmas terakreditasi minimal Madya	Jumlah Puskesmas terakreditasi minimal Madya dibagi Jumlah Puskesmas dikali 100	100%	97%	100 %		100 %		100 %		100 %		100 %		100 %	Dinas Kesehatan	
				Persentase RSUD terakreditasi minimal Madya	Persentase RSUD terakreditasi minimal madya	100%	100%	100 %		100 %		100 %		100 %		100 %		100 %	RSD Bagas Waras	
				Persentase puskesmas terpenuhi obat dan vaksin	Jumlah puskesmas terpenuhi obat dan vaksin dibagi jumlah puskesmas dibagi 100 %	100%	100%	100 %		100 %		100 %		100 %		100 %		100 %	Dinas Kesehatan	
				Persentase pelayanan lab klinis dan lab air	Jumlah masyarakat meminta pelayanan dibagi jumlah terlayani dikali 100%	100%	100%	100 %		100 %		100 %		100 %		100 %		100 %	Dinas Kesehatan	
				Persentase Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Sistem Informasi Kesehatan yang digunakan dibagi jumlah SIK yang seharusnya digunakan dikali 100%	60%	60%	60 %		70 %		80 %		80 %		80 %		80 %	Dinas Kesehatan	
	1.02.02.2.01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan tersedia dan terpelihara	Jumlah fasilitas pelayanan kesehatan tersedia dan terpelihara dibagi Jumlah fasilitas pelayanan kesehatan yang direncanakan tersedia dan terpelihara dikali 100%	100 %	50 %	100 %		100 %		100 %		100 %		100 %		100 %	196.464.850,000	
	1.02.02.2.01.02		Pembangunan Puskesmas	Jumlah gedung puskesmas terbangun	Jumlah gedung puskesmas terbangun	1 unit	1 unit	3 unit		3 unit		3 unit		3 unit		3 unit		3 unit	8.000.000.000	
	1.02.02.2.01.05		Pengembangan Rumah Sakit	Jumlah gedung RS yang dikembangkan	Jumlah gedung RS yang dikembangkan	0	0	unit		1 unit		200.000.000		1 unit		75.000.000		1 unit	100.000.000	
	1.02.02.2.01.06		Pengembangan Puskesmas	Jumlah puskesmas yang dikembangkan kelasnya	Jumlah puskesmas yang dikembangkan kelasnya	1 buah	1 buah	buah		1 buah		15.188.235.000		1 buah		16.000.000.000		1 buah	13.000.000.000	
	1.02.02.2.01.08		Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit	Jumlah gedung RS yang direhab/dipelihara	Jumlah gedung RS yang direhab/dipelihara	0	0	unit		2 unit		150.000.000		2 unit		75.000.000		2 unit	100.000.000	
	1.02.02.2.01.09		Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	Jumlah gedung puskesmas terahab	Jumlah gedung puskesmas terahab	0	0	2 unit		2 unit		1.500.000.000		2 unit		1.400.000.000		2 unit	1.400.000.000	
	1.02.02.2.01.10		Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah puskesmas pembantu terahab	Jumlah puskesmas pembantu terahab	7 unit	7 unit	7 unit		7 unit		1.500.000.000		7 unit		1.400.000.000		7 unit	1.400.000.000	
	1.02.02.2.01.12		Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Sarana Fasilitas Kesehatan tersedia	Jumlah Sarana Fasilitas Kesehatan tersedia	2 unit	2 unit	2 unit		2 unit		8.000.000.000		2 unit		7.000.000.000		4 unit	7.075.000.000	
	1.02.02.2.01.13		Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah jenis prasarana dan pendukung fasilitas pelayanan kesehatan tersedia	Jumlah jenis prasarana dan pendukung fasilitas pelayanan kesehatan tersedia	2 jenis	2 jenis	2 jenis		2 jenis		650.000.000		2 jenis		650.000.000		4 jenis	800.000.000	
	1.02.02.2.01.14		Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medis Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah alat kesehatan tersedia	Jumlah alat kesehatan tersedia	25 unit	25 unit	25 unit		25 unit		4.272.496.000		25 unit		4.296.748.000		25 unit	3.633.172.000	
	1.02.02.2.01.15		Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi	Jumlah Alat Kesehatan dikalibrasi	Jumlah Alat Kesehatan dikalibrasi	30 unit	30 unit	30 unit		30 unit		100.000.000		30 unit		110.000.000		30 unit	121.000.000	
	1.02.02.2.01.16		Pengadaan Obat, Vaksin	Jumlah jenis obat dan vaksin tersedia	Jumlah jenis obat dan vaksin tersedia	20 jenis	20 jenis	20 jenis		20 jenis		3.000.000.000		20 jenis		3.586.139.000		20 jenis	2.900.000.000	
	1.02.02.2.01.17		Pengadaan Bahan Habis Pakai	Jumlah Jenis Bahan Habis Pakai tersedia	Jumlah Jenis Bahan Habis Pakai tersedia	20 jenis	20 jenis	20 jenis		20 jenis		3.500.000.000		20 jenis		3.500.000.000		20 jenis	2.900.000.000	
	1.02.02.2.01.18		Pemeliharaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah jenis sarana fasilitas pelayanan kesehatan terpelihara	Jumlah jenis sarana fasilitas pelayanan kesehatan terpelihara	2 jenis	2 jenis	2 jenis		2 jenis		300.000.000		2 jenis		300.000.000		4 jenis	430.000.000	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Formula/Rumus Perhitungan Indikator Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2020)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2021)	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Penanggung jawab
								Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		target	Rp	
								target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp			
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	
		1.02.02.2.01.19	Pemeliharaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah prasarana dan pendukung fasilitas pelayanan kesehatan terpelihara	Jumlah prasarana dan pendukung fasilitas pelayanan kesehatan terpelihara	jenis	jenis	jenis	jenis	jenis	2 jenis	100.000.000	2 jenis	75.000.000	2 jenis	100.000.000	2 jenis	275.000.000	Dinas Kesehatan	
		1.02.02.2.01.20	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medis Fasilitas Pelayanan Kesehatan terpelihara	Jumlah Jenis Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medis Fasilitas Pelayanan Kesehatan terpelihara	Jumlah Jenis Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medis Fasilitas Pelayanan Kesehatan terpelihara	2 jenis	2 jenis	2 jenis	250.000.000	2 jenis	250.000.000	4 jenis	375.000.000	4 jenis	377.500.000	4 jenis	432.750.000	4 jenis	1.685.250.000	Dinas Kesehatan
		1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase balita gizi buruk	Jumlah balita gizi buruk (BB/TB) dibagi jumlah seluruh balita di wilayah dikali 100%	0,34%	0,40%	0,45 %	55.060.862.000	0,4 %	58.552.650.000	0,35 %	61.485.963.000	0,3 %	59.341.033.000	0,25 %	63.465.500.000	0,25 %	297.908.008.000	Dinas Kesehatan
				Prevalensi balita gizi kurang	Jumlah balita gizi kurang dan sangat kurang (BB/U) dibagi jumlah seluruh balita di wilayah dikali 100%	8,44%	7,88%	8 %		7,8 %		7,5 %		7,3 %		7,1 %		7,1 %	Dinas Kesehatan	
				Prevalensi malnutrisi (berat badan/tinggi badan) anak pada usia kurang dari 5 tahun, berdasarkan tpe.	Jumlah balita gizi buruk dan gizi kurus (BB/TB) dibagi jumlah seluruh balita di wilayah dikali 100%	4,32%	4,31%	4,8 %		4,6 %		4,4 %		4,2 %		4 %		4 %	Dinas Kesehatan	
				Prevalensi anemia pada ibu hamil	Jumlah ibu hamil dengan Hb<11 mg/dl dibagi jumlah seluruh ibu hamil di wilayah dikali 100%	9,53%	10,24%	10 %		10 %		10 %		10 %		9 %		9 %	Dinas Kesehatan	
				Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapatkan ASI eksklusif.	Jumlah bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapatkan ASI eksklusif dibagi jumlah bayi usia kurang dari 6 bulan di wilayah dikali 100	85,78%	87,37%	84,3 %		84,5 %		84,7 %		85 %		85,2 %		85,2 %	Dinas Kesehatan	
				Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan	Jumlah Balita Gizi Buruk mendapat perawatan dibagi Jumlah Balita Gizi Buruk dikali 100	100%	100%	80 %		85 %		90 %		95 %		100 %		100 %	Dinas Kesehatan	
				Cakupan Kunjungan Bayi	Jumlah kunjungan bayi di satu wilayah tertentu selama 1 tahun dibagi jumlah seluruh bayi lahir hidup di satu wilayah selama 1 tahun dikali 100%	96,89%	45,73%	98,09 %		98,11 %		98,12 %		98,14 %		98,16 %		98,16 %	Dinas Kesehatan	
				Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani	jumlah neonatus dengan komplikasi ditangani dibagi jumlah seluruh neonatus dengan komplikasi yang ada dikali 100%	55,63%	27,90%	56,05 %		56,08 %		57 %		57,2 %		57,4 %		57,4 %	Dinas Kesehatan	
				Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani	Jumlah komplikasi kebidanan yang mendapat penanganan difinisi di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu dibagi Jumlah ibu dengan komplikasi kebidanan di satu wilayah kerja pada kurun waktu yang sama x 100%	84,40%	42,12%	83,3 %		83,35 %		83,37 %		83,39 %		83,4 %		83,4 %	Dinas Kesehatan	
				Cakupan pelayanan nifas	Jumlah peserta ibu nifas yang telah memperoleh 3 kali pelayanan nifas sesuai standar di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu dibagi seluruh ibu nifas di satu wilayah kerja dalam kurun waktu yang sama dikali 100%	96,92%	43,30%	97,57 %		97,59 %		98 %		98,2 %		98,4 %		98,4 %	Dinas Kesehatan	
				Persentase tatanan yang dilaksanakan pembinaan menuju Kabupaten Kota Sehat	Jumlah tatanan yang dilaksanakan pembinaan menuju kabupaten kota sehat dibagi jumlah seluruh tatanan dikali 100%	0	0	30 %		40 %		50 %		60 %		60 %		60 %	Dinas Kesehatan	
				Persentase anak usia 1 tahun yang dimunisasi campak	Jumlah anak usia 1 tahun yang mendapat munisasi campak di suatu wilayah selama 1 tahun dibagi Jumlah anak usia 1 tahun pada wilayah dan tahun yang sama dikali 100%	95,45%	25,90%	94,1 %		94,6 %		95 %		95 %		95 %		95 %	Dinas Kesehatan	
				Non Polio AFP rate per 100.000 penduduk	Jumlah kasus SFP non Polio yang dilaporkan dibagi jumlah penduduk < 15 tahun dikali 100%	83,3	0	6 -		6 -		6 -		6 -		6 -		6 -	Dinas Kesehatan	
				Cakupan Desa/Kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam	Jumlah KLB di desa/kelurahan yang ditangani < 24 jam dalam periode tertentu dibagi Jumlah KLB di desa/kelurahan yang terjadi pada periode yang sama dikali 100%	100 %	100 %	100 %		100 %		100 %		100 %		100 %		100 %	Dinas Kesehatan	
				Respon PIE (Penyakit Infeksi Emerging) < 24 jam	Kasus PIE segera tertangani < 24 jam	100 %	100 %	100 %		100 %		100 %		100 %		100 %		100 %	Dinas Kesehatan	
				Persentase desa yang mencapai 80% imunisasi dasar lengkap pada bayi.	Jumlah Desa yang sudah mencapai imunisasi dasar lengkap dibagi jumlah seluruh desa x 100%	100 %	100 %	100 %		100 %		100 %		100 %		100 %		100 %	Dinas Kesehatan	
				Persentase imunisasi dasar lengkap pada anak usia 12-23 bulan	Jumlah anak usia 12-23 bulan yg mendapatkan imunisasi dasar lengkap dibagi jumlah anak usia 12-23 bulan x 100%	94,40%	25,7	94,1 %		94,6 %		95 %		95 %		95 %		95 %	Dinas Kesehatan	
				Proporsi kasus Tuberkulosis yang diobati dan sembuh dalam program DOTS	Jumlah pasien tuberkulosis BTA yang mendapat pengobatan melalui DOTS dibagi jumlah pasien baru TB paru BTA yang diperkirakan ada dalam wilayah tersebut dikali 100%	79,25%	53,09%	70 %		80 %		90 %		90 %		90 %		90 %	Dinas Kesehatan	
				Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD	Jumlah penderita DBD yang ditangani sesuai SOP di satu wil. Kerja selama 1 Tahun dibagi Jumlah penderita DBD yang ditemukan di satu wilayah dalam kurun waktu yang sama dikali 100%	100 %	100 %	100 %		100 %		100 %		100 %		100 %		100 %	Dinas Kesehatan	
				Tingkat kematian akibat malaria	Jumlah kematian tersangka malaria dibagi Jumlah penduduk beresiko pada kurun waktu 1 tahun dikali 100%	0	0	<1 -		<1 -		<1 -		<1 -		<1 -		<1 -	Dinas Kesehatan	
				Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yang harus diberikan sarana kesehatan (RS)	pelayanan gawat darurat level 1 dibagi jumlah Rumah Sakit dikali 100%	100 %	100 %	100 %		100 %		100 %		100 %		100 %		100 %	Dinas Kesehatan	
				Persentase puskesmas yang melaksanakan kesehatan tradisional sesuai standar	Jumlah puskesmas yang melaksanakan kesehatan tradisional sesuai standar dibagi jumlah puskesmas dikali 100%	88%	94%	73,53 %		88,24 %		100 %		100 %		100 %		100 %	Dinas Kesehatan	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Formula/Rumus Perhitungan Indikator Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2020)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2021)	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Penanggung jawab			
								Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026			target	Rp	
								target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		target	Rp	
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)		
				Presentase Puskesmas yang melaksanakan manajemen Puskesmas dengan pendekatan keluarga	Jumlah Puskesmas yang melaksanakan manajemen Puskesmas dengan pendekatan keluarga dibagi jumlah Puskesmas dibagi 100%	100 %	100 %	100 %		100 %		100 %		100 %		100 %			Dinas Kesehatan		
		1.02.02.2.02.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah kasus kematian ibu teracak dan teraudi kematian neonatal Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar	Jumlah kasus kematian ibu teracak dan teraudi kematian neonatal Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar	10 kasus 15.986 orang	4 kasus 7.593 orang	20 kasus 16.000 orang	2.150.000.000	2.150.000.000	20 kasus 16.320 orang	2.200.000.000	20 kasus 16.977 orang	2.150.000.000	20 kasus 17.316 orang	2.250.000.000	100 kasus 83.258 orang	10.900.000.000	Dinas Kesehatan Puskesmas		
		1.02.02.2.02.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah tenaga kesehatan yang terlatih dalam pelayanan kesehatan ibu hamil Jumlah ibu bersalin mendapat jaminan persalinan Ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar Jumlah tenaga kesehatan yang terlatih dalam pelayanan kesehatan ibu bersalin	Jumlah tenaga kesehatan yang terlatih dalam pelayanan kesehatan ibu hamil Jumlah ibu bersalin mendapat jaminan persalinan Ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar Jumlah tenaga kesehatan yang terlatih dalam pelayanan kesehatan ibu bersalin	446 orang 738 orang 15.668 orang 64 orang	230 orang 142 orang 7.629 orang 20 orang	231 orang 400 orang 15.000 orang 98 orang	2.700.000.000	2.950.000.000	281 orang 15.300 orang 98 orang	2.950.000.000	381 orang 15.918 orang 98 orang	2.950.000.000	431 orang 16.236 orang 98 orang	2.950.000.000	2.000 orang 78.080 orang 490 orang	14.500.000.000	Puskesmas Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan		
		1.02.02.2.02.03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan sesuai standar Jumlah tenaga kesehatan terlatih pelayanan kesehatan pelayanan bayi baru lahir	Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan sesuai standar Jumlah tenaga kesehatan terlatih pelayanan kesehatan pelayanan bayi baru lahir	15.580 orang 0	7.335 orang 0	15.000 orang 68 orang	600.000.000	15.300 orang 68 orang	600.000.000	15.600 orang 68 orang	650.000.000	15.918 orang 68 orang	685.000.000	16.236 orang 68 orang	773.378.000	78.080 orang 340 orang	3.308.378.000	Puskesmas Dinas Kesehatan	
		1.02.02.2.02.04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah kasus kematian bayi/balita yang teracak dan teraudi kematian neonatal Jumlah balita yang mendapatkan pelayanan sesuai standar Jumlah tenaga kesehatan yang terlatih dalam pelayanan kesehatan ibu balita	Jumlah kasus kematian bayi/balita yang teracak dan teraudi kematian neonatal Jumlah balita yang mendapatkan pelayanan sesuai standar Jumlah tenaga kesehatan yang terlatih dalam pelayanan kesehatan ibu balita	50 kasus 60.540 orang 105 orang	18 kasus 29.348 orang 20 orang	50 kasus 60.000 orang 60 orang	1.700.000.000	50 kasus 61.200 orang 60 orang	1.720.000.000	50 kasus 62.424 orang 60 orang	1.777.170.000	50 kasus 63.672 orang 60 orang	1.780.000.000	50 kasus 64.945 orang 60 orang	1.900.000.000	250 kasus 312.241 orang 300 orang	8.877.170.000	Dinas Kesehatan Puskesmas Dinas Kesehatan	
		1.02.02.2.02.05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah anak usia pendidikan dasar mendapat pelayanan kesehatan di sekolah Jumlah tenaga kesehatan terlatih pelayanan kesehatan usia pendidikan dasar	Jumlah anak usia pendidikan dasar mendapat pelayanan kesehatan di sekolah Jumlah tenaga kesehatan terlatih pelayanan kesehatan usia pendidikan dasar	42.471 orang 0	2.918 orang 0	17.000 orang 34 orang	840.000.000	17.340 orang 34 orang	846.000.000	17.686 orang 34 orang	850.000.000	18.039 orang 34 orang	857.000.000	18.400 orang 34 orang	864.700.000	88.465 orang 170 orang	4.257.700.000	Puskesmas Dinas Kesehatan	
		1.02.02.2.02.06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah tenaga kesehatan dan kader kesehatan terlatih pelayanan posbindu Jumlah orang usia 15-59 tahun mendapat layanan kesehatan Jumlah tenaga kesehatan yang terlatih pelayanan kesehatan usia produktif	Jumlah tenaga kesehatan dan kader kesehatan terlatih pelayanan posbindu Jumlah orang usia 15-59 tahun mendapat layanan kesehatan Jumlah tenaga kesehatan yang terlatih pelayanan kesehatan usia produktif	68 orang 541.772 orang 34 orang	34 orang 270.203 orang 34 orang	68 orang 585.806 orang 34 orang	820.000.000	68 orang 597.500 orang 34 orang	840.939.000	68 orang 609.450 orang 34 orang	840.000.000	68 orang 615.500 orang 34 orang	845.000.000	68 orang 627.800 orang 34 orang	845.000.000	890.400.000 2.450.250 orang 170 orang	340 orang 4.236.339.000	Dinas Kesehatan Puskesmas Dinas Kesehatan	
		1.02.02.2.02.07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah lansia yang memperoleh pelayanan sesuai standar Jumlah tenaga kesehatan yang terlatih pelayanan kesehatan usia lanjut	Jumlah lansia yang memperoleh pelayanan sesuai standar Jumlah tenaga kesehatan yang terlatih pelayanan kesehatan usia lanjut	148.431 orang 34 orang	88.535 orang 34 orang	140.000 orang 34 orang	575.000.000	142.800 orang 34 orang	582.500.000	145.656 orang 34 orang	587.000.000	148.570 orang 34 orang	595.700.000	151.540 orang 34 orang	605.270.000	588.566 orang 170 orang	2.945.470.000	Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan	
		1.02.02.2.02.08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah penderita hipertensi mendapat pelayanan kesehatan Jumlah tenaga kesehatan yang dilatih penanganan hipertensi	Jumlah penderita hipertensi mendapat pelayanan kesehatan Jumlah tenaga kesehatan yang dilatih penanganan hipertensi	83.390 orang 68 orang	66.035 orang 68 orang	93.877 orang 68 orang	420.000.000	95.750 orang 68 orang	428.000.000	131.090 orang 68 orang	436.800.000	133.711 orang 68 orang	440.000.000	136.385 orang 68 orang	460.000.000	496.936 orang 340 orang	2.184.800.000	Puskesmas Dinas Kesehatan	
		1.02.02.2.02.09	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Mellitus	Jumlah penderita Diabetes Mellitus mendapat pelayanan kesehatan Jumlah tenaga kesehatan yang dilatih penanganan diabetes mellitus	Jumlah penderita Diabetes Mellitus mendapat pelayanan kesehatan Jumlah tenaga kesehatan yang dilatih penanganan diabetes mellitus	27.391 orang 68 orang	21.072 orang 68 orang	30.144 orang 68 orang	430.000.000	34.410 orang 68 orang	439.000.000	35.098 orang 68 orang	448.900.000	35.800 orang 68 orang	450.000.000	36.516 orang 68 orang	460.000.000	141.824 orang 340 orang	2.227.900.000	Puskesmas Dinas Kesehatan	
		1.02.02.2.02.10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah tenaga kesehatan yang dilatih penanganan orang dalam gangguan jiwa berat Jumlah orang dengan gangguan jiwa berat mendapat pelayanan kesehatan	Jumlah tenaga kesehatan yang dilatih penanganan orang dalam gangguan jiwa berat Jumlah orang dengan gangguan jiwa berat mendapat pelayanan kesehatan	1 orang 2.563 orang	0 1.512 orang	10 orang 2.846 orang	540.000.000	10 orang 2.902 orang	560.000.000	10 orang 2.840 orang	582.000.000	10 orang 2.896 orang	585.000.000	10 orang 2.953 orang	610.000.000	50 orang 11.591 orang	2.877.000.000	Dinas Kesehatan Puskesmas	
		1.02.02.2.02.11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah layanan yang dapat mengakses pemeriksaan TCM Jumlah orang terduga tuberkulosis mendapat pelayanan kesehatan	Jumlah layanan yang dapat mengakses pemeriksaan TCM Jumlah orang terduga tuberkulosis mendapat pelayanan kesehatan	0 1.651 orang	0 243 orang	10 layanan 3.861 orang	490.000.000	10 layanan 3.940 orang	505.000.000	10 layanan 4.016 orang	521.500.000	10 layanan 4.096 orang	525.000.000	10 layanan 4.177 orang	560.000.000	50 layanan 20.090 orang	2.601.500.000	Dinas Kesehatan Puskesmas	
		1.02.02.2.02.12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Teinteksi HIV	Jumlah layanan VCT Jumlah orang dengan risiko teinteksi HIV mendapat pelayanan kesehatan	Jumlah layanan VCT Jumlah orang dengan risiko teinteksi HIV mendapat pelayanan kesehatan	0 14.055 orang	0 5.182 orang	10 layanan 12.293 orang	1.145.400.000	10 layanan 12.540 orang	1.200.000.000	10 layanan 12.790 orang	1.261.000.000	10 layanan 13.045 orang	1.285.000.000	10 layanan 13.305 orang	1.390.000.000	50 layanan 63.973 orang	6.261.400.000	Puskesmas	
		1.02.02.2.02.13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa	Jumlah jenis kegiatan penanggulangan KLB Bencana	Jumlah jenis kegiatan penanggulangan KLB Bencana	7 jenis	7 jenis	7 jenis	660.000.000	7 jenis	676.000.000	7 jenis	693.600.000	7 jenis	700.000.000	7 jenis	740.000.000	7 jenis	3.469.600.000	Dinas Kesehatan	
		1.02.02.2.02.14	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	Jumlah jenis kegiatan Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	Jumlah jenis kegiatan Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	3 jenis	3 jenis	3 jenis	800.000.000	3 jenis	710.000.000	3 jenis	671.000.000	3 jenis	425.000.000	3 jenis	495.000.000	3 jenis	3.101.000.000	Dinas Kesehatan	
		1.02.02.2.02.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah tenaga kesehatan, kader, Lintas Program, Lintas Sektor terlatih dan mendapat pembinaan kesehatan gizi masyarakat Jumlah kasus gizi buruk yang teracak Jumlah masyarakat mendapat pelayanan kesehatan gizi	Jumlah tenaga kesehatan, kader, Lintas Program, Lintas Sektor terlatih dan mendapat pembinaan kesehatan gizi masyarakat Jumlah kasus gizi buruk yang teracak Jumlah masyarakat mendapat pelayanan kesehatan gizi	400 orang 17 kasus 52.000 orang	250 orang 0 24.590 orang	350 orang 40 kasus 52.000 orang	2.125.623.000	400 orang 40 kasus 52.000 orang	2.225.623.000	450 orang 40 kasus 52.000 orang	2.335.623.000	500 orang 40 kasus 52.000 orang	2.415.189.000	550 orang 40 kasus 52.000 orang	2.825.623.000	2.250 orang 200 kasus 260.000 orang	11.927.681.000	Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan Puskesmas	
		1.02.02.2.02.16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Puskesmas yang melaksanakan kesehatan kerja dasar dan kegiatan kesehatan olahraga pada kelompok masyarakat di wilayah kerjanya	Jumlah Puskesmas yang melaksanakan kesehatan kerja dasar dan kegiatan kesehatan olahraga pada kelompok masyarakat di wilayah kerjanya	34 Puskesmas	34 Puskesmas	34 Puskesmas	850.000.000	34 Puskesmas	850.000.000	34 Puskesmas	885.000.000	34 Puskesmas	925.000.000	34 Puskesmas	925.000.000	34 Puskesmas	4.435.000.000	Puskesmas	
		1.02.02.2.02.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Puskesmas melaksanakan pengolahan limbah medis dan non medis Jumlah Dokumen Penilaian Risiko Kesehatan Lingkungan terupdate Jumlah Promosi dan penyuluhan kesehatan yang dilakukan	Jumlah Puskesmas melaksanakan pengolahan limbah medis dan non medis Jumlah Dokumen Penilaian Risiko Kesehatan Lingkungan terupdate Jumlah Promosi dan penyuluhan kesehatan yang dilakukan	34 Puskesmas 0 100 kali	34 Puskesmas 0 100 kali	34 Puskesmas 1 dokumen 110 kali	2.025.000.000	34 Puskesmas dokumen 110 kali	2.200.000.000	34 Puskesmas dokumen 110 kali	2.320.000.000	34 Puskesmas dokumen 110 kali	2.200.000.000	34 Puskesmas dokumen 110 kali	2.200.000.000	34 Puskesmas 1 dokumen 110 kali	34 Puskesmas 1 dokumen 110 kali	10.945.000.000	Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan
		1.02.02.2.02.18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Puskesmas terdampingi asuhan mandiri, pemanfaatan tanaman obat keluarga, dan akupresure Jumlah Puskesmas melakukan kegiatan surveilans kesehatan	Jumlah Puskesmas terdampingi asuhan mandiri, pemanfaatan tanaman obat keluarga, dan akupresure Jumlah Puskesmas melakukan kegiatan surveilans kesehatan	25 Puskesmas 34 Puskesmas	25 Puskesmas 34 Puskesmas	25 Puskesmas 34 Puskesmas	287.000.000	30 Puskesmas 34 Puskesmas	290.000.000	34 Puskesmas 34 Puskesmas	290.000.000	34 Puskesmas 34 Puskesmas	305.000.000	34 Puskesmas 34 Puskesmas	305.000.000	34 Puskesmas 34 Puskesmas	1.477.000.000	Dinas Kesehatan	
		1.02.02.2.02.20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah jenis penyakit menular langung dan penyakit tidak menular terkemabdi	Jumlah jenis penyakit menular langung dan penyakit tidak menular terkemabdi	17 jenis	17 jenis	17 jenis	1.500.000.000	17 jenis	1.590.000.000	17 jenis	1.689.000.000	17 jenis	1.700.000.000	17 jenis	1.700.000.000	17 jenis	8.179.000.000	Dinas Kesehatan	
		1.02.02.2.02.23	Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus	Jumlah jenis kegiatan pengelolaan upaya kesehatan khusus	Jumlah jenis kegiatan pengelolaan upaya kesehatan khusus	4 jenis	4 jenis	4 jenis	415.000.000	4 jenis	415.000.000	4 jenis	478.500.000	4 jenis	487.378.000	4 jenis	496.500.000	4 jenis	2.292.378.000	Dinas Kesehatan	
		1.02.02.2.02.25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah jenis penyakit menular langung dan penyakit tidak menular terkemabdi	Jumlah jenis penyakit menular langung dan penyakit tidak menular terkemabdi	17 jenis	17 jenis	17 jenis	1.500.000.000	17 jenis	1.590.000.000	17 jenis	1.689.000.000	17 jenis	1.700.000.000	17 jenis	1.700.000.000	17 jenis	8.179.000.000	Dinas Kesehatan	
		1.02.02.2.02.28	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah penduduk mendapat jaminan kesehatan	Jumlah penduduk mendapat jaminan kesehatan	1.264.262 orang	1.191.298 orang	1.264.262 orang	25.987.374.000	1.276.902 orang	28.208.123.000	1.289.674 orang	29.954.802.000	1.302.570 orang	27.835.301.000	1.315.586 orang	30.644.164.000	1.449.007 orang	142.633.764.000	Dinas Kesehatan	
		1.02.02.2.02.28	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	Jumlah frekuensi pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Lab Rujukan/Nasional	Jumlah frekuensi pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Lab Rujukan/Nasional	75 Kali	75 Kali	75 Kali	250.000.000	80 Kali	293.000.000	85 Kali	277.300.000	90 Kali	280.000.000	95 Kali	280.000.000	425 Kali	1.350.300.000	Dinas Kesehatan	
		1.02.02.2.02.34	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah pasien terlayani	Jumlah pasien terlayani	3.750 orang	2039 orang	3.750 orang	1.050.000.000	3.850 orang	1.135.000.000	3.950 orang	1.228.500.000	4.050 orang	1.200.000.000	4.150 orang	1.200.000.000	19.750 orang	5.813.500.000	Dinas Kesehatan	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Formula/Rumus Perhitungan Indikator Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2020)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2021)	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Penanggung jawab		
								Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026			target	Rp
								target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		target	Rp
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)			
1.02.02.2.02.35			Peleaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di	Jumlah fasyankes tereakreditasi	Jumlah fasyankes tereakreditasi	34 fasyankes	34 fasyankes	34 fasyankes	2.210.000.000	35 fasyankes	2.510.000.000	35 fasyankes	2.708.000.000	34 fasyankes	2.710.000.000	28 fasyankes	2.710.000.000	28 fasyankes	12.846.000.000	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.36			Investigasi Awal Kegiatan Tidak Diharapkan (Kejadian Rutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Masasi)	Jumlah investigasi awal KPI	Jumlah investigasi awal KPI	34 puskesmas	34 puskesmas	34 puskesmas	90.000.000	34 puskesmas	90.000.000	34 puskesmas	90.000.000	34 puskesmas	90.000.000	34 puskesmas	90.000.000	34 puskesmas	450.000.000	Puskesmas
1.02.02.2.02.37			Peleaksanaan Kewaspadaan Diri dan Respon Wabah	Jumlah jenis kegiatan Kewaspadaan Diri dan Respon Wabah	Jumlah jenis kegiatan Kewaspadaan Diri dan Respon Wabah	7 jenis	7 jenis	7 jenis	1.020.465.000	7 jenis	1.020.465.000	7 jenis	1.020.468.000	7 jenis	1.020.465.000	7 jenis	1.020.465.000	7 jenis	5.102.328.000	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.02.38			Peyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Kasus Kegawatdaruratan Yang Tertangani	Kasus Kegawatdaruratan Yang Tertangani	119 kasus	152 kasus	200 kasus	1.200.000.000	240 kasus	1.300.000.000	280 kasus	1.400.000.000	320 kasus	1.500.000.000	360 kasus	1.600.000.000	1.400 kasus	7.000.000.000	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.03			Penyenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Teintegrasi	Persentase Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Sistem Informasi Kesehatan yang digunakan dibagi jumlah SIK yang seharusnya digunakan dikali 100%	100 %	100 %	100 %	255.000.000	100 %	280.500.000	100 %	308.550.000	100 %	246.800.000	100 %	248.800.000	100 %	1.337.650.000	
1.02.02.2.03.01			Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	Jumlah Buku Profil Kesehatan dan Buku Saku Kesehatan Terecok	Jumlah Buku Profil Kesehatan dan Buku Saku Kesehatan Terecok	60 buku	70 buku	120 buku	40.000.000	120 buku	44.000.000	120 buku	48.400.000	120 buku	48.400.000	120 buku	48.400.000	600 buku	229.200.000	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.03.02			Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Instansi Pengelola Informasi Kesehatan	Jumlah Instansi Mengelola Informasi Kesehatan	35 unit	35 unit	35 unit	40.000.000	35 unit	44.000.000	35 unit	48.400.000	35 unit	48.400.000	35 unit	48.400.000	35 unit	229.200.000	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.03.03			Pengadaan Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet	Jumlah Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet	Jumlah Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet	2 Unit	4 Unit	2 Unit	175.000.000	2 Unit	192.500.000	2 Unit	211.750.000	2 Unit	150.000.000	2 Unit	150.000.000	10 Unit	879.250.000	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.04			Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C dan D serta Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penerbitan rekomendasi perijinan rumah sakit dan fasyankes	Jumlah rekomendasi perijinan rumah sakit dan fasyankes diterbitkan dibagi jumlah rumah sakit dikali 100%	0 %	0 %	100 %	77.500.000	100 %	77.500.000	100 %	78.750.000	100 %	80.000.000	100 %	80.000.000	100 %	393.750.000	
1.02.02.2.04.01			Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas	Jumlah Rumah Sakit dan Fasyankes dikeluarkan rekomendasi perijinannya	Jumlah Rumah Sakit dan Fasyankes dikeluarkan rekomendasi perijinannya	0	0	85 unit	38.750.000	90 unit	38.750.000	95 unit	38.750.000	100 unit	40.000.000	105 unit	40.000.000	475 unit	196.250.000	Dinas Kesehatan
1.02.02.2.04.03			Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah fasilitas kesehatan meningkat mutu pelayanannya	Jumlah fasilitas kesehatan meningkat mutu pelayanannya	0	0	1 unit	38.750.000	1 unit	38.750.000	1 unit	40.000.000	1 unit	40.000.000	1 unit	40.000.000	1 unit	197.500.000	Dinas Kesehatan
1.02.03			PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase Puskesmas memiliki tenaga kesehatan sesuai standar	Jumlah Puskesmas memiliki tenaga kesehatan sesuai standar dibagi jumlah Puskesmas dikali 100 %	100 %	2.765.054.000	100 %	2.149.602.000	100 %	2.127.172.000	100 %	1.830.964.000	100 %	1.865.042.000	100 %	1.865.042.000	100 %	10.737.834.000	RSD Bagas Waras
				Persentase dokter IGD RSUD yang sudah mengikuti pelatihan kegawatdaruratan sesuai standar	Jumlah dokter IGD yang sudah mengikuti pelatihan kegawatdaruratan dibagi jumlah dokter IGD	84,6		90 %		97 %		97 %		100 %		100 %				
1.02.03.2.01			Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota	Persentase terlaksananya kegiatan pemberian rekomendasi perizinan praktik tenaga kesehatan	Jumlah rekomendasi perizinan praktik tenaga kesehatan diberikan dibagi jumlah pengajuan rekomendasi perizinan dikali 100%	100 %	60.000.000	100 %	66.000.000	100 %	72.600.000	100 %	72.800.000	100 %	72.800.000	100 %	72.800.000	100 %	344.200.000	Dinas Kesehatan
1.02.03.2.01.01			Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Jumlah Rekomendasi Perizinan Tenaga Kesehatan dikeluarkan	Jumlah Rekomendasi Perizinan Tenaga Kesehatan dikeluarkan	1.500 rekomendasi	1131 rekomendasi	1.500 rekomendasi	30.000.000	1.500 rekomendasi	33.000.000	1.600 rekomendasi	36.300.000	1.650 rekomendasi	36.500.000	1.700 rekomendasi	36.500.000	6.000 rekomendasi	172.300.000	Dinas Kesehatan
1.02.03.2.01.02			Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Jumlah perizinan praktik tenaga kesehatan dibina dan diawasi	Jumlah perizinan praktik tenaga kesehatan dibina dan diawasi	100 lokasi	21 lokasi	100 lokasi	30.000.000	100 lokasi	33.000.000	100 lokasi	36.300.000	100 lokasi	36.300.000	100 lokasi	36.300.000	500 lokasi	171.900.000	Dinas Kesehatan
1.02.03.2.02			Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan URM di Wilayah Kabupaten/Kota	Persentase terlaksananya perencanaan kebutuhan dan pendayagunaan SDMK	Jumlah perencanaan kebutuhan dan pendayagunaan SDMK sesuai aturan dibagi jumlah perencanaan kebutuhan dan pendayagunaan SDMK dikali 100%	100 %	2.555.054.000	100 %	1.933.602.000	100 %	1.933.602.000	100 %	1.889.572.000	100 %	1.608.164.000	100 %	1.642.242.000	100 %	9.628.634.000	Dinas Kesehatan
1.02.03.2.02.01			Perencanaan dan Distribusi serta Pemantauan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Dokumen Perencanaan Kebutuhan SDMK dan Profil SDMK	Jumlah Dokumen Perencanaan Kebutuhan SDMK dan Profil SDMK	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	60.000.000	2 dokumen	66.000.000	2 dokumen	72.600.000	2 dokumen	72.600.000	2 dokumen	72.600.000	10 dokumen	343.800.000	Dinas Kesehatan
1.02.03.2.02.02			Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	Jumlah kategori sumber daya manusia kesehatan yang terpenuhi sesuai standar	Jumlah kategori sumber daya manusia kesehatan yang terpenuhi sesuai standar	11 kategori	11 kategori	11 kategori	2.495.054.000	11 kategori	1.867.602.000	11 kategori	1.816.972.000	11 kategori	1.535.564.000	11 kategori	1.569.842.000	11 kategori	9.284.834.000	Dinas Kesehatan
1.02.03.2.03			Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase meningkatnya kompetensi Teknis SDMK tingkat kabupaten	Persentase meningkatnya kompetensi Teknis SDMK tingkat kabupaten	0	0	100 %	150.000.000	100 %	150.000.000	100 %	165.000.000	100 %	150.000.000	100 %	150.000.000	100 %	765.000.000	Dinas Kesehatan
1.02.03.2.03.01			Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah	Jumlah pelaksanaan seleksi tenaga kesehatan terapan tingkat kabupaten dan uji kompetensi jabatan fungsional	Jumlah pelaksanaan seleksi tenaga kesehatan terapan tingkat kabupaten dan uji kompetensi jabatan fungsional	0	0	2 kali	150.000.000	2 kali	150.000.000	2 kali	165.000.000	2 kali	150.000.000	2 kali	150.000.000	10 kali	765.000.000	Dinas Kesehatan
1.02.04			PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Persentase Apotek, Toko Obat, Toko Alkes, Optik dan Usaha Mikro Obat Tradisional yang memenuhi ketentuan	Jumlah Apotek, Toko Obat, Toko Alkes, Optik dan Usaha Mikro Obat Tradisional yang memenuhi ketentuan	50	50	50 %	356.780.000	50 %	355.283.000	50 %	384.518.000	50 %	392.731.000	50 %	393.470.000	50 %	1.852.782.000	Dinas Kesehatan
				Persentase industri rumah tangga pangan, tempat pengolahan makanan dan sekolah serta makanan jajanan yang memenuhi ketentuan	Jumlah industri rumah tangga pangan, tempat pengolahan makanan dan sekolah atau sentra makanan jajanan yang dispeksi dengan hasil memenuhi ketentuan / jumlah total industri rumah tangga pangan, tempat pengolahan makanan dan sekolah atau sentra makanan jajanan yang dispeksi X 100%	25	25	50 %		50 %		50 %		50 %		50 %		50 %	Dinas Kesehatan	
1.02.04.2.01			Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optik, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Persentase apotek, toko obat, toko alat kesehatan dan optikal, UMOT yang diberikan izin dan diawasi	Jumlah apotek, toko obat, toko alat kesehatan dan optikal, UMOT yang diberikan izin dan diawasi	100 %	100 %	100 %	80.000.000	100 %	88.000.000	100 %	96.800.000	100 %	101.740.000	100 %	102.000.000	100 %	468.540.000	Dinas Kesehatan
1.02.04.2.01.01			Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optik, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optik atau Usaha Mikro Obat Tradisional berijin yang diawasi	Jumlah Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optik atau Usaha Mikro Obat Tradisional berijin yang diawasi	0	0	50 lokasi	40.000.000	50 lokasi	44.000.000	50 lokasi	48.400.000	50 lokasi	48.500.000	50 lokasi	48.500.000	250 lokasi	229.400.000	Dinas Kesehatan
1.02.04.2.01.02			Peyediaan dan Pengelolaan Data Perizinan dan Tindak Lanjut Pengawasan Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optik, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah Rekomendasi Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optik, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah Rekomendasi Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optik, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	0	0	300 lokasi	40.000.000	300 lokasi	44.000.000	300 lokasi	48.400.000	300 lokasi	53.240.000	300 lokasi	53.500.000	1.500 lokasi	239.140.000	Dinas Kesehatan
1.02.04.2.02			Pemberian Sertifikat Produksi untuk Sarana Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 tertentu dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga	Persentase Pemberian Sertifikat Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga	Jumlah Sertifikat Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga diterbitkan dibagi jumlah Sertifikat Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga yang direncanakan diterbitkan dikali 100%	100 %	25.000.000	100 %	27.500.000	100 %	30.250.000	100 %	33.275.000	100 %	34.250.000	100 %	34.250.000	100 %	150.275.000	Dinas Kesehatan

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Formula/Rumus Perhitungan Indikator Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2020)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2021)	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	Unit Kerja Penanggung Jawab
								Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026					
								target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp				
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)		
		1.02.04.2.02.02	Pengendalian dan Pengembangan serta Tindak Lanjut Pengawasan Peternakan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 Tertentu (Pengendalian Rumah Tangga)	Jumlah sertifikat Peternakan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT) diterbitkan	Jumlah sertifikat Peternakan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT) diterbitkan	0	0	5 Sertifikat	25.000.000	5 Sertifikat	27.500.000	5 Sertifikat	30.250.000	5 Sertifikat	33.275.000	5 Sertifikat	34.250.000	25 Sertifikat	150.275.000	Dinas Kesehatan	
		1.02.04.2.03	Penerbitan Sertifikat Produk Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produk, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Persentase teraksennanya penerbitan Sertifikat Produk Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produk, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga			100 %	40.000.000	100 %	44.000.000	100 %	48.400.000	100 %	49.335.000	100 %	50.000.000	100 %	231.735.000	Dinas Kesehatan		
		1.02.04.2.03.01	Pengendalian dan Pengembangan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produk Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produk, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Jumlah P-IRT dibina dan diawasi	Jumlah P-IRT dibina dan diawasi			50 lokasi	40.000.000	50 lokasi	44.000.000	50 lokasi	48.400.000	50 lokasi	49.335.000	50 lokasi	50.000.000	250 lokasi	231.735.000	Dinas Kesehatan	
		1.02.04.2.04	Penerbitan Sertifikat Laki Higienitas Tempat Pengolahan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Persentase teraksennanya Penerbitan Sertifikat Laki Higienitas Tempat Pengolahan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)			100 %	50.000.000	100 %	55.823.000	100 %	61.400.000	100 %	61.400.000	100 %	61.400.000	100 %	61.400.000	290.023.000	Dinas Kesehatan	
		1.02.04.2.04.01	Pengendalian dan Pengembangan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laki Higienitas Tempat Pengolahan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Jumlah Tempat Pengolahan Makanan bersertifikat yang diawasi	Jumlah Tempat Pengolahan Makanan bersertifikat yang diawasi			40 Lokasi	50.000.000	40 Lokasi	55.823.000	40 Lokasi	61.400.000	40 Lokasi	61.400.000	40 Lokasi	61.400.000	200 Lokasi	290.023.000	Dinas Kesehatan	
		1.02.04.2.05	Penerbitan Sertifikat Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	Persentase teraksennanya penerbitan Sertifikat Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan			100 %	101.750.000	100 %	106.980.000	100 %	111.368.000	100 %	108.766.000	100 %	105.608.000	100 %	534.482.000	Dinas Kesehatan		
		1.02.04.2.05.01	Pengendalian dan Pengembangan serta Tindak Lanjut Penerbitan Sertifikat Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	Jumlah Lokasi Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan yang dilakukan Pengendalian dan Pengawasan Serta Tindak Lanjut Penerbitan Sertifikat Pembinaan	Jumlah Lokasi Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan yang dilakukan Pengendalian dan Pengawasan Serta Tindak Lanjut Penerbitan Sertifikat Pembinaan	100	100	40 lokasi	101.750.000	40 lokasi	106.980.000	40 lokasi	111.368.000	40 lokasi	108.766.000	40 lokasi	105.608.000	200 lokasi	534.482.000	Dinas Kesehatan	
		1.02.04.2.06	Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	Persentase teraksennanya Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga		25	25	100 %	30.000.000	100 %	33.000.000	100 %	36.300.000	100 %	38.215.000	100 %	40.212.000	100 %	177.727.000	Dinas Kesehatan	
		1.02.04.2.06.01	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengembangan serta Tindak Lanjut	Jumlah produk makanan minuman IRT yang diperiksa	Jumlah produk makanan minuman IRT yang diperiksa	100	100	20 produk	30.000.000	20 produk	33.000.000	20 produk	36.300.000	20 produk	38.215.000	20 produk	40.212.000	100 produk	177.727.000	Dinas Kesehatan	
		1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Capaian Desa Siaga Aktif	Jumlah desa siaga strata pertama dan strata mandiri dibagi jumlah total desa dikali 100 persen	27	18	82 %	686.695.000	82 %	804.116.000	84 %	749.836.000	84 %	738.780.000	86 %	709.023.000	86 %	3.684.992.000	Dinas Kesehatan	
		1.02.05.2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kebijakan kesehatan yang dibuat di tingkat kabupaten	Jumlah kebijakan kesehatan yang dibuat di tingkat kabupaten sampai tahun ini	57,8	57,6	12 kebijakan	300.000.000	13 kebijakan	396.000.000	14 kebijakan	345.170.000	15 kebijakan	345.000.000	16 kebijakan	323.059.000	16 kebijakan	1.709.229.000	Dinas Kesehatan	
		1.02.05.2.01.01	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan	Jumlah kegiatan advokasi, pemberdayaan masyarakat dan kemitraan	Jumlah kegiatan yang dilaksanakan selama 1 tahun	11	11	50 kali	300.000.000	50 kali	396.000.000	50 kali	345.170.000	50 kali	345.000.000	50 kali	323.059.000	250 kali	1.709.229.000	Dinas Kesehatan	
		1.02.05.2.02	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promosi Peningkatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase rumah tangga yang diperiksa hidup bersih dan sehat (PHBS)	Jumlah rumah tangga strata sehat utama dan sehat sempurna dibagi jumlah rumah tangga yang disurvei PHBS dikali 100 persen			97 %	62.200.000	98 %	100.000.000	98 %	62.200.000	99 %	62.200.000	99 %	62.200.000	99 %	428.800.000	Dinas Kesehatan	
		1.02.05.2.02.01	Penyenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan	Jumlah pembinaan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS)	Jumlah pembinaan PHBS yang dilaksanakan selama 1 tahun	96,3		25 kali	62.200.000	25 kali	100.000.000	30 kali	62.200.000	30 kali	62.200.000	35 kali	62.200.000	146 kali	428.800.000	Dinas Kesehatan	
		1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Berasumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase teraksennanya Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Berasumber daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan yang terlaksana dibagi jumlah kegiatan yang ada dikali 100	20	25	100 %	303.735.000	100 %	308.118.000	100 %	322.468.000	100 %	308.560.000	100 %	303.764.000	100 %	1.548.663.000	Dinas Kesehatan	
		1.02.05.2.03.01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Berasumber Daya	Jumlah petugas Promotus dan Tenaga kesehatan lain yang dilatih	Jumlah petugas Promotus dan Tenaga kesehatan lain yang dilatih	0	0	347 orang	303.735.000	347 orang	308.118.000	347 orang	322.468.000	347 orang	308.560.000	347 orang	303.764.000	1.735 orang	1.548.663.000	Dinas Kesehatan	
			JUMLAH						892.011.717.000		401.834.740.000		410.971.672.000		397.528.885.000		1.989.671.675.000				

